

A. **Perilaku Politik Menyimpang Dan Kehidupan Berbangsa Bernegara Indonesia: Suatu Wacana Psikologi¹**

Drs. H. Hatta Albanik M.Psi.
Fakultas Psikologi Universitas Padjadjaran

Sejak lama dalam wacana psikologi dikenal istilah *people's social behaviour* sebagai perwujudan kepribadian individu yang melakukan *political action* dalam kehidupan sosial politiknya yang kemudian lebih dikenal dengan istilah *political behaviour* (perilaku politik).

Dalam konsep psikologi tentang kepribadian, selalu digambarkan bahwa perilaku sosial (*social behaviour*) merupakan bagian tidak terpisahkan dari kepribadian seseorang. Bahkan tidak sedikit konsep teori psikologis yang menganggap bahwa kepribadian seseorang hanya akan terukur melalui perwujudannya dalam perilaku sosial.

Perilaku sosial seringkali dalam pelbagai pemahaman psikologi diartikan dalam beberapa pengertian, antara lain:

- Perilaku seseorang yang terjadi karena kehadiran individu atau orang lain
- Perilaku individu dalam kelompok
- Perilaku yang terjadi dibawah kendali keinginan dan aturan sosial dimana individu bergabung

Oleh karenanya memang akan mustahillah bila individu manusia tidak menempatkan perilaku sosial sebagai bagian penting dari kepribadiannya, mengingat bahwa salah satu yang menjadikan manusia sebagai makhluk unggul dan mulia dibanding makhluk lainnya adalah oleh karena manusia merupakan makhluk sosial yang mampu menciptakan dan menyelenggarakan kehidupannya secara bersama dengan manusia lain. Tidak heran bilamana tata berperilaku sosial merupakan bagian terpenting bagi peradaban manusia. Setiap peradaban manusia hanya mampu bertahan (*survive*) bilamana mampu menyelenggarakan tata kehidupan sosial yang beradab pula. Jatuh banggunya peradaban manusia dalam sejarah masa ke masa kehidupan nenek moyangnya ditandai oleh semakin tertata tidaknya perilaku sosial dalam penyelenggaraan kehidupannya bersama orang lain. Mulai dari manusia memakan sesama (*homo homini lupus*) sebagai bentuk kehidupan primitif, jahiliah, tidak beradab untuk kemudian berkembang sehingga menjadi suatu perikehidupan sosial bersama yang simbiosis, tertata yang dianggap beradab, dimana perilaku sosial

¹ Disampaikan pada Seminar Nasional Perilaku Politik Menyimpang dan Prospek Kehidupan Bangsa dan Negara Indonesia, 15 Juli 2000, Bandung

individu-individunya berlangsung dalam tatanan teratur, saling menghormati sesama, saling membutuhkan, saling melengkapi dlsb.

Tata perilaku sosial ini yang tampaknya di kalangan manusia Indonesia kini mulai diabaikan urgensinya. Mulai dari lingkungan sosialnya yang terkecil (yakni keluarga) sampai dengan lingkungan sosial terbesar (yakni negara, bangsa) tidak terlihat upaya intensif menanamkan prinsip dasar perilaku sosial untuk hidup bersama, memiliki kepentingan bersama, saling menghormati, saling menghargai dan pelbagai saling dalam kata kebersamaan lainnya. Bukan saja di tingkat nasional menegara; bahkan di tingkat lokal selingkungan sekalipun pola tata krama berkehidupan sosial tidak ditanamkan secara beradab. Masing-masingnya berperilaku sosial sesuai dengan dorongan primitifnya yang hampir-hampir tidak lagi mampu dikendalikan oleh unsur pengendalian ego berakal sehat dan berperasaan. Perilaku sosialnya tunduk semata-mata pada hukum-hukum psikologi massa yang meleburkan ego dan keindividualan yang unik dari setiap orang menjadi tingkah laku hooligan yang dikuasai alam ketidaksadaran akan perlunya pengendalian nalar dan akal sehat serta emosi kemanusiaan.

Selama hampir 55 tahun kebersamaan sebagai bangsa dan negara, Indonesia belum mampu menciptakan budaya dan tata krama bersama dalam tata pergaulan antar manusianya. Masalah “selamat pagi” dan “assalamu alaikum” masih dikontradiktifkan apakah tata sopan santun nasional atau etika impor dalam budaya pergaulan interpersonal sehari-hari kita.

Tampaknya masalah perilaku sosial pada bangsa Indonesia ini masih bermasalah. Maka karena perilaku sosial merupakan induk dari perilaku politik, dengan sendirinya kita akan bermasalah pula dalam berperilaku politik. Bahkan timbul kesan luas bahwa semua masalah yang kita alami dalam kehidupan bangsa dan negara ini bersumber pada gangguan dari perilaku politik yang dipraktekkan dalam kehidupan sehari-harinya. Mulai dari fluktuasi mata uang rupiah, mahalannya harga cabe di pasar, meningkatnya pelacuran, mogoknya buruh, meningkatnya rasa cemas, memuncaknya agresi massa, dst.

Perilaku Politik

Didalam kajian psikologi sejak lama Lewin (1965) mengartikan perilaku politik sebagai, “participations by individual in a group decision making process.” Negara dan bangsa adalah suatu bentuk pengorganisasian individu manusia dalam pengelompokan terbesar secara formal, efektif, dan teridentifikasi yang pernah dikenal dan dihasilkan oleh sejarah peradaban umat manusia hingga saat ini.

Dengan demikian, perilaku politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah perilaku yang menampilkan kegiatan pelibatan dan keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan yang dibuat (dari dan) bagi kehidupan bangsa negara.

Terdapat pula pandangan bahwa perilaku politik adalah perilaku-perilaku yang terdapat pada apa yang kita rumuskan sebagai dunia politik dengan segala tingkah polah yang terjadi didalamnya.

Jadi, dalam artian luas, tingkah laku politik adalah merupakan tingkah laku yang akan kita temukan pada setiap individu manusia karena saat ini hampir setiap individu manusia tentulah akan menjadi warga negara dari suatu bangsa dan negara. Kata negara dan bangsa pun saat ini hampir selalu disebutkan sebagai satu kata majemuk karena peradaban modern manusia saat ini memberikan tempat sangat sedikit bagi suatu negara etnik, rasial, mistis, religi, atau agama. Keikutsertaan atau ketidakikutsertaan menggunakan hak suara dalam pemilihan umum dari seorang warga manusia adalah wujud perilaku politik dalam pengertian ini. Tentu saja banyak bentuk dan contoh lainnya yang dapat disusulkan.

Di pihak lain, dalam artian sempit, perilaku politik adalah perilaku manusia yang melakukan aktifitas di dalam lingkungan kehidupan politik (yang ruang lingkungannya tergantung pada rumusan dan pengertian yang dibuatkan oleh masyarakat dan lingkungannya). Dalam pengertian ini, perilaku politik hanyalah perilaku yang ditemukan pada manusia-manusia yang menjadi insan politik dan terlibat aktif dalam proses pengambilan keputusan untuk (serta) oleh negara, seperti: anggota partai, parlemen, negarawan, politisi, dsb.

Adanya anggapan banyak ahli bahwa pada hakekatnya manusia adalah *zoon politicon* (insan politik) kiranya dapat mengkonvergensi dua pengertian tersebut lebih cenderung pada artian perilaku politik dalam artian luar dan bukannya monopoli semata para politisi dan sejenisnya saja.

Perilaku Politik Menyimpang

Karena perilaku politik merupakan bagian dari perilaku sosial, dan perilaku sosial sangat dipengaruhi oleh sistem sosial, maka Zimmerman dan Pollner (1970) merumuskan bahwa:

Perilaku politik = Fungsi (sistem sosial)

Namun para ahli Psikologi Individual beranggapan bahwa oleh karena unsur individu dan keunikannya lebih kuat pengaruhnya terhadap perilaku individu dibanding pengaruh unsur sosialnya, maka perilaku politik seseorang perlu lebih memperhatikan pada aspek-aspek yang terdapat pada dirinya dalam berperilaku politik itu.

Pandangan-pandangan diatas perlu digaris-bawahi dalam menelusuri pengertian dan dinamika terjadinya perilaku politik menyimpang.

Dalam pemahaman umum, psikologi mengaitkan unsur kesehatan mental dalam merumuskan dan memahami tingkah laku menyimpang sebagai tingkah laku yang dirasakan sebagai mengganggu dirinya (*complain*) atau mengganggu lingkungan atau orang lain (*sign* atau *symptom*).

Dengan demikian perilaku politik menyimpang dapat diartikan sebagai perilaku politik yang menimbulkan gangguan mental bagi dirinya sendiri atau orang lain; atau perilaku politik yang dirasakan sebagai gangguan oleh atau menimbulkan gangguan pada orang lain: bukan semata-mata karena bertentangan atau melawan hukum. Hukum memang dibuat untuk memungkinkan diberikannya *punishment*

terhadap sesuatu yang menimbulkan gangguan psikis maupun fisik terhadap manusia. *Reward* dan *punishment* dikenal dalam psikologi sebagai instrumen yang dibutuhkan dalam proses pembentukan tingkah laku dan kepribadian.

Perilaku politik menyimpang juga dirasakan sebagai gangguan oleh yang bersangkutan sendiri karena menimbulkan dampak tekanan (*stress*), *tension*, *maladjustment*, dsb, terutama karena reaksi diri dan lingkungan terhadap perilakunya tersebut. Suatu proses rekrutmen yang keliru dalam kepemimpinan partai sehingga menempatkan seseorang berkecerdasan rendah sebagai pimpinan partai, sementara masalah politik yang dihadapinya memerlukan kecerdasan tinggi untuk mampu meyakinkan masyarakat akan gagasan dan keinginan partainya; akan mengakibatkannya mengalami gangguan psikis karena ketidakmampuannya itu. Di lain pihak, masyarakat akan merasa terganggu pula oleh karena masalah yang dihadapinya tidak mampu diatasi dengan cerdas dan baik yang berakibat penderitaan padanya.

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara selama limapuluh lima tahun merdeka, di Indonesia perilaku politik seringkali ditampilkan melalui corak perilaku yang tidak menampilkan cukup kecerdasan. Banyak masalah kehidupan berbangsa dan bernegara diselesaikan dengan pola perilaku yang menampilkan ciri: kecerdasan rendah, emosionalitas tidak terkendali, interaksi sosial buruk, kurang mengindahkan norma, aturan, values, cenderung menonjolkan kehebatan diri sendiri atau kelompok sehingga akan menghambat penyesuaian diri dengan alam lingkungannya.

Menarik untuk disimak bahwa dalam perjalanan sejarah Indonesia, momen-momen terpenting yang dijalani dalam kehidupan berbangsa bernegaranya; banyak melibatkan unsur dan peran kecendekiaan para cendekiawan dalam pengambilan keputusannya. Sebagaimana dapat terlihat pada awal kemerdekaan, penyusunan naskah kemerdekaan, konstitusi dan ideologi, perjuangan diplomasi mempertahankan integritas wilayah Indonesia melawan agresi Belanda dengan negara boneka dan separatismenya, dlsb. Momen-momen tersebut ditandai oleh setting perilaku yang cerdas, emosi yang matang terkendali, motivasi dedikatif yang tinggi dalam kebersamaan sebagai bangsa diatas kepentingan golongan/kelompok/partai.

Ironis bahwa setelah Indonesia merdeka dan menghasilkan lebih banyak orang terdidik bahkan yang berhimpun dalam organisasi dengan menonjolkan atribut kecendekiawanan, justru perilaku politik yang dihasilkannya menampilkan pola setting sebaliknya: tidak cerdas, emosional tidak terkendali, moralitas rendah, norma dan values ditafsirkan bagi kepentingan diri sendiri/kelompok/golongan dengan mengorbankan bangsa atau orang lain. Kondisi menyimpang dalam perilaku berbangsa bernegara ini membawa Indonesia pada titik nadir, lebih buruk dari sebelum proklamasi kemerdekaan. Jadi kelirulah anggapan bahwa kita sudah mengalami proklamasi yang kedua, padahal kenyataannya kita menampilkan simptom perilaku menyimpang.

Patterson (1990) mengutarakan bahwa secara keperilakuan, menurut konsep psikologi, perilaku politik terutama akan ditemukan dalam bentuk: aktifitas pemerintahan dan negara, adu kuat pengaruh dan kekuasaan dalam negara, aktifitas sosial kemasyarakatan, aktifitas mendayagunakan negara bagi kesejahteraan warganya, pendayagunaan warga bagi berfungsinya negara.

Penyimpangan perilaku politik akan terjadi bila fungsi negara ditujukan bagi terciptanya gangguan terhadap kehidupan warganegaranya. Dan harus diakui selama ini, perilaku politik dominan yang kita temukan dalam bentuk-bentuk yang dikemukakan Patterson tersebut, hampir selalu berdampak bahkan nyata-nyata diarahkan Negara (c.q. pemerintah, legislative, yudikatif pusat dan daerah) untuk terjadinya gangguan terhadap kehidupan warganegaranya.

Jadi, bagaimana prospek kehidupan kita belum hidup berbangsa dan bernegara dimasa depan?

Instropeksi dan restropeksi di atas setidaknya kita perlukan untuk menemukan “jalan lurus” dalam kehidupan keprilakuan politik kita. Peranan pemimpin dan aktifis politik seharusnya kembali mampu membimbing masyarakat luas tentang bagaimana seharusnya berperilaku dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sebagaimana dengan berhasil telah ditampilkan oleh para perintis pergerakan kemerdekaan, pendiri bangsa dan pejuang pembela bangsa terdahulu. Perilaku politik mereka telah berhasil menjadi teladan dan penyuluh tentang bagaimana seharusnya rakyat harus berperilaku dalam hidup berbangsa dan bernegara. Notabene sebagian besar rakyat Indonesia masa itu tidak pernah mengenal bagaimana arti negara, bangsa, proklamasi bahkan ‘Indonesia’. Namun teladan perilaku membuat mereka mau berkorban memberikan apapun yang mereka miliki demi hidup berbangsa serta bernegara merdeka.

Penyebab Terjadinya Perilaku Politik Menyimpang

Stanley Milgram (1974) memodifikasi pandangan Zimmerman dengan menyatakan bahwa: $B = F(S)$ (Response – Situations). Kalau mengacu pada pandangan Zimmerman, maka perilaku politik menyimpang dapat terjadi oeh karena orang berespon terhadap sistem sosial secara keliru atau sistem sosial menyimpanglah yang membuat orang menjadi berperilaku politik menyimpang.

Oleh karena, Stanley Milgram berpendapat bahwa perilaku politik merupakan respon semata terhadap situasi yang dihadapinya; maka bentuk respon tersebut bukanlah semata-mata karena orang melakukan penyesuaian terhadap situasi yang dihadapinya itu secara pasif. Pada kenyataannya manusia dapat pula berlaku aktif dengan memilih dalam situasi apa dia mau memberikan respon; bahkan bilamana perlu manusia dapat pula melakukan perubahan atau merekayasa situasi yang akan dipilihnya untuk direspon.

Bila dikaitkan dengan pengertian perilaku politik dalam artian luas atau sempit sebagaimana diutarakan pada awal tulisan ini, penerapannya dalam perilaku politik menyimpang yang banyak ditemukan pada masyarakat dan pelaku politik serta pemerintahan kita dewasa ini haruslah kita simpulkan bahwa bagaimanapun perubahan sistem sosial diutak-atik diupayakan untuk dirubah melalui hukum, peraturan, undang-undang dan semacamnya belum akan menghentikan penyimpangan perilaku politik. Padahal upaya itu memerlukan biaya sosial dan material sangat besar; sementara hasilnya sudah diperkirakan tidak akan terlalu berarti.

Penyimpangan perilaku politik hanya akan terjadi bilamana terjadi perubahan pada perilaku politik itu sendiri, yaitu mau dan bersedia berperilaku sesuai dengan sistem sosial yang telah disepakati. Bukannya mengkambinghitamkan semata sistem sosial sebagai sumber dari penyimpangan perilaku yang dilakukannya. Seorang dewasa yang menjadi penderita kecanduan narkoba, tidak layak mengatakan bahwa itu terjadi karena ada pengedar yang dengan mudah ditemuinya di sekitar lingkungannya. Dia menderita kecanduan narkoba karena dia sendiri memilih menjadi orang yang rapuh iman tergoda untuk mencoba menikmati narkoba.

Paradigma psikoterapi saat ini lebih memilih penyembuhan dilakukan terhadap perilaku pasien yang menyimpang itu sendiri daripada mengutak-atik lingkungannya yang memang tidak pernah datang ke tempat praktek terapis untuk dirawat sebagai pasien. Penyembuhan harus dilakukan dengan memperkuat pasien agar tahan dan mampu mengatasi setiap gangguan. Darimana pun datangnya, baik dari lingkungan maupun dari sumber didalam dirinya sendiri.

Analog dengan kondisi Indonesia untuk dapat bertahan sebagai bangsa dan negara dalam milenium ini, perubahan perilaku kearah penguatan kehidupan berbangsa bernegara lebih perlu kita lakukan di dalam diri bangsa dan negara ketimbang mempersalahkan bangsa lain bahkan dunia global yang dianggap mencoba mengambil keuntungan dari kisruhnya kelakuan kita sendiri.

B.

**Perilaku Sosial, Perilaku Politik
Dan Kepribadian Manusia**

Drs. H. Hatta Albanik, M.Psi.
Fakultas Psikologi Universitas Padjadjaran

Pendahuluan

Sebagai makhluk hidup, manusia merupakan spesies luhur dibandingkan makhluk hidup lainnya. Diantara sekian banyak keunggulan yang dianggap menjadi ciri keluhurannya itu adalah kenyataan bahwa makhluk manusia merupakan makhluk sosial disamping kodratnya sebagai makhluk individu.

Sebagai makhluk individu manusia menyelenggarakan kehidupannya sebagaimana makhluk-makhluk lainnya dari spesies lebih rendah dalam suatu siklus kehidupan yang sirkuler berulang mulai dari konsepsi; kelahiran (birth)-survival-reproduktif-death-secoy. Satu-satunya nilai sosial (kalaupun "penamaan" itu tepat) pada makhluk-makhluk ini tampaknya hanya terdapat pada proses reproduksi yang mereka lakukan secara tidak bisa sendirian karena harus dilakukan terhadap objek di luar dirinya yaitu makhluk dalam spesies itu agar tidak punah dari muka bumi ini karena masih memiliki keturunannya yang meneruskan eksistensi spesies mereka.

Sebagai makhluk sosial manusia menyelenggarakan pula kehidupannya secara tidak sendirian dan tidak semata-mata demi mempertahankan survival dan eksistensi dari spesiesnya. Melainkan harus pula menyelenggarakan kehidupannya untuk dan bersama-sama makhluk manusia (bahkan juga makhluk spesies lain) agar proses perjalanan kehidupannya dapat berlangsung secara berarti bagi diri dan lingkungannya.

Kehidupan yang dijalani oleh manusia memang tidaklah sesederhana kehidupan yang dijalani oleh makhluk hidup dari spesies lainnya. Itulah sebabnya untuk menjalaninya harus melakukan secara bersama-sama dan tidak bisa sendirian, individual semata.

Kehidupan sosial memang merangkum kerumitan karena harus melibatkan relasi inter-individu dalam suatu jalinan dan tatanan yang tidak sederhana. Itulah sebabnya mengapa makhluk hidup dari spesies sederhana tidak akan mungkin mampu melaksanakan kehidupannya dalam suatu bentuk kehidupan sosial. Itulah pula sebabnya maka kehidupan sosial inter individu hanya akan ditemukan pada makhluk hidup dari spesies yang sangat tinggi, dan dianggap sebagai salah satu indikator dari jenis spesies luhur diantara spesies-spesies lainnya.

Kehidupan Sosial Dan Makhluk Sosial

Kehidupan sosial berarti menjalin relasi inter individu dan interpersonal secara menyeluruh dan komprehensif. Melibatkan seluruh totalitas aspek kepribadian dari individu dan person yang menyelenggarakan relasi itu. Makhluk spesies sederhana dianggap belumlah merupakan makhluk yang lengkap anatomi, fisiologik dan

biologiknya. Sehingga walaupun terjadi relasi inter individu diantara mahluk spesies sederhana itu, maka sulit terjadi relasi total dari semua unsure dan aspek yang dimiliki. Itulah sebabnya banyak ahli beranggapan bahwa 'social drive' tidak akan pernah ditemukan dimiliki oleh mahluk spesies sederhana. 'sosial drive' baru mulai terlacak keberadaannya pada jenis mahluk dari spesies yang dianggap tinggi dimana manusia dianggap menjadi spesies paling luhur.

Bagi manusia sebagai mahluk sosial, 'social drive' diartikan sebagai dorongan untuk melakukan personal relation terhadap individu lainnya sebagai bagian dari hasrat untuk hidup. Hal ini sering berarti bahwa semakin kecil atau rendah social drive yang dimiliki seseorang maka semakin kecil atau rendah pula hasratnya pula menyelenggarakan kehidupan. Pola hidupnya menjadi sangat individual, menyendiri dan memisahkan diri sebagai indicator dari hasrat untuk mengasingkan diri dari kehidupan nyata yang normal, dan dirasa semakin rumit dan sukar diikutinya.

Kehidupan yang dijalani manusia memang jauh lebih kompleks, lebih rumit dan lebih komprehensif disbanding kehidupan yang dijalani oleh mahluk sederhana. Sehingga tidak mungkin manusia secara individu menjalani kehidupannya itu secara individu, sendiri dan terasing dari relasi dengan sesame individu manusia lainnya. Secara alamiah bahkan itu berlangsung mulai sejak pra-konsepsi dan proses kelahiran yang harus memerlukan bantuan dari manusia lainnya. Siklus kehidupan manusia yang berlangsung linear, menyebabkan dari generasi ke generasi manusia akan menjalani kehidupan yang semakin berbeda dan bergerak kearah semakin maju, dinamis, dan senantiasa berubah sebagai dalil dalam proses penyelenggaraan kehidupannya. Setiap generasi manusia menjalani kehidupan yang selalu berbeda dari generasi lainnya, menciptakan karakteristiknya sendiri yang menciptakan rangkaian noktah peradaban manusia. Seluruh aspek dalam diri manusia menyelenggarakan kehidupannya menciptakan keunikannya sendiri yang tidak akan terdapat dalam pola kehidupan mahluk hidup lainnya.

Manusia Dan Perilaku Sosial

Dalam perjalanan hidupnya, manusia bermula dari kelahiran sebagai awal kehidupan yang ditilik dari segi keperilakuan menampilkan karakteristik keprilakuan anak yang berbeda dengan keprilakuannya setelah dewasa. Pola perkembangan perilaku anak-anak pada manusia berlangsung relatif dalam masa yang sangat lama dibandingkan dengan masa anak-anak pada mahluk hidup lainnya. Banyak diantara mahluk hidup lainnya yang jarak antara masa anak dan dewasa berlangsung singkat bahkan hampir tidak terlihat perbedaannya selain dalam ukuran bentuk fisik sebagai mahluk kecil yang berbeda dari mahluk dewasa. Adapun dari segi psikisnya hampir-hampir menjalani seluruh pola kehidupan mahluk dewasanya didalam menyelenggarakan kehidupannya.

Pada manusia, hampir dalam segala hal terdapat perbedaan yang amat mendasar antara manusia kecil dan manusia dewasa. Bahkan ilmu keprilakuan modern beranggapan bahwa manusia kecil bukanlah miniature dari manusia dewasa. Anak-anak bukanlah orang dewasa dalam bentuk kecil, melainkan mahluk unik dengan karakteristiknya sendiri.

Masa anak-anak pada manusia berlangsung dalam jangka waktu lama, bertahun-tahun bahkan terlihat kecenderungan semakin panjang jangka waktunya dari jaman ke jaman dalam peradaban manusia. Pada manusia primitif atau tradisional proses inisiasi anak menjadi dewasa terjadi dalam usia kronologis yang jauh lebih muda dibanding manusia dewasa pada masa kehidupan modern dewasa ini. Masa anak-anak bahkan dianggap sebagai proses persiapan manusia memasuki alam kehidupannya sendiri yang dianggap baru terjadi pada saat manusia itu hidup sebagai orang dewasa.

Kalau disimak, persiapan hidup menjelang dewasa pada anak manusia itu berlangsung dalam suatu ruang interaksi antar individu dan antar person yang berlangsung terbatas yaitu ruang interaksi antar person dalam suatu lingkup sosial terbatas yakni anggota keluarga yang semakin modern menjadi semakin mengecil pula kualitasnya dari keluarga besar menjadi keluarga bati dan kemudian keluarga bati yang sekaligus kecil.

Dalam ruang lingkup keluarga, individu manusia kecil seakan di latih mempersiapkan menjalani kehidupan sosial dalam skala kecil untuk kelak pada waktunya diterjunkan dalam gelanggang kehidupan interaksi sosial yang jauh lebih besar. Dalam ilmu keprilakuan, memang kematangan dalam kemampuan melaksanakan interaksi sosial merupakan salah satu indikator penting dari nilai kepribadian seseorang untuk dapat dianggap manusia dewasa. Bahkan dalam Psikologi Kesehatan Mental, gangguan pada kemampuan interaksi sosial merupakan salah satu indikator menyolok dari kondisi gangguan psikis seseorang.

Kemampuan interaksi sosial tercermin dalam perilaku sosial seseorang dan merupakan bagian yang penting dari kepribadian setiap manusia. Bahkan seringkali perilaku sosial merupakan wahana untuk dapat memahami kepribadian seseorang. Perilaku sosial adalah:

- a. Perilaku seseorang yang terjadi karena kehadiran individu atau orang lain.
- b. Perilaku individu dalam kelompok.
- c. Perilaku yang terjadi dibawah kendali dan aturan sosial dimana individu bergabung.

Perilaku sosial sangat mencerminkan bagaimana individu harus mengekspresikan social drive yang dimilikinya sebagai manusia dalam suatu relasi inter personal yang menjadi ciri utama dari spesies manusia sebagai mahluk sosial. Dalam kehidupan manusia modern perilaku sosial ini kemudian berkembang menjadi semakin memperkuat identitas diri seseorang dalam hubungan interaktifnya dengan dunia lingkungan. Lingkungan sosial dan pergaulan antar manusia merupakan ajang pengekspresian individu manusia dalam menyelenggarakan kehidupannya, sehingga setiap manusia harus memiliki pengetahuan yang memadai untuk dapat mengekspresikan diri dan kepribadiannya secara adekuat dalam situasi sosial tersebut. Sebagaimana dijelaskan pada hal. 3, perilaku politik sebagai “participation by individual in a group decision making process”, dengan sendirinya adalah merupakan bagian dari perilaku sosial (yang pada hakekatnya merupakan pula bagian dari kepribadian seseorang). Dengan sendirinya perilaku politik adalah merupakan ekspresi kepribadian seseorang yang ditampilkan dalam aktifitas perilaku pada suatu situasi tertentu. (dalam hal ini : situasi politik). Suatu perilaku politik menyimpang, karenanya dapat merupakan ekspresi dari suatu kepribadian yang menyimpang maupun suatu akibat

pengaruh dari situasi aktifitas politik yang menyimpang atau suatu reaksi perilaku yang keliru terhadap suatu situasi politik tertentu.

Perilaku Sosial Dan Pengembangan Kepribadian

Dalam kehidupan peradaban manusia modern dewasa ini kepribadian dengan sendirinya merupakan totalitas individu yang terintegrasi menyatu sebagai perorangan dalam kehidupan bersama dengan perorangan-perorangan lainnya pada suatu komunitas antar individu.

Bagian dari kepribadian yang harus terdapat pada setiap individu agar memungkinkannya melakukan interaksi dengan lingkungan sosialnya disebut sebagai social factors (of pernality). Sumber kekuatan didalam kepribadian dalam bentuk tingkahlaku dalam hubungan dengan orang lain dan lingkungan sosialnya disebut sebagai perilaku sosial.

Dengan demikian tidaklah mengherankan bila banyak kalangan ahli ilmu keprilaku beranggapan bahwa perkembangan kepribadian seseorang dapat terjadi melalui perkembangan perilaku sosialnya. Hal ini dapat terjadi oleh karena perilaku sosial seseorang terbentuk melalui relasi antara individu dengan lingkungan sosial di luar dirinya. Bukan saja dalam bentuk dimana lingkungan sosial itu merupakan media target dari upaya pemenuhan dorongan yang terdapat didalam dirinya. Melainkan juga terjadi oleh karena lingkungan sosial cukup kuat untuk memberikan pengaruhnya terhadap terjadinya perubahan-perubahan didalam diri kepribadian individu.

Perilaku sosial memang dapat terbentuk melalui proses internalisasi dari nilai, aturan, norma, ketentuan, hukum, ethnics dlsb yang telah ditetapkan oleh lingkungan sosial dimana individu berada. Perilaku sebagai pria, ayah, pejabat, warganegara dlsb dari seseorang, dibentuk bahkan ditentukan oleh nilai-nilai yang telah ditetapkan oleh lingkungan sosial. Semakin teratur peradaban manusia, maka akan semakin jelas pula ketentuan tentang perilaku sosial yang harus ditampilkan dalam seseorang mengekspresikan diri dan kepribadiannya. Etika atau tata krama pergaulan memperjelas wujud perilaku yang mengandung nilai sopan dan atau tidak sopannya tingkahlaku seseorang dalam bergaul dengan orang lain, atasan, bawahan, orang tua, sejawat dlsb. Etika atau tata krama tersebut sangat ditentukan oleh lingkungan sosial dimana individu terlibat. Karena itu tata krama atau etika Inggris berbeda dengan tata krama Jepang; walaupun nilai-nilai evaluatifnya dapat bersifat universal dan global. Nilai sopan hampir selalu berlaku universal sebagai nilai baik, walaupun wujud tingkahlaku sopan menurut orang Inggris dapat berbeda dengan wujud tingkahlaku sopan menurut orang Jepang.

Bilamana nilai-nilai yang terdapat didalam lingkungan sosial tidak cukup kuat untuk dapat mengendalikan tingkahlaku individu dalam lingkungan sosialnya, maka tingkahlaku individu akan menjadi kacau dan terganggu. Sebab, salah satu kriteria penting dari suatu tingkahlaku normal pada individu akan menjadi hilang, tingkahlaku normal pada individu akan menjadi hilang, tidak berfungsi.

Sebaliknya, bilamana tingkahlaku individu mampu menyerap secara memadai nilai-nilai lingkungan sosialnya, maka tingkahlaku individu dalam lingkungannya akan menjadi "adjusted". Suatu ciri utama dari suatu tingkahlaku normal berkepribadian sehat.

Oleh karena itu merupakan kewajiban dari lingkungan sosial untuk memiliki nilai-nilai tertentu yang mengatur perilaku sosial dalam interaksi individu dengan lingkungan sosialnya. Merupakan kewajiban pula bagi individu untuk mempelajari aturan-aturan itu agar memudahkannya dalam mengekspresikan diri dan kepribadiannya dalam lingkungan sosial yang memang sangat dibutuhkannya itu.

Perilaku Sosial, Perilaku Politik, Dan Norma Hidup Negara Bangsa

Lingkungan sosial manusia adalah lingkungan hidup yang memfasilitasi agar aktifitas pengekspresian tingkahlaku hidup bersama-sama orang lain dapat terselenggara. Dalam perkembangan peradaban manusia, lingkungan sosial kehidupan manusia ini semakin tertata dan terorganisasikan, dengan tujuan agar proses penyelenggaraan kehidupan bersama manusia-manusia lainnya semakin baik dan semakin mampu memenuhi harapan penyelenggaraan kehidupan bersama-sama secara menyenangkan.

Bentuk penataan dan pengorganisasian lingkungan sosial hidup manusia itu berkembang bertahap dari pengelompokan terkecil keluarga, marga, kliente, tribe, puak, etnik dan seterusnya. Hingga mencapai bentuk penataan dan pengorganisasian kelompok manusia yang paling besar tetapi masih efektif mengendalikan nilai hidup bersama itu dalam bentuk negara-bangsa. Pada milenium II, bentuk negara-negara ini mengalami proses yang semakin menggejala sepanjang sejarah peradaban manusia.

Sebagai bentuk pengelompokan manusia terbesar yang efektif mengendalikan nilai-nilai perilaku sosial individu warga bangsa dan negara itu, dengan sendirinya perlu dilakukan sosialisasi efektif dari nilai-nilai yang dimiliki negara bangsa itu. Dengan cara demikian eksistensi negara bangsa itu akan ditunjang oleh individu warga bangsa yang meregenerasikan nilai hidup sosial negara bangsa melalui aktifitas perilaku sosial yang memelihara interaksi antar individu warga bangsa secara baik.

Bila nilai-nilai dalam perilaku sosial bangsa dan negara itu tidak efektif mengendalikan tingkahlaku sosial warga bangsa itu, maka tak pelak lagi situasi chaos dan anomie akan terjadi. Eksistensi bangsa dan negara dengan sendirinya akan terganggu.

Indonesia sebagai suatu negara bangsa yang baru muncul melalui Proklamasi 17 Agustus 1945 dengan didahului kebulatan tekad Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, menginginkan lahirnya suatu negara bangsa baru yang belum pernah dimiliki sebelumnya (bahkan oleh para nenek moyangnya). Pada mulanya berhasil menyusun dasar-dasar pola nilai tingkahlaku sosial (termasuk tingkahlaku politik) individu warga bangsa Indonesia itu. Tetapi dalam perkembangannya, dasar-dasar pada nilai itu hampir tidak pernah berhasil dilaksanakan oleh individu warga bangsanya. Dapat diramalkan bila hal itu terus berlanjut maka eksistensi negara bangsa Indonesia itu tentulah akan terancam karena chaos dan anomic yang bersumber dari terjadinya penyimpangan dalam perilaku sosial dan perilaku politik.

Sebagai suatu nilai baru yang walaupun dikembang tumbuhkan dari nilai-nilai yang diwarisi dari nenek moyangnya, tentu saja wujud konkrit dari amalan nilai sosial itu harus dibentuk sedikit demi sedikit secara ajeg. Bahwa wujud nilai dasarnya sudah berhasil dirumuskan dengan baik, haruslah dilihat sebagai pelita harapan yang harus

terus menerus dipelihara nyala apinya. Bukan sebentar-sebentar seakan ingin ditiup padam.

Dalam peradaban manusia modern dewasa ini wadah pendidikan dalam artian luas, formal, non-formal, dan informal adalah merupakan pranata sekaligus wahana yang paling menjanjikan untuk berlangsungnya sosialisasi nilai itu. Melalui pranata pendidikan, anak didik dibekali nilai perilaku sosial sehingga memungkinkannya mengembangkan wujud pengekspresian pribadi dan perilakunya. Melalui dialektika bekal dan praktek berperilaku sosial, maka nilai sosial maupun perilaku individu bangsa itu akan sekaligus pula berkembang.

Penutup

Perilaku sosial sebagai bagian dari kepribadian manusia akan memungkinkan kepribadian berkembang melalui interaksi yang berhasil dilakukan dengan orang lain dan lingkungan sosialnya.

Perilaku sosial sebagai wujud pengekspresian kepribadian seseorang hanya mungkin dilakukan bilamana terdapat nilai-nilai sosial dalam lingkungan hidup yang mengatur agar supaya pengekspresian perilaku sosial setiap orang dalam lingkungan hidup itu tidak menimbulkan gangguan, chaos dan anomic.

Perilaku sosial yang wajar adalah bilamana mampu menginternalisasi nilai-nilai sosial kedalam aktifitas keprilaku sebagai bagian dari kepribadian seseorang. Perilaku sosial seseorang berkembang sesuai dengan berkembangnya ruang lingkup lingkungan sosial dimana individu harus melakukan aktifitas keperilakuannya seperti : perilaku sosial dalam interaksi dengan anggota keluarga, dengan anggota masyarakat, dengan warga bangsa dan negara.

Sosialisasi nilai sosial yang membentuk perilaku sosial setiap orang dalam masing-masing lingkungan itu merupakan proses regenerasi nilai dan pengembangan nilai yang dapat menjamin eksistensi organisasi masing-masing lingkungan. Karenanya sosialisasi nilai lingkungan sosial harus dilakukan melalui cara-cara edukasi dalam pelebagaan yang terdapat pada masing-masing lingkungan sosial individu. Dengan demikian, perilaku sosial dalam hidup berbangsa dan bernegara harus dilakukan oleh pranata yang dimiliki oleh bangsa dan negara itu agar individu warga negara dapat melaksanakan tingkahlaku sosial yang sesuai dengan nilai sosialnya dan dapat mengembangkan serta menjamin eksistensi negara dan bangsa. Oleh karena cara-cara sosialisasi itu harus dilakukan melalui edukasi, maka pranata dalam organisasi negara bangsa yang tepat untuk melaksanakannya adalah lembaga-lembaga penyelenggara kegiatan pendidikan. Pembekalan nilai-nilai sosial yang dilakukan melalui lembaga pendidikan dalam organisasi bangsa itu harus dioperasionasikan secara simultan bersama-sama lembaga-lembaga lain terutama yang merupakan lembaga-lembaga dalam organisasi negara sebagai wahana pengaplikasian pelaksanaan tingkahlaku sosial yang sesuai dengan nilai-nilai sosial dalam lingkungan kehidupan negara bangsa itu.

IDEOLOGI, KONSTITUSI, DAN PERILAKU POLITIK MENYIMPANG PADA BANGSA DAN NEGARA INDONESIA

A.

Ideologi dan Konstitusi sebagai Sumber Perilaku Berpolitik Bangsa Indonesia dan Penyimpangannya

H. Hatta Albanik (Ed)

Banyaknya fenomena yang meresahkan masyarakat dewasa ini, seperti aksi pembakaran di masyarakat, baik terhadap oknum maling atau karena kekerasan masal, banyaknya partai yang satu sama lain saling menyalahkan, dan banyak menggunakan jalan-jalan yang sifatnya kekuasaan/kekuatan daripada membuat suatu pemecahan yang kondusif, menimbulkan pemikiran, bahwa “apakah kondisi politik yang terjadi di masyarakat Indonesia telah sedemikian parahnya sehingga dikatakan masyarakat Indonesia sedang sakit?”

Berdasarkan uraian yang dikemukakan sebelumnya bahwa perwujudan tingkah laku politik manusia tidak dapat terlepas dari penghayatan individu terhadap tingkah laku sehari-harinya (Hatta, 2000), maka dalam menganalisa kehidupan masyarakat di Indonesia, juga dapat ditelaah dinamika kepribadian yang sedang bergejolak di dalamnya.

Kehidupan berpolitik bangsa Indonesia tidak dapat dipisahkan dari interaksi antara faktor individu yang meliputi dinamika kepribadian yang bersangkutan dengan keadaan yang sedang terjadi di saat itu. Hal ini diambil dari suatu kajian psikologi sosial (kognitif) yang dikemukakan oleh Lewin, yaitu tingkah laku manusia didasarkan pada interaksi antara person dengan lingkungan. Pada unsur individu, yang perlu ditekankan adalah adanya kecenderungan pada tokoh-tokoh tertentu untuk mengalihkan suatu permasalahan pribadi ke dalam lingkup kerjanya, dalam hal ini adalah situasi politik. Pengkondisian di zaman Orde Baru dan pola asuh yang cenderung paternalistik, bukanlah tidak mungkin membentuk individu-individu dengan karakteristik kepribadian yang menyebabkan sangat sulit untuk mengendalikan massa, atau elit politik yang bertikai dengan melibatkan unsur kekuasaan atau kekuatan.

Dari segi lingkungan, terjadinya perubahan yang drastis dari kondisi masyarakat yang penuh tekanan pada zaman Presiden Suharto, menjadi kondisi yang jauh lebih bebas pasca pemerintahan Suharto menumbuhkan banyak gejolak di masyarakat. Hal ini ditunjukkan dengan perkembangan keberanian dan tuntutan berbicara hak individu, serta menyamakan hak setiap manusia di depan hukum dengan penekanan kepentingan demokrasi dan kebebasan di hampir setiap golongan dan daerah di Indonesia. Namun yang disayangkan adalah peningkatan kuantitas dalam

memenuhi kebutuhan tersebut, seperti meningkatnya jumlah partai, LSM, warga yang berdemonstrasi, massa yang semakin mengejar keadilan, kurang diimbangi oleh peningkatan kualitas. Yang dimaksud dengan peningkatan kualitas adalah mencoba semakin mengendalikan diri dalam mencapai maksudnya. Akibatnya, yang timbul adalah kebebasan dan media untuk menyampaikan aspirasi lebih berfungsi guna menumpahkan kekesalan hati daripada suatu ide yang konstruktif; saling tidak mau mendengarkan antara satu dengan yang lain. Kondisi-kondisi yang pada akhirnya malah menimbulkan konflik antara satu kelompok dengan kelompok lain.

Faktor-faktor *isogaria* (kesamaan berbicara), *isokratia* (kesamaan menggalang kekuatan politik), dan terutama *isonomia* (kesamaan hak di muka hukum) telah berkembang ke arah yang tidak sejalan dengan makna sesungguhnya. Masyarakat mengutamakan kebebasan tetapi tidak disertai dengan tanggung jawab untuk memperhatikan kebebasan dari orang lain. Banyaknya partai atau golongan yang timbul, malah semakin sibuk dengan pemikiran dan aspirasi dari golongan sendiri sehingga saling menyerang satu sama dengan yang lain. Kondisi pelaksanaan hukum menjadi beralih pada pengadilan massa dan melahirkan banyak tindakan agresif; banyak orang menuntut keadilan tetapi tidak disertai dengan kesigapan perwujudannya.

Kondisi-kondisi demikian akan semakin menjauhkan tujuan bernegara ideologi dan konstitusi yang telah dicanangkan sebelumnya. Oleh karena itu, sangatlah diperlukan sikap pengendalian diri di kalangan masyarakat dan elit pemerintahan dalam mewujudkan kehidupan politik yang kembali sejuk dan saling menghormati satu sama lain.

Ideologi: Pengertian dan Kedudukannya bagi Manusia

Membicarakan perkembangan suatu bangsa tidak akan dapat ditelaah dengan sempurna apabila kita tidak mengetahui pemahaman kebangsaan yang terkandung/tercantum dalam kelompok bangsa bersangkutan. Dikemukakan oleh Dusan (1996) bahwa perkembangan cinta pada pada bangsa yang ditumbuhkan pada individu berawal dari pengetahuan yang diberikan pada individu tersebut oleh bangsanya. Pengetahuan-pengetahuan tersebut akan membentuk kesadaran kebangsaan (nationality) pada yang bersangkutan, yang kemudian akan berkembang menjadi perasaan suka/tidak suka (nationalism) kepada bangsanya. Oleh karena itu, sebenarnya kunci utama dari memahami dan menganalisa kecintaan seseorang, yang ditunjukkan oleh sikap berbakti dan rela berkorban pada bangsanya, harus meninjau terlebih dahulu kesadaran kebangsaan apakah yang dimiliki oleh seseorang tersebut. Kesadaran kebangsaan tidak hanya meliputi pengetahuan fisik bangsa (wilayah, demografi, dll), simbol-simbol bangsa tetapi juga mengetahui perkembangan semangat dari ideologi yang dicantumkan oleh bangsanya.

Ideologi sebenarnya adalah suatu kumpulan ide (*idea/ideos*) yang diutarakan sejumlah orang dan berisi tentang tujuan dan cita-cita, yang kemudian akan mempersatukan mereka bersama dalam suatu pergerakan. Menurut Oetomo Oesman (1996), ideologi adalah suatu wawasan/pandangan hidup bangsa dan negara yang menentukan arah dan tujuan bersama, serta alasan untuk hidup bersama sebagai bangsa. Ideologi juga berisi sejumlah nilai yang menjadi pedoman dan pandangan hidup seluruh masyarakat bangsa yang bersangkutan sehari-hari. Dalam ideologi

(Oesman, 1996), terkandung tiga dimensi, yaitu tingkat realisasi ideologi di kehidupan sehari-hari, tingkat idealitas ideologi dan terakhir adalah fleksibilitas dalam hal pengembangan dan penyebaran ideologi di masyarakat.

Di Indonesia, sesuai dengan kesepakatan yang telah dilakukan oleh para pemikir dan pemimpin bangsa, maka ideologi yang dijadikan azas berperilaku kebangsaan adalah sila-sila dan pengamalan dari Pancasila. Masyarakat yang berbangsa Indonesia diharapkan mengamalkan dan mengembangkan nilai Pancasila dalam kehidupannya sehari-hari. Ciri khas dari Pancasila sebagai ideologi yang terbuka yaitu merupakan bagian dari roh di manusia Indonesia yang tumbuh dan berkembang mengikuti zaman dan pemikiran baru, dan merupakan milik bangsa yang paling hakiki. Oleh karena itu perlu dipertahankan. Hal ini sesuai pula dengan pendapat Affan Gaffar (1999) bahwa reformasi di Indonesia haruslah bertujuan melestarikan persatuan dan kesatuan bangsa yang antara lain tetap melestarikan Pancasila sebagai nilai bangsa.

Ideologi dalam diri manusia, berada pada tahapan pengetahuan yang berarti berkedudukan pada unsur kognitif manusia. Namun kedudukan ideologi juga sering dikatakan belief dalam manusia, tidak sama dengan informasi pengetahuan lainnya yang dapat dihapuskan atau diingat jika diperlukan. Menurut Powell, kedudukan ideologi adalah sama dengan values, yaitu berkaitan dengan nilai-nilai yang diinternalisasikan dan akhirnya membentuk karakter/sikap individu. Informasi ini tidak hanya semata berupa pengetahuan tetapi juga mengarahkan dan membimbing manusia dalam bertindak. Pada akhirnya, values akan membentuk sikap/sentimen tertentu pada kelompok/bangsa yang bersangkutan. Oleh karena sangat mendalam, maka perubahan ideologi seharusnya sangat sulit dan dapat memberikan dampak yang tidak terduga pada manusia, karena akan berarti merubah suatu unsur yang selama ini telah membimbing dan mengarahkannya bertingkah laku, baik disadari maupun tidak disadari.

Memperhatikan kondisi sekarang (Enoch, 2000) terdapat beberapa fenomena yang menarik. Pertama, sejalan dengan berkembangnya pemerintahan pasca-Suharto, maka tumbuh pula sejumlah ideologi yang muncul kemudian mempengaruhi masyarakat. Seolah-olah sejumlah kelompok tertentu menjadi bebas menyebarkan ideologinya setelah masa Orde Baru. Misalnya, pemikiran-pemikiran tentang negara islami atau kebangsaan agama lainnya, faham pemerataan kekayaan, terutama keadilan bagi rakyat miskin, walaupun belum tentu menjadi hak rakyat miskin, faham liberalisasi yang sejalan dengan maraknya budaya Barat. Kondisi masih ditambah dengan tumbuhnya sejumlah partai dengan sejumlah tujuan negara baru yang tidak sedikit bertentangan antara satu dengan yang lain. Fenomena kedua adalah penghapusan pengamalan pada Pancasila, dan perubahan UUD 1945 yang berarti perubahan paradigma dan kerangka berpikir di Indonesia. Fenomena ketiga adalah berkembangnya kondisi kebebasan berbicara dan bertindak, tetapi seringkali tidak menghargai kebebasan dan kemerdekaan dari orang lain, seperti demonstrasi yang pada akhirnya memacetkan jalanan, merusak barang-barang umum dan tidak sedikit yang membawa korban jiwa. Perilaku korupsi yang masih tampak dan banyaknya pengadilan massa yang berakhir pada pembakaran/pembunuhan massal sebagai dampak dari jalannya sistem pengadilan yang dipandang kurang terpercaya oleh masyarakat. Semua fenomena diatas, sebenarnya menunjukkan perilaku-perilaku yang tidak sesuai dengan ideologi yang selama ini dianut oleh bangsa Indonesia, yaitu

Pancasila. Tidak sedikit pihak yang menyalahkan masalah ideologi yang sudah tidak tepat lagi di Indonesia sehingga harus diganti oleh ideologi yang baru. Namun yang menjadi pertanyaan adalah apakah ideologi yang tidak tepat atau pengembangan ideologi yang perlu diperbaharui.

Satu uraian dari Affan Gaffar (1999) yang perlu diperhatikan yaitu perubahan dari setiap upaya reformasi yang dilakukan oleh bangsa Indonesia haruslah menjunjung tinggi persatuan bangsa Indonesia yang beraneka ragam, yang selama ini telah dipertahankan lebih dari 50 tahun. Oleh karena itu, keputusan radikal yang dikemukakan oleh satu kelompok tanpa memperhitungkan kehadiran kelompok lain di Indonesia tidak akan berjalan dengan baik karena akan selalu ada kelompok bangsa yang dirugikan. Dan yang perlu diingat keputusan ekstrim akan melahirkan tentangan keputusan ekstrim lainnya sehingga pada akhirnya pertentanganlah yang akan terjadi bukan penyelesaian. Tampaknya kondisi ini kurang diperhatikan oleh setiap pihak yang terkait dengan pemerintahan bangsa, termasuk rakyat sendiri yang menjadi penonton perkembangan bangsa, untuk bersikap lebih arif pada setiap pendapat atau usulan yang dikemukakan.

Menilik ideologi Pancasila, secara isi dan visi, sebenarnya, telah sesuai karena diambil dari setiap nilai-nilai yang ada pada semua kelompok di Indonesia, namun memang pada penyebarannya seringkali masih kurang fleksibel. Pengembangan nilai Pancasila lebih didasarkan pada pengetahuan formal mengenai sila, dan P-4 yang disertai konsekuensi apabila melanggar suatu unsur/sila, tapi kurang pada faktor pengembangan sikap, mengapa harus mengamalkan sila tertentu padahal unsur nilai sangat berkaitan dengan sikap. Kondisi ini yang mungkin mengesankan Pancasila hanya bersikap formal, kurang berguna dan tidak bisa mengikuti perkembangan zaman.

Dengan demikian:

- 1) Perkembangan ideologi adalah suatu yang vital dalam unsur manusia karena akan menyangkut pedoman hidup dalam memutuskan sesuatu, Terlebih lagi di Indonesia, kondisi masyarakat yang majemuk, terdiri dari sejumlah nilai yang sangat tidak mudah dipersatukan. Oleh karena itu, dalam memutuskan suatu reformasi dalam pandangan hidup Indonesia hendaknya memperhatikan juga perkembangan manusia di masa yang akan datang.
- 2) Ideologi Pancasila sebagai suatu isi bukanlah suatu ideologi yang keliru, namun sering kali pengembangannya tidak fleksibel sehingga dianggap tidak mengikuti zaman dan menguntungkan satu pihak saja. Sehingga yang diperlukan bagi bangsa Indonesia sekarang adalah mengembangkan cara penanaman nilai Pancasila yang baru, bukan merubah ideologi bangsa/undang-undang lainnya. Hal ini disebabkan yang diperlukan sekarang adalah sikap bukan pengetahuan baru, dan Pancasila telah membuktikan sebagai ideologi yang telah mempersatukan bangsa selama lebih dari 50 tahun, baik disadari maupun tidak disadari.
- 3) Sebagai tambahan, didapatkan sejumlah pengetahuan, yaitu:
 - a) Banyaknya tingkah laku menyimpang di masyarakat sebenarnya ditentukan oleh tingkah laku yang dipegang oleh budaya/ideologi setempat yang tidak boleh diubah-ubah.

- b) Tingkah laku menyimpang di kehidupan masyarakat sebenarnya merupakan periode yang menunjukkan ketidakmatangan di masyarakat sendiri dalam bertingkah laku dan mengendalikan diri. Standar dari pengendalian diri ditentukan oleh norma statistik.
- c) Dunia pendidikan, khususnya perguruan tinggi, berfungsi untuk menganalisa dan memberika pendidikan pada masyarakat terutama para elit politik, agar dapat menjadi teladan. Yang perlu dikembangkan terutama adalah pola pembimbingan dan pengasuhan dengan menggunakan penalaran tanpa kekerasan, serta menyeimbangkan disiplin dan demokrasi.

———— 0 ————

B.

**IDEOLOGI, KONSTITUSI DAN
PERILAKU POLITIK MENYIMPANG**

Transkripsi Audio Vidual

Ir. H. Akbar Tandjung, Ketua DPR-RI

Bagaimana perilaku politik ideal di negara kita?

Saya bicara sebagai seorang praktisi politik [dan] sebagai pimpinan partai politik besar. Jadi, tentu saja perilaku politik yang ideal tentu harusnya mematuhi berbagai aturan-aturan berkaitan dengan apa itu kehidupan politik, [yaitu] kehidupan politik disini: kehidupan demokrasi. Sudah barang tentu, kita harus mengikuti konstitusi dalam konteks kita, Indonesia. Kemudian mengikuti pula dan memahami peraturan perundang-undangan sebagai pelaksana daripada konstitusi, dan sebelumnya juga tentu kita harus mengetahui pula mengenai ketetapan-ketetapan peraturan (disahkan) oleh MPR itu. Pendekatan yang sifatnya pendekatan konstitusional. Dan kemudian yang penting juga, dari segi demokrasi kita harus mementingkan sisi demokratik kita, bagaimana proses pengambilan keputusan itu diambil. Itu semua merupakan tata cara di dalam melangsungkan kehidupan demokrasi. Kemudian juga, tentu dalam mematuhi etika-etika, norma, [dan] tentu saja prinsip-prinsip dasar, prinsip-prinsip hidup yang kita yakini, seperti nilai-nilai keagamaan, standar etika dan moralitas. Itupun akan kita temui dalam kita melaksanakan kehidupan politik kita, dan kemudian perilaku politik yang kita lakukan itu tentu tidak lain daripada upaya kita untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik, menciptakan kesejahteraan masyarakat. Dan semua hal tersebut dalam rangka mewujudkan cita-cita negara, cita-cita nasional. Saya kira itu menurut saya perilaku politik yang ideal.

Rambu-rambu dalam ideologi dan konstitusi kita

Konstitusi kita tetapkan untuk mengatur bagaimana kita mengelola kehidupan negara kita itu. Nah, konstitusi itu adalah sesuatu yang wujud dasar dan sekaligus menjadi koridor bagi kita didalam melakukan berbagai aktivitas dalam kehidupan politik yang berhubungan dengan kehidupan kenegaraan. Nah dalam konteks kita, yaitu kita sudah punya konstitusi, UUD 45. Maka, kita pun melihat konstitusi kita sebagai sesuatu yang dinamis, artinya konstitusi itu dimungkinkan untuk dilakukan perubahan atau amandemen. Kita pun juga melakukan itu. Amandemen pertama sudah kita lakukan pada Sidang Umum bulan Oktober kemarin. Dan kemudian pada bulan Agustus yang akan datang. Dalam sidang tahunan MPR yang akan datang kita pun akan melakukan amandemen yang kedua.

Kita melihat konstitusi itu sebagai sesuatu yang dinamis, dimana konstitusi itu harus menampung, mengakomodasikan perubahan-perubahan yang datang. Nah, itu kalau kita lihat dalam konteks kerangka konstitusi.

Nah, tentunya, ideologi pun, kita Pancasila. Kita punya ideologi dimana disitu terkandung lima prinsip nilai yang melandasi dalam kehidupan berbangsa dan

bernegara. Dan ideologi kita, ideologi yang dinamis pula. Kita sebut sebagai ideologi terbuka, artinya ideologi itu bukan sesuatu yang dogmatis. Ideologi yang terbuka memungkinkan ideologi untuk menyerap, mengakomodasi perubahan atau dinamika yang ada pada masyarakat. Jadi dengan demikian, kita mempunyai perangkat-perangkat penting dalam kehidupan berbangsa bernegara yang bisa kita jadikan landasan, sebagai dasar yang sifatnya dinamis dan terbuka. Bisa jadi, misalnya, masalah konstitusi. Dan konstitusi kita adalah konstitusi yang dinamis, dan ideologi kita adalah Pancasila, ideologi yang terbuka.

Apakah Amandemen UUD adalah indikasi konstitusi sebagai sumber penyimpangan perilaku politik selama ini

Justru kita harus menjadikan konstitusi itu sebagai landasan kita. Justru kita jangan sampai berpolitik itu menyimpang dari konstitusi. Kalau kita menyimpang dari konstitusi berarti kita bukanlah merupakan, katakanlah, pelaku-pelaku politik yang baik. Kita harus berada didalam koridor konstitusi itu. Nah, kalau ada penyimpangan berarti kita tidak sejalan dengan konstitusi. Bukan berarti konstitusi kita jadi berubah. Konstitusi tentu bisa kita ubah sesuai dengan tuntutan-tuntutan yang ada dari masyarakat. Nah perubahan konstitusi memang tidak akan dilakukan setiap saat atau setiap lima tahun. Ia akan berubah, tapi sesuatu perubahan yang dilandasi karena adanya kebutuhan-kebutuhan objektif. Kadang-kadang masyarakat mengalami perubahan-perubahan.

Jadi kalau dikaitkan dengan dengan soal penyimpangan-penyimpangan pada perilaku politik, memang perilaku politik atau penyimpangan dalam politik itu kita harus lihat juga di dalam beberapa pendekatan. Jadi, kan dari sosiologi kan juga ada perilaku yang menyimpang. Nah, kalau dalam bidang politik, tentu menyimpang dari mainstream. Mainstream kita di politik, [tentu saja] konstitusi. Kemudian berbagai produk dalam konteks kita MPR, undang-undang. Nah, kita harus tetap berpegang kepada produk-produk daripada berbagai kelembagaan.

Kemudian politik itu juga bisa dilihat dari segi seni. Dari berbagai kemungkinan, jadi the art of all possibilities. Nah, untuk menentukan bagaimana kita memandang politik dengan pendekatan seni dari berbagai kemungkinan, itu membutuhkan seni tersendiri. Mungkin untuk ini, kita agak sulit mempolakan politik dari segi pendekatan berbagai kemungkinan. Tapi kalau politik kita artikan dari segi mainstream konstitusi, bisa kita polakan. Jadi, kita juga ingin tentunya, berpolitik itu seolah ada untuk mengejar kekuasaan dengan segala cara. Nah, kita harus lihat politik itu juga, bahwa kekuasaan itu memang kita butuhkan, dimana melalui kekuasaan itu, kita bisa melaksanakan gagasan atau ide-ide yang kita miliki dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan kehidupan masyarakat atau dalam rangka mewujudkan cita-cita nasional kita. Tetapi tentu juga haruslah berpegang pada konstitusi. Jadi jangan menggunakan “tujuan menggunakan segala cara” atau the ends justify the means. Jadi kita tidak berpolitik dengan tujuan menghalalkan segala cara, seolah-olah tujuan itu menjadi segala-galanya, sehingga untuk mendapatkan tujuan itu, apa saja caranya akan kita lakukan. Nah, itu juga sesuatu yang tentu saja menyimpang daripada perilaku politik yang ideal, yang kita inginkan.

Perilaku Politik Komponen Legislatif seharusnya

Dalam kehidupan bernegara kita, komponen-komponen kenegaraan kita itu antara lain legislatif. Nah, tentunya idealnya adalah bilamana badan legislatif itu mampu melaksanakan dengan baik fungsi-fungsi yang dimiliki lembaga itu. Misalnya DPR fungsi pokoknya ada fungsi legislasi, fungsi pembuatan undang-undang; kemudian fungsi bujet, fungsi penetapan anggaran belanja negara, dan ketiga fungsi pengawasan, fungsi kontrol karena pengawasan terhadap eksekutif. Kenapa diperlukan pengawasan? Supaya kita ada keseimbangan, ada check and balance, antara eksekutif dan kita legislatif. Nah, oleh karena itu, hak-hak yang dimiliki oleh Dewan hendaknya bisa dipergunakan dengan baik, misalnya, DPR kita, adalah hak interpelasi. Hak itu bisa dipergunakan oleh Dewan untuk mengoptimalkan fungsi-fungsi yang dimiliki Dewan ini, bentuk ideal daripada kemampuan kenegaraan kita agar bisa berfungsi dengan baik, begitu pula eksekutif dan yudikatif. Eksekutif, pelaksana dari ketetapan MPR, undang-undang; apa yang kita inginkan untuk kesejahteraan rakyat. Kemudian yudikatif dalam rangka membentuk supremasi hukum, penghormatan terhadap HAM. Jadi, ketiga komponen itu hendaknya dapat menjalankan fungsinya dengan baik, seperti yang dibidang tentang DPR, tiga pokok itu yang harus dijalankan sebaik-baiknya.

Di DPR kita lihat bahwa anggota DPR kita itu berusaha untuk menggunakan hak-hak yang mereka miliki itu dengan sebaik-baiknya. Kita lihat dengan adanya hak interpelasi yang telah disetujui oleh dewan. Kemudian saya baru saja tadi siang menerima anggota-anggota DPR yang menyampaikan penggunaan hak angket. Itu juga dilakukan oleh dewan kita. Memang salah satu yang diharapkan masyarakat yaitu mengenai pembentukan undang-undang. Nah itu sekali lagi di dewan, bahwa banyak sekali beberapa pansus yang sedang membahas UU. Dengan demikian, nantinya dewan bisa menghasilkan undang-undang yang sejalan dengan apa yang menjadi keinginan daripada masyarakat. Jadi secara objektifnya, saya mengakui bahwa itu masih ada hal-hal yang perlu diperbaiki oleh para anggota dewan ini. Nah, itu sepertinya perlu adanya pengawasan dari masyarakat. Jadi masyarakat juga melaksanakan pengawasan terhadap kinerja dari dewan. Dengan demikian, terus menerus memperbaiki daripada kinerja.

Perilaku politik dari komponen bangsa lainnya

Kalau TNI, saya kira harusnya kita arahkan pada peningkatan kualitas dan profesionalisme mereka sebagai TNI, dalam rangka mempertahankan integritas NKRI. Karena itu, kita dorong TNI kita. Memang dalam pengalaman sejarah, TNI kita terlibat dalam bidang politik. Artinya, antara lain, kita lihat kedudukan TNI kita di DPR, banyaknya jabatan non-militer antara lain diduduki oleh TNI, dan juga keikutsertaan TNI dalam mengambil keputusan dalam berbagai isu yang berkaitan dengan kepentingan-kepentingan negara. Berkaitan dengan TNI ke depan, memang seyogyanya lebih mendorong TNI untuk meningkatkan profesionalisme, karena kita mengetahui, ke depan, tantangan yang kita hadapi akan semakin kompleks dan semakin luas, mengharuskan tentara kita sebagai kekuatan pertahanan nasional kita, memiliki kemampuan politik dan profesionalisme yang tinggi. Sehingga keterlibatan TNI diluar kegiatan yang sifatnya kenegaraan semakin berkurang, apalagi di bidang politik, misalnya duduk di DPR. Untuk lebih jauh ke depan, dapat dipastikan TNI sudah tidak duduk lagi di DPR. Tapi di MPR, perlu dipertimbangkan juga dimungkinkan TNI duduk, karena MPR itu menghasilkan produk-produk negara yang penting. Nah, TNI sebagai salah satu entitas yang kekuatannya kita andalkan,

sebaiknya juga bisa turut mengambil bagian di dalam memutuskan hal-hal yang sangat penting bagi kehidupan negara kita. Sehingga di MPR masih dimungkinkan TNI ada. Tetapi secara politik praktis, mereka tidak perlu ikut lagi, mereka lebih didorong kepada peningkatan profesionalisme sebagai kekuatan pertahanan.

Kemudian kalau pemuka-pemuka masyarakat, saya kira tugas mereka, kita harapkan mampu menjelaskan kepada masyarakat, hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan kita sebagai bangsa, misalnya, bagaimana pemuka masyarakat mampu menjelaskan bahwa kita ini adalah masyarakat yang majemuk. Tapi dengan kemajemukan itu tidak menghilangkan tekad kita untuk bersatu, bahwa kemajemukan itu kita lihat sebagai suatu kekuatan atau potensi. Bagaimana kita menjadikan kemajemukan itu sebagai suatu sinergi. Hal ini kita harapkan dari tokoh-tokoh masyarakat kita. Bagaimana kemajemukan itu tidak kita jadikan sebagai beban, sebagai suatu yang mengarah kepada disintegrasi, yang itu yang harus kita hindari. Tokoh-tokoh masyarakat harus mampu menjalankan peran untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat.

Kemudian pemuka-pemuka agama. Agama bagi kita penting karena kita memahami bahwa hidup kita ini punya arti. Tidak hanya untuk hidup di dunia, tapi juga setelah itu, hidup di akhirat. Jadi kita punya tujuan hidup bukan hanya di dunia tapi di akhirat. Dan daripada itu, agama menjadi sumber motivasi dan inspirasi bagi kita. Bagaimana nilai-nilai keagamaan menjadi faktor pendorong, faktor motivator bagi kita supaya kita memberikan yang terbaik untuk kepentingan bangsa dan negara. Yang kemudian perang pemuka agama, bagaimana nilai-nilai agama memberikan motivasi, memberikan dorongan. Nilai-nilai agama yang universal bisa memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa, dan bisa menjadi faktor pendorong untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara. Kemudian pemuka agama juga bisa menjelaskan bahwa kita, dari segi agama, agama-agama terbesar di dunia juga dianut oleh masyarakat kita. Justru agama itu jangan menjadi konflik; justru agama itu bisa menjadi dasar motivasi untuk mengabdikan dan kemudian bagaimana menciptakan kerukunan hidup antar umat beragama. Justru bukan agama membuat kita menjadi renggang. Justru agama itu harus bisa juga mendorong kita menciptakan suatu sinergi. Yang itu diharapkan dilakukan oleh pemuka-pemuka agama.

Tentu saya harapkan kita bisa menganalisis mengenai kehidupan politik kita sekarang ini, menganalisis hidup partai-partai politik, dan kemudian menganalisis kehidupan para politisi kita ini, dan menganalisis pula apa itu peranan daripada perwakilan-perwakilan rakyat. Terutama karena saya ada disitu. Dan bagaimana pula kita bisa melakukan pendidikan politik bagi rakyat, karena pendidikan politik bagi rakyat itu kan penting. Karena rakyat itu paham betul apa yang menjadi hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Rakyat itu pula harus paham bahwa mereka adalah kekuatan yang menentukan proses pengambilan keputusan yang penting dalam kehidupan bangsa dan negara kita, sehingga mereka menyadari betul hal itu berasal atau berada di tangan rakyat. Tetapi itu betul-betul dapat dipergunakan secara tanggung jawab. Oleh karena itu, rakyat perlu ditingkatkan kualitas dan kuantitas penguasaan daripada pengetahuan, tapi juga kualitasnya terhadap pemahamannya terhadap kehidupan bernegara kita. Dengan demikian mereka betul-betul mampu memberikan kontribusi didalam peningkatan kualitas kehidupan politik di negara kita.

C.

**PERILAKU POLITIK INDONESIA DAN PERANAN
PSIKOLOGI BAGI PENANGGULANGANNYA**

Traskripsi Audio Visual

G. Seto Harianto, Sekretaris Praksi PDKB DPR-RI

Manusia dan Perilaku Politik Menyimpang di Indonesia

Kami berangkat dari satu pemikiran dasar, kita menyatakannya sebagai prinsip Imago Dei, yaitu manusia diciptakan oleh Allah sebagai makhluk yang sempurna. Karena itu manusia diberikan hak-hak dasar yang kita sebut hak asasi, tetapi manusia diberikan kebebasan untuk menentukan pilihan-pilihan. Sebagai makhluk yang mulia, dia punya kebebasan berperilaku. Ia bisa memilih berperilaku baik atau buruk. Dalam kaitan kehidupan bermasyarakat manusia diciptakan sebagai makhluk pribadi dan juga makhluk sosial. Karena dia bebas memilih, dia bisa memilih mengutamakan kepentingan pribadi atau kepentingan sebagai makhluk sosial; sehingga selalu ada benturan. Dia punya hak dasar dan melaksanakannya dengan seharusnya memikirkan pada hak dasar orang lain. Itulah sebabnya maka kita berpikir selain hak asasi juga ada demokrasi. Artinya bagaimana dalam memperjuangkan hak-hak dasar itu, dia juga berdialog dan berbicara mencari solusi dengan makhluk lain di luar dirinya. Prinsipnya, manusia hidup dalam suatu lingkungan, maka bila kita berbicara perilaku tentu kita bertanya motivasi dia. Politik itu suatu cara untuk mewujudkan hak dan kewajibannya. Yang kita lihat kaitannya dengan tadi. Untuk apakah kita bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara itu? Lalu apa yang dia perjuangkan? Apakah yang dia lakukan itu sesuai dengan prinsip dia bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kemudian perilaku politik harus menegakkan HAM kita namun di dalam berperilaku dia harus menghargai pula hak asasi orang lain. Bersikap demokratis, harus menghargai orang lain bukan semata hal setuju atau tidak setuju. Meskipun tidak setuju tetapi ia harus menghargai. Untuk itu harus ada keterbukaan. Harus ada transparansi, jadi jangan berpolitik itu lain di muka lain di belakang. Sebetulnya sering kita dengar kalau politik itu kotor. Politikus senyum di depan, di belakang mendumel. Menurut kita secara ideal tidak boleh, harus transparan, katakan apa yang terjadi. Mungkin sebagai contoh mengapa PDKB tidak mendukung interpelasi yang diajukan karena kita melihat tidak ada kejujuran, alasan yang digunakan kita anggap terlalu sederhana, kepentingan dua menteri tetapi sebetulnya di balik itu mereka ingin menggoyang Presiden. Kenapa tidak langsung? Karena itu PDKB pada waktu itu menentang. Kenapa tidak sekaligus mengadakan interpelasi untuk mempertanyakan kinerja, untuk mempertanyakan kenapa ekonomi, bagaimana program ekonomi, kebijakannya, bagaimana soal hukum, termasuk bagaimana gaya kepemimpinan yang kontra produktif ini, kenapakah itu diinterpelasi? Padahal ini yang menurut kita tidak betul, perilaku politik yang begitu itu yang menurut kita dan yang berikutnya kriteria yang perlu diperhatikan adalah apakah kita berperilaku politik itu demi kepentingan bersama atau hanya untuk kepentingan kelompok, golongan, atau pribadi. Jadi kembali kepada tujuan bersama itu apa, nah, kalau itu dalam berpolitik tidak menjadi acuan, tidak menjadi kriteria dalam berpolitik maka itu menurut kita kurang benar.

Yang ideal seharusnya begitu. Dan yang terakhir adalah persoalan etika. Jadi perilaku itu harus etikal, artinya kita tidak boleh menghalalkan segala cara. Betapun mulianya tujuan itu tetapi cara itu harus diperhatikan, itu yang kita atau saya pikir penting di dalam membuat kriteria politik yang ideal.

Kesenjangan Perilaku Politik Menyimpang dan Ideal

Persoalan mendasarnya adalah ketidakmampuan para politisi elit negeri ini untuk memisahkan atau membuat jarak antara kepentingan pribadi dengan kepentingan masyarakat. Jadi sekarang ini, yang terjadi masih banyak elit politik yang lebih mementingkan kepentingan dirinya daripada kepentingan masyarakat. Yang sangat menyedihkan itu dilakukan atas nama masyarakat. Rakyat tidak sabar! Apa betul rakyat tidak sabar? Apa betul rakyat itu marah ketika Gus Dur itu bilang bahwa dia copot Yusuf Kalla dan Laksamana Sukardi karena KKN itu? Tidak juga kan, mungkin banyak yang malah tidak peduli. Ini yang menurut saya jadi pokok persoalan. Selama ini tidak bisa diselesaikan, siapapun yang jadi pemerintah tidak akan mampu, persoalannya hanya pada perebutan kepentingan yang menonjol, hingga kemudian kita lihat cita-cita reformasi yang bernotabene disponsori oleh mahasiswa pada akhirnya hanya merubah orang, sikap dan mentalnya tidak berubah. Ya kan dulu kita menuduh Suharto. Sekarang orang berlomba-lomba juga korupsi, kalau dulu anggota DPR dicap yes men, lima dekade karena takut kekuasaan sekarang apa dia lakukan juga betul untuk kepentingan rakyat? Jadi persoalan mendasarnya adalah bagaimana mengembalikan komitmen kita bahwa berpolitik itu demi kepentingan bangsa negara?

Perilaku Politik Eksekutif, Yudikatif dan Legislatif

Menurut saya nyaris sama. Yang terjadi sekarang, banyak unsur, aspek dari eksekutif hal yang sama terjadi. Kita hanya mengganti orang tanpa mengganti sikap mentalnya. Karena itu kita lihat saja contoh BPPN mau diganti berapa orang pun, persoalannya sikap mentalnya bagaimana, benar tidak? Demikian pula kalau kita lihat di departemen-departemen, hampir semua jajaran, persoalannya kita belum mampu merubah sikap mental. Yang saya khawatir bisa menjadi lebih parah karena yang dulu itu sudah kenyang, yang sekarang masih kelaparan. Jadi kalau korupsi itu, sudah kasar betul permainannya. Yudikatif itu sama saja. Dari dulu kita sebut KUHP: kasih uang habis perkara.

Perilaku Politik Masyarakat Pada Umumnya:

Kalau kita bicara perilaku politik pada masyarakat, kita harus kembali pada pendidikan. Harus meneliti kembali bagaimana pendidikan nasional kita termasuk pendidikan dalam masyarakat. Bagaimana kita bisa menolak dan mencegah anak-anak SMA tawuran kalau mereka melihat elit politik juga tawuran terus. Bagaimana pendidikan di sekolah kalau disiplin di sekolah-sekolah tidak bisa ditegakkan. Guru karena kurang gaji harus ngelesi, karena ngelesi wibawa jadi kurang. Nilai lima dikasih delapan karena les. Sikap mental tidak bisa berubah. Terlebih jauh lagi kalau kita bicara pendidikan yang lebih mendasar di rumah. Ayah ibu sibuk bekerja, anaknya kurang mendapat perhatian. Atau akhirnya mereka terimbas oleh budaya konsumerisme, materialistis. Orangtua cukup kalau anaknya cukup uang, cukup ini, cukup itu, dan lainnya. Tidak ada pendidikan moral etika yang mendasar. Jadi itu menurut saya harus dimulai dari sana. Sekarang tentu saya sangat menghargai apa itu yang disebut Forum Rembug Nasional, paling tidak Forum Rembug Nasional itu

menyatakan komitmen mereka sebagai pribadi-pribadi selain menuntut kepada pihak lain, pemerintah atau lain-lain. Kesadaran untuk mawas diri bahwa persoalan itu bukan persoalan pemerintah, bukan persoalan DPR saja, bukan persoalan MA, pengadilan, dan sebagainya. Tapi juga saya ada di dalam situ, betapapun kecilnya memberikan andil dalam ketertiban bangsa. Itu menurut saya patut diacungi jempol dan tinggal bagaimana kita melaksanakan itu. Kalau itu juga bisa bergema di kalangan mahasiswa, kalangan pelajar, itu sangat bagus.

Menurut saya, mereka juga korban dari situasi nasional semacam itu. Dari pendidikan yang tidak tertib, kurangnya pendidikan moral, sehingga banyak LSM pun tidak tahu mana yang benar, mana yang salah dalam pengertian moral. Banyak LSM pun yang akhirnya terjebak pada kegiatan yang juga sebenarnya demi kepentingan dirinya. Meskipun saya tidak mengatakan semua, tidak ada yang betul-betul murni, tapi sekarang banyak sekali. Apalagi dengan ikut campurnya dana luar negeri yang luar biasa, jadi sekarang LSM-LSM pesta pora. Pertanyaan kita apakah itu semua dia lakukan demi kepentingan bangsa, negara, atau tidak?

Menurut saya masing-masing kita harus mawas diri. Mengkaji kembali visi misinya, kemudian dikaitkan dengan sepak terjang perilaku politiknya. Apakah sudah benar visi misinya benar tidak demi kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Kemudian perilakunya bagaimana, sesuai apa belum. Itu kita tidak bisa menanyakan orang lain, masing-masing kita mawas diri. Karena itu menurut saya, kita semua punya salah, punya andil terhadap kesalahan ini.

Perlunya Peranan Psikologi

Bisakah dicari suatu metode psikologi sosial untuk menciptakan kesadaran masyarakat. Secara umum artinya mungkin bukan dengan shock therapy atau apalah. Tetapi bisa tidak melakukan aktifitas sebagai semacam cermin dimana semua pihak dapat bercermin, melihat, mendengar, membaca, menyentuh dirinya, merubah. Mungkin ilmu psikologi dapat diterapkan. Salah satu harapan saya, suatu ketika di Indonesia ilmu psikologi sosial itu betul-betul mampu merubah masyarakat. Sampai sekarang ini belum. Artinya, untuk kepentingan bangsa karena selama ini kan lebih banyak psikologi yang sifatnya lebih ke kepentingan pribadi atau individu, padahal bangsa ini membutuhkan penerapan ilmu-ilmu psikologi sosial untuk menata kembali, membangun kembali budaya dan nilai-nilai yang sempat diabaikan. Paling tidak kalau berbicara lebih keras, supaya bangsa ini berhenti dari kemunafikannya. Kita selalu bicara, orang selalu ribut kalau soal agama, tapi persis seperti yang dia lakukan adalah bertentangan dengan agama yang dia bela-bela itu.

Kesimpulan, kategori perilaku politik ideal:

- Bagaimana kita harus mementingkan kepentingan kelompok yang besar, masyarakat, dan bukan kepentingan pribadi, atau golongan.
- Sikap demokratis, yaitu mau menghargai, mau mengungkapkan pemikiran dan perasaan, tapi juga mau menghormati dan menghargai pemikiran dan perasaan orang lain walaupun berbeda.
- Bagaimana kita harus jujur dan transparan, artinya apa yang kita katakan, apa yang kita tetapkan sebagai visi dan misi harus sesuai dengan perilakunya juga.

Oleh: **M. Enoch Markum, Dr. Drs. Psi., Psikologi Sosial**
Direktur Program Pasca Sarjana Psikologi
Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Depok/Jakarta

Salah satu fenomena menarik dikaji sejak diturunkannya Presiden Suharto dari tampuk kekuasaannya tahun 1998 sampai saat ini adalah mudahnya dan meningkatnya frekuensi tindakan “main hakim sendiri” di kalangan masyarakat kita. Seolah-olah tindakan main hakim sendiri itu adalah perbuatan halal. Penjarahan tambak udang, perkebunan cokelat, hutan, dan lain-lain merupakan wujud tindakan main hakim sendiri. Demikian pula penyerbuan Kantor Polres oleh masyarakat, pengeroyokan, dan pembakaran penjahat kelas teri sampai meninggal merupakan contoh lain dari masyarakat main hakim sendiri. Sebaliknya, pihak aparat kepolisian pun juga melakukan tindakan main hakim sendiri, seperti perusakan Rumah Sakit Jakarta dalam rangka *sweeping* mahasiswa, penyerbuan terhadap salah satu kampus di Medan, dan lain-lain.

Dari berbagai kejadian main hakim sendiri itu dapat ditarik beberapa kesimpulan: (1) munculnya keberanian masyarakat melawan aparat keamanan dengan beringas, (2) menganggap main hakim sendiri yang umumnya diwujudkan dalam tindakan kekerasan kolektif (*collective violence*) itu sebagai satu-satunya cara paling ampuh menyelesaikan masalah, (3) memberikan sanksi atau vonis seberat-beratnya pada tersangka penjahat yang biasanya dibantai sampai babak belur dan diakhiri dengan pembakaran di muka umum, dan (4) tindakan main hakim sendiri itu berlangsung merata di seluruh wilayah Indonesia, dan (5) umumnya tidak ada sanksi hukum bagi mereka yang terlibat dalam tindakan main hakim sendiri itu.

Jika kesimpulan ini benar, maka tidak heran bila banyak yang beranggapan bahwa atribut ramah, suka menolong, gotong royong, dan damai tidak pantas lagi diemban masyarakat kita, dan lebih tepat menyandang sebutan masyarakat yang sakit. Benarkah masyarakat kita saat ini sedang sakit? Qodari (Tempo edisi 26 Juni – 2 Juli 2000) mengemukakan agar para pakar—yang memiliki kemampuan untuk mendiktekan pendapatnya pada khalayak—hendaknya berhati-hati dalam mengeluarkan hujjah dan fatwanya, khususnya mengenai masyarakat sakit ini. Oleh karena masyarakat kelas bawah yang sebenarnya mendambakan rasa adil dan rasa aman tidak dapat lagi mengandalkan atau mempercayai penyelesaian masalah kejahatan di tangan aparat kepolisian dan pengadilan. Dengan kata lain, tindakan masyarakat main hakim sendiri itu hanyalah akibat tidak berfungsinya sejumlah sistem yang seharusnya mampu menjamin perwujudan supremasi hukum. Maka yang sakit adalah sistem, bukan masyarakat. Sebab terbukti dengan sistem normal seperti di negara maju, masyarakat akan jauh dari pemikiran main hakim sendiri, lebih-lebih menyerang aparat kepolisian secara beringas.

Pendapat Qodari yang memperingatkan kaum elite untuk tidak secara mudah mengobral stigma: ini benar, ini salah dan masyarakat ini sehat, masyarakat itu sakit,

patut kita hargai. Namun, perlu segera dikemukakan catatan bahwa mudahnya warga masyarakat terseret dalam tindakan main hakim sendiri yang hampir selalu diikuti oleh tindakan kekerasan yang menelan korban jiwa tertuduh penjahat itu, bagaimanapun tergolong perilaku menyimpang atau abnormal. Bukankah manusia yang tak kuasa mengendalikan emosi, melihat dunia secara hitam atau putih, pribadi yang labil, mengambil jalan pintas, dan lebih dari itu semua hati nurani yang tidak bersuara lagi merupakan indikator yang cukup untuk menyatakan manusia Indonesia yang sakit?

Uraian mengenai gejala main hakim sendiri ini secara sengaja dikemukakan pada bagian awala makalah karena terdapat kesamaan antara apa yang dilakukan oleh kelompok masyarakat kelas bawah dengan tingkah laku kaum elite politik saat ini. Terlepas dari anggapan bahwa pemerintahan Suharto yang otoriter, sentralistik, serba seragam, dan bahkan meneror sebagai penyebab dari terpuruknya bangsa Indonesia saat ini, kenyataan menunjukkan bahwa kaum elite politik baik di tingkat pusat maupun daerah tidak henti-hentinya saling hujat, menyebar fitnah, melakukan *money politics*, mengutamakan kepentingan partai, dan mengabaikan kepentingan rakyat banyak. Dengan kata lain, mengapa nuansa unfair dalam percaturan politik (*political game*) di negara kita ini sangat kental? Dimana letak kesalahannya? Seperti halnya kita mempertanyakan kaum kelas bawah yang suka menggelar pengadilan massa, maka berkenaan dengan kehidupan politik pun wajar bila diajukan pertanyaan siapa yang salah: apakah kaum elite politik kita yang berperilaku politik menyimpang atau sistem politik kita yang kondusif bagi terjadinya perilaku politik yang menyimpang?

Untuk menjawab pertanyaan ini digunakan pisau analisis dari K. Lewin (1951)—seorang tokoh *field theory*—yang terkenal dengan rumusnya: $B = f(P,E)$. Meskipun bagi kita sekarang tampak dengan jelas bahwa tingkah laku (*behaviour*) individu—termasuk tingkah laku politik—merupakan hasil perpaduan antara individu (*person*) dan lingkungan (*environment*), namun sebelum pendapat Lewin ini terdapat dua tokoh yang berbeda pendiriannya dengan Lewin, yakni S. Freud (1856-1939), dan J.B. Watson (1878-1958). Sementara Freud (1905) sebagai tokoh aliran psikoanalisis sangat menekankan pada proses kejiwaan internal (naluri, dorongan, libido) sebagai determinan tingkah laku, Watson (1913) justru berpendapat bahwa faktor eksternal sebagai determinan tingkah laku individu. Demikian teguhnya pendirian Watson mengenai peran faktor eksternal atau lingkungan dalam membentuk manusia, sampai-sampai ia menyatakan (terjemahan bebas): “Berilah saya 12 bayi sehat, dan saya dapat menjadikan mereka seperti apa yang saya kehendaki: dokter, artis, bahkan pencuri atau pengemis sekalipun.” Dengan kata lain, Watson memandang manusia sebagai makhluk pasif yang dapat dibentuk seperti apapun yang kita kehendaki melalui proses pelaziman (*conditioning*). Sementara Lewin memandang manusia sebagai makhluk dinamis yang tingkah lakunya merupakan hasil interaksi yang dinamis antara individu (bawaan, kemampuan, aspirasi, motivasi) dan lingkungan (lingkungan fisik/alam, orang lain baik sebagai individu maupun kelompok, dan produk kebudayaan).

Marilah sekarang kita soroti bagaimana interaksi antara para pelaku politik (*person*) dan kultur politik (*environment*) yang berlaku saat ini di Indonesia.

Dibandingkan dengan zaman Orde Baru, maka kultur politik (*political culture*)—tiga azas demokrasi seperti yang dirumuskan sejak zaman Yunani kuno—pada era reformasi ini sudah terpenuhi. Ketiga azas demokrasi itu adalah: (1) *isogoria*: kesamaan hak untuk berbicara atau mengutarakan pendapat, (2) *isonomia*: kesamaan

hak di muka hukum, dan (3) *isokratia*: kesamaan hak untuk menggalang kekuatan/politik. Masalahnya adalah bagaimana perwujudan dari ketiga azas demokrasi itu dalam kehidupan politik kita?

Hak untuk menyatakan pendapat sangat jelas kita semua merasakannya. Di samping media massa yang amat luas jangkauan pemberitaannya dan kebebasan meliput atau menayangkan berbagai peristiwa, juga setiap lembaga, organisasi, dan kelompok—mulai dari ‘parlemen jalanan’ sampai DPR—dan orang perorang sebagai pribadi boleh mengutarakan pendapatnya secara leluasa. ‘Ini zaman eforia’, demikian ungkapan yang sering kita dengar. Namun disinilah masalahnya karena yang justru terjadi adalah saling menghujat, salah-menyalahkan, bongkar-membongkar, bahkan melontarkan fitnah pun dilakukan oleh kaum elite demi transparansi, keterbukaan, dan demokrasi. Barangkali hampir tidak ada satu forum pun baik yang sifatnya akademik maupun hiburan (*entertainment*) yang sebenarnya tidak lebih dari sekadar pelampiasan rasa marah, unek-unek, dan dendam yang membuat telinga menjadi merah. Bahkan seakan-akan semakin hebat hujatn, cacian, sarkasme, dan sinisme yang dilontarkan, semakin mendapat tempat dan sambutan tepuk tangan meriah dari khalayak. Padahal “liberalisasi individu maupun masyarakat tidak berarti hilangnya segala pembatasan sehingga menjelma anarki; dalam demokrasi kebebasan (*liberty*) dan ketertiban (*order*) adalah dua sisi dari keping yang sama” (Hassan, 2000). Dengan demikian, hak untuk menyampaikan pendapat (*isogoria*) yang saat ini kita saksikan menjadi amat merosot maknanya karena semata-mata hanya melampiaskan kebebasan, sementara ketertiban dianggap bukan bagian dari demokrasi. “Mana mungkin kebebasan berdampingan dengan ketertiban atau disiplin”, barangkali itulah yang dianut oleh masyarakat yang sedang ber-eforia saat ini.

Catatan lain terhadap perwujudan dari *isogoria* saat ini adalah penggunaan hak kebebasan mengemukakan pendapat secara tak terkendali, sehingga hak dan martabat manusia lain sebagai pribadi terabaikan. Dengan kata lain, kebebasan dimaksudkan demi kebebasan itu sendiri. Padahal pada setiap kebebasan itu inheren atau senantiasa melekat pertanyaan: kebebasan untuk apa? Untuk menghujatkah, mencaci-makikah, memermalukankah atau sekadar beda pendapat. Barangkali karena “kebebasan yang bertanggung jawab”—termasuk pers yang bertanggung jawab—merupakan produk Orde Baru, maka “tanggung jawab” sebagai sisi lain yang tak terpisahkan dari kebebasan sudah ditinggalkan orang banyak.

Bagaimana dengan kesamaan hak di depan hukum (*isonomia*)? *Isonomia* erat kaitannya dengan supremasi hukum yang sangat kita dambakan perwujudannya. Sejak digulingkannya Presiden Suharto sampai saat ini penjelmaan *isonomia* merupakan isu yang senantiasa diangkat dan tidak jelas ujung pangkalnya. Gelombang unjuk rasa ke Kejaksaan Agung, Komnas HAM, Jalan Cendana Jakarta Pusat, dan bahkan ke Istana Presiden serta pemanggilan pejabat dan mantan pejabat negara (sipil dan militer) oleh DPR menunjukkan betapa majemuk, sulit, dan belarut-larutnya penanganan masalah KKN. Demikian pula penanganan berbagai kasus tindak pidana—Tanjung Priok, Trisakti, Semanggi, Bank Bali, BI, Bulog, dan Pertamina—amat tidak memuaskan rakyat banyak dan entah kapan akan berakhir.

Sementara itu, di kalangan kelas bawah sudah ‘terlanjur menikmati’ tontonan pengadilan massa. Melalui proses pelaziman (*conditioning*) mereka telah menemukan metode yang paling tepat dalam rangka ikut serta menegakkan hukum dan keadilan.

Perhatikan kutipan dari majalah berita mingguan TEMPO berikut saat tersangka penjahat dibantai dan dibakar hangus oleh massa:

Saya sempat bertanya kepada seorang tukang batu yang kebetulan tinggal di Bekasi, di lokasi empat tersangka pencuri sepeda motor disiram bensin lalu disulut api, “Bensinnya dari mana, Mas?” “Emangnya beli?” “Siapa yang beli, Pak?” “Wong, warga rebutan *ngasih*,” jawabnya sambil tertawa. (Qodari, 2000:63)

Bagaimana tindakan aparat penegak hukum, khususnya polisi sebagai ujung tombak yang sehari-hari berhadapan dengan masyarakat di lapangan? Saat ini polisi berada di posisi yang sangat dilematis: bertindak (keras) salah dan tidak bertindak juga keliru. Penyebab dari sikap dilematis polisi itu adalah tudingan pelanggaran HAM dan terancamnya jiwa polisi sebagai akibat dari keberanian warga masyarakat melawan polisi secara beringas. Hal yang terakhir ini tidak lepas dari masih dipersepsikannya kepolisian sebagai bagian dari ABRI oleh masyarakat.

Dari uraian mengenai *isonomia* yang erat kaitannya dengan supremasi hukum diatas tidak berlebihan bila ditarik kesimpulan bahwa kondisi masyarakat kita saat ini berada dalam *anomie* (ejaan Inggris: *anomy*). Secara harfiah menurut bahasa Yunani *anomie* berarti tidak ada hukum (*a nomous*). Untuk lebih jelasnya berikut dikemukakan batasan mengenai *anomie*: “*Anomie is a state of society in which norms have lost their power to regulate behaviour*” (Knutson, 1973: 173). Dihubungkan dengan kinerja Presiden Abdurrahman Wahid, disamping masalah KKN, pemulihan ekonomi, dan kerusuhan di berbagai wilayah Indonesia, masalah penegakan hukum (*law enforcement*) merupakan pekerjaan rumah (PR) yang berat bagi pemerintahan Gus Dur. Berlarut-larutnya kondisi *anomie* akan berdampak pada merebaknya tindakan anarkis yang berkepanjangan, dan hal yang terakhir ini sudah terjadi saat ini dengan dampak serius terhadap kondisi ekonomi kita.

Mengenai *isokratia*—kesamaan hak untuk menggalang kekuatan (politik)—pada era reformasi terlihat sangat kontras dengan zaman Orde Baru. Bila pada zaman Orde Baru hanya ada tiga partai politik, pada era reformasi jumlah partai politik meningkat sangat drastis, yakni 48 partai dari yang semula 140-an partai pendaftar calon peserta pemilu 1999 saat itu. Demikian pula bila kita mengamati sejumlah mahasiswa yang melakukan unjuk rasa ke Kejaksaan Agung, Komnas HAM, DPR, dan lain-lain terbukti mereka dapat menghimpun diri secara leluasa meskipun tidak dapat digolongkan sebagai kelompok permanen (Forkot, Famred, dan Forbes). Pada era reformasi bermunculan juga berbagai organisasi yang mempunyai kepedulian terhadap masalah sosial, seperti Komnas Perempuan, ICW, dan KontraS. Menjamurnya berbagai lembaga dan kelompok mahasiswa yang dapat secara leluasa menyampaikan pendapatnya pada era reformasi ini merupakan angin segar. Oleh karena memang diperlukan partisipasi masyarakat yang lebih banyak, agar KKN, kronisme, pelecehan perempuan, kesewenangan ABRI, dan bentuk-bentuk penyimpangan lainnya yang terjadi pada masa Orde Baru tidak terulang lagi.

Khusus mengenai mendadaknya lonjakan jumlah partai politik di era reformasi boleh diasumsikan sebagai refleksi dari beragamnya aspirasi kelompok dan seluruhnya menginginkan tersalur melalui partai politik (Islam, nasionalis, buruh, cendekiawan, kaum muda, bahkan etnis Tionghoa yang sebelumnya tidak pernah

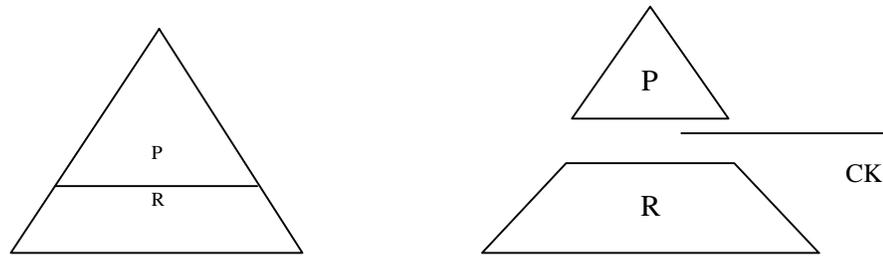
terpikirkan oleh kita). Singkatnya azas isokratis benar-benar tercermin dalam kehidupan politik kita saat ini. Meskipun demikian, marilah kita teliti lebih mendalam apakah kuantitas yang besar itu diikuti oleh kualitas yang memadai yang tolak ukurnya adalah sejauhmana aspirasi dan kepentingan rakyat banyak benar-benar diperjuangkan.

Mengamati seluruh partai politik yang ada, baik yang baru maupun yang sudah lama lahir, tampaknya masih disibukkan oleh pembenahan ke dalam tubuh partai dan memposisikan diri di luar tubuh partai dalam rangka percaturan (baca: persaingan) dengan partai-partai politik lain. Berkenaan dengan persaingan antar partai politik ini ada dua hal yang perlu dicatat.

Pertama, kecenderungan partai besar untuk menggunakan kekuatan (*force*) dan melakukan *money politics* (masih hipotesis) dalam rangka mempertahankan atau meraih kekuasaan (*power*). Perlu dicatat bahwa penggunaan kekuatan oleh elite politik tidak dengan sendirinya berakibat pada terjadinya tindak kekerasan (*violence*), sejauh masing-masing elite politik bisa menahan diri dan tidak mengandalkan diri pada kekuatan yang dimilikinya untuk memenangkan persetujuan politik. Namun, meminta elite politik untuk menahan diri dan tidak pamer kekuatan (*show of force*) justru tidak mudah. Sebab masyarakat Indonesia yang paternalistik dan warisan Orde Baru yang sudah mendarah-daging (*internalised*) yang tidak mungkin dicampakkan begitu saja mengajarkan: kekuasaan identik dengan kenyamanan, dihormati, dan fasilitas. Maka kekuatan sebagai alat untuk memapankan kekuasaan harus disemai atau dibudidayakan sebaik-baiknya.

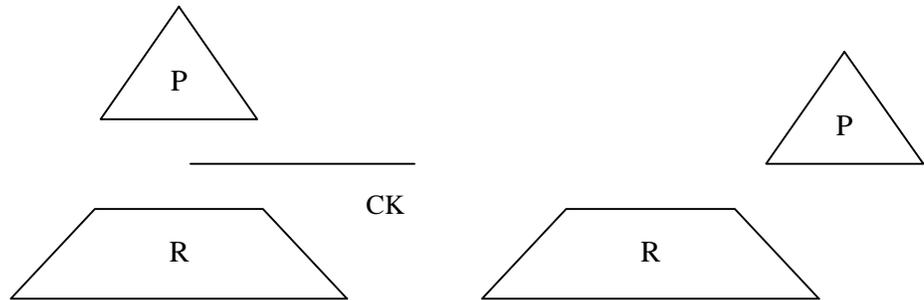
Kedua, persaingan antar partai politik dan konsolidasi intern tubuh partai yang didalamnya sering diwarnai oleh konflik antar elite politik ternyata telah menyedot banyak energi. Artinya, kepentingan yang tidak langsung berkaitan dengan partai atau elite politik seperti kepentingan negara, rakyat banyak, dan setidaknya-tidaknya para pemilih partainya telah dijauhkan dari agenda partai. Gejala ini tampak pada elite politik kita saat ini, seperti tidak ada kepekaan sosial (menaikkan gaji para eselon departemen dan fasilitas anggota DPR), tidak ada *sense of crises* (terus bertengkar dan sibuk memperebutkan posisi di departemen pemerintah, meskipun ekonomi makin terpuruk dan kurs rupiah makin merosot), tidak ada *sense of direction* (Orde Lama: terus menerus revolusi/mengusir nekolim; Orde Baru: stabilitas, dan “Orde” Reformasi: ekonomi? Politik? Atau hukum?). Kepentingan atau aspirasi rakyat banyak yang dalam kurun waktu cukup lama, diabaikan oleh kaum elite politik, sehingga rakyat merasa tidak terwakili lagi, dapat mengakibatkan terasing atau dasingkannya (*alienated*) pemimpin oleh rakyatnya. Dan semakin terasingnya rakyat dari pemimpinnya, semakin rawan bagi terjadinya pergantian pemimpin secara paksa.

Untuk lebih jelas mengenai proses terjadinya alienasi pemimpin dari rakyatnya dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Gambar 1

Gambar 2



Gambar 3

Gambar 4

Keterangan:

P = Pemimpin, R = Rakyat, CK = Celah Kesenjangan

Gambar 1: Pemimpin mampu menampung aspirasi rakyat

Gambar 2: Kesenjangan antara aspirasi pemimpin dan rakyat (sempit)

Gambar 3: Kesenjangan antara aspirasi pemimpin dan rakyat (lebar)

Gambar 4: Aspirasi rakyat berbeda dengan pemimpin (realisasi)

Dari uraian mengenai perwujudan azas demokrasi—*isogoria*, *isonomia*, dan *isokratia*—dalam kultur politik pada zaman reformasi, dapat disimpulkan: (1) dibandingkan dengan zaman Orde Baru, maka baik eksistensi maupun perwujudan dari ketiga azas demokrasi telah masuk percaturan politik, (2) ada kesenjangan antara ketiga azas demokrasi sebagai gagasan dengan penerapan-penerapannya sehari-hari, sehingga dalam percaturan politik ketiga azas demokrasi itu kehilangan maknanya yang sejati, dan (3) dibandingkan dengan *isogoria* dan *isokratia*, maka perwujudan *isonomia* dalam kehidupan politik sehari-hari sangat berbeda dari hakikat *isonomia* yang sesungguhnya.

Sejauh uraian mengenai kehidupan politik di era reformasi dipusatkan pada lingkungan politik dari para pelaku atau elite politik. Bagaimana dengan kondisi pelaku politik saat ini? Apakah perilaku politik mereka menyimpang? Sebelum menjawab pertanyaan ini perlu dikemukakan lebih dahulu pengertian menyimpang (*abnormal*) dan tidak menyimpang (*normal*).

Terdapat tiga pengertian mengenai normal atau tidaknya seseorang (Weiner, 1982), yaitu:

1. Normal atas dasar orang banyak: bila kebanyakan orang melakukan KKN, maka orang yang tidak melakukan KKN dianggap tidak normal.
2. Normal atas dasar idealisme: bila kebanyakan orang melakukan KKN, maka orang yang karena idealismenya tidak terseret KKN akan dianggap normal, dan orang yang melakukan KKN-lah yang dianggap tidak normal atau menyimpang.
3. Normal atas dasar kemampuan menyesuaikan diri: berbeda dengan normal atas dasar orang banyak, maka pengertian normal atau tidaknya individu ditentukan oleh sejauh mana ia dapat menyesuaikan diri, mengatasi masalah secara efektif, dan mampu memanfaatkan kesempatan dan tantangan secara baik.

Ketiga pengertian mengenai normalitas ini perlu diketengahkan karena dalam politik tidak jarang tokoh yang semula diagungkan dan dihormati bangsanya (F. Marcos, Syah Iran, Sukarno, Suharto, dan lain-lain) ternyata harus dihilangkan dari catatan sejarah bangsanya.

Bila kita kembali mencoba menjawab pertanyaan perilaku elite politik kita yang seluruhnya hidup di zaman Orde Baru dan sebagian besar diantaranya dibesarkan oleh Orde Baru, maka masalah alih mental (*mental switch*) dari Orde Baru ke era reformasi bukanlah hal yang mudah diatasi. Bahkan para elite politik yang pada masa lalu dipinggirkan atau anti Orde Baru pun ternyata tidak dapat sepenuhnya melepaskan diri dari KKN. Barangkali bukan semata-mata karena lingkungan membuka peluang, tetapi sangat boleh jadi pribadinya yang bermasalah ikut memberi sumbangan pula bagi larutnya para elite politik dalam KKN. Bila kita merujuk pada studi Laswell (1930, 1948) pemimpin politik, maka ia menyimpulkan bahwa pemimpin politik itu adalah individu yang mengalihkan konflik-konflik dalam dirinya ke dunia publik. Dengan kata lain, menurut Laswell, pemimpin politik memasuki gelanggang politik tidak lain untuk mengatasi kondisi neurotik yang dialaminya. Meskipun pendapat Laswell ini banyak yang menentang (Lane, 1959b; Kuntson, 1972a) dan bahkan Laswell sendiri (1951) merubah pendiriannya setelah mengamati pemimpin politik yang berhasil di lingkungan yang demokratis, namun bila mencermati kehidupan beberapa tokoh pemimpin politik di dunia (Hitler, Stalin, Polpot) barangkali sampai batas-batas tertentu pendapat Laswell ada benarnya. Apakah para elite politik kita juga mempunyai konflik-konflik intrapsikis di masa lalu yang tidak terselesaikan sehingga potensial untuk berperilaku politik menyimpang memerlukan studi tersendiri.

Catatan lain yang patut diketengahkan mengenai perilaku politik para elite politik kita adalah apa yang disebut sebagai sindrom kepiting (Muluk, 2000). Carr (dalam Muluk, 2000) mengemukakan bahwa sindrom kepiting ini adalah *motivational gravity* yang analog dengan gaya tarik bumi. Sejumlah kepiting yang disimpan dalam keranjang tidak ada yang bisa keluar karena bila ada seekor kepiting yang mencoba merayap pada dinding keranjang, segera akan ditarik oleh kepiting lainnya. Dihubungkan dengan kehidupan elite kita, maka siapa saja elite politik partai politik yang maju pasti akan dijegal oleh lawan politiknya. Dan inilah yang saat ini terjadi di kalangan elite politik kita. Dibubarkannya Konstituante oleh Presiden Sukarno pada

tahun 1959 karena masing-masing partai saat itu teguh pada pendiriannya tampaknya kembali terulang di panggung kehidupan politik kita saat ini.

Melihat kultur politik yang mengultuskan kekuatan (dan kekerasan) serta elite politik yang cenderung terasing dari rakyat banyak, maka apa yang harus dilakukan dalam prospek kehidupan bangsa-negara Indonesia memasuki Millennium III: membenahi sistem politik atau perilaku politik. Tentu saja antara sistem politik tidak dapat dipisahkan satu sama lain dan dua-duanya perlu dibenahi. Namun, harus diawali oleh kesadaran elite politik untuk benar-benar memperjuangkan kepentingan rakyat banyak dan masing-masing dan masing-masing menahan diri untuk menghindari penggunaan kekuatan, apalagi kekerasan, dalam meraih kekuasaan. Kehidupan politik yang sejuk, saling menghormati hak dan martabat masing-masing pihak amat didambakan oleh rakyat banyak saat ini.

Sebagai bagian akhir dari makalah ini diketengahkan kutipan dari buku *Emotional Intelligence* yang merupakan salah satu buku yang terlaris dan mengamparkan karangan Daniel Goleman (1995):

Siapa pun bisa marah—marah itu mudah. Tetapi marah pada orang yang tepat, dengan kadar yang sesuai, pada waktu yang tepat, demi tujuan yang benar, dan dengan cara yang baik—bukanlah hal yang mudah (Aristoteles, dalam Goleman, 1995:IX).

Inti dari ucapan Aristoteles diatas adalah: pengendalian diri. Semoga siapapun, terutama elite politik di negara kita sebagai pola panutan (pattern setters) menyadari dan menghayati serta mengamalkan pengendalian diri.

Jakarta, 15 Juli 2000

———— 0 ————

Diskusi :

1) Ernan FISIP jurusan Ilmu Pemerintahan, UNPAD.

- a) Dari pembicaraan pertama dan kedua, saya melihat istilah ‘menyimpang’. Saya pikir itu tidak tepat. Perilaku menyimpang, seolah-olah itu kalau saya terjemahkan dalam psikologi itu adalah juvenile political delinquency. Apa betul begitu? Kalau memang begitu, saya pikir ini keliru. Kenapa? Politik itu adalah masalah bersama, masalah hidup bermasyarakat, masalah bagaimana menciptakan goodlife atau good for mankind, kalau kata Aristoteles, Thomas Hobbes, John Locke. Jadi sebabnya itu apa? Barangkali untuk Indonesia, budaya politik tradisionalnya itu yang tidak berubah, jadi menciptakan sarana dan prasarana untuk hidup yang baik. Dalam arti budaya politik tradisional yang sifatnya otoriter. Akibatnya apa? Karena budayanya begitu yang ada, itu menjadi sekedar faktor-faktor. Jadi itu pertanyaan saya, mungkin keliru.
- b) Yang kedua, saya mengasosiasikan barangkali gerakan yang muncul dari apa? Oleh Bapak Enoch, Bapak Albanik itu diuraikan, lahirnya gerakan radikal, apa betul? Saya mohon suatu penjelasan bagaimana suatu masyarakat yang tertekan lalu menciptakan suatu collective violence. Maksudnya adalah sesuai dengan istilah gerakan radikal dalam ilmu politik itu merusak tatanan yang lama karena sudah tidak memberikan harapan. Lalu dengan menghancurkan semua itu, maka sudah didapat suatu image bahwa yang baru akan segera muncul dengan melupakan, yang lama. Keadaan collective violence itu memiliki sifat dan ciri-ciri kepribadiannya sendiri, sehingga tidak lagi mengenal budaya senyum. Jadi kalau Bapak Enoch tadi mengatakan harus dibuang budaya senyum itu, karena sudah tidak sesuai lagi barangkali bukan itu maksudnya. Budaya kita tetap budaya senyum tapi telah di-“conditioning” dalam 32 tahun, sehingga menjadi seperti itu.
- c) Dan yang ketiga, tentang isonomia itu saya pikir karena kasus-kasus yang muncul di Indonesia akibat Orde Baru, bahkan Orde Lama juga demikian. Saya pikir hukum itu tidak jalan. Nomoi itu omong kosong. Jadi dengan adanya kasus-kasus mafia peradilan, kemudian kasus seperti Sambas, Kalimantan Pontianak, politis tidak tegas, menghukum pencuri TV dari desa pribumi, kebetulan pencurinya itu dari suku tertentu, dilepas saja, sampai dilepas. Kemudian kasus Ambon, pemicunya, dengan pemicu itu tapi dengan gunung es dibawahnya, itu hukum yang tidak jalan. Saya kira itu akibatnya dan sudah menyebar bahkan sampai ke kampusnya. Dengan adanya ini, aturan pake-pake makalah orang lain diganti namanya jadi Doktor, gitu itu juga satu konsep kalau kita mau introspeksi jadi itu neurosis. Saya pikir itu perlu penjelasan.

- 2) Mahmud Majid, Forum Indonesia Bebas Korupsi. Topiknya sesungguhnya aktual sekali. Pertama, saya melihat yang disebut perilaku politik menyimpang itu sesungguhnya dibahas oleh Bapak Enoch dari tatanan teoritis, belum menyentuh kepada substansi permasalahan sesungguhnya. Bagaimana mungkin kita menyatakan perilaku politik menyimpang jika kita belum mempunyai pijakan, atau blue print mengenai perilaku seperti apa sebenarnya yang mustinya kita

jadikan reference. Perilaku politik berbangsa dan bernegara, artinya ada indikator-indikator yang merupakan batasan sehingga kita bisa menyimpulkan ini menyimpang dan tidak menyimpang, sehingga perilaku yang dibahas terkesan teoritis. Indikator-indikatornya tidak pada tahap implementif. Argumen dalam pemecahan politik kita belum berlangsung. Sebagai contoh saja, sesungguhnya saya berharap ketika pasca Habibie, pasca Pak Harto turun, itu Golkar, birokrasi, dan ABRI yang sebelumnya yang mendukung proses politik itu melakukan jeda politik pasca, tapi sayang sekali itu tidak dilakukan dan kembali interception kepada politik yang ada pada saat ini sehingga masyarakat tidak melakukan proses pencahayaan. Tidak ada suatu jeda. Tidak ada pula kejelasan mengapa sesungguhnya masyarakat kita ini memerlukan suatu jeda politik. Pada waktu Pak Habibie turun dan terjadi proses pemilu, proses Sidang Umum yang menaikkan Abdurrahman Wahid diharapkan menjadi starting point untuk kembali meletakkan kerangka pencerahan politik termasuk budaya politik dan seterusnya. Namun demikian saya melihat unsur-unsur status quo tetap eksis waktu itu karena memang kita belum memiliki platform perilaku politik sehingga unsur-unsur status quo masuk bersama dalam proses transisi. Akibatnya sampai sekarang dapat dilihat bahwa transisi politik di masyarakat tidak berlangsung, karena unsur-unsur status quo masih menjadi stimulus utama dalam perubahan transisi ini.

- 3) **Thersiah Lubis, Fakultas Psikologi UNPAD**, jurusan psikologi sosial. Saya berpendapat bahwa apa yang dibahas sebagai perilaku politik menyimpang, itu hanyalah suatu periode dari perkembangan politik masyarakat Indonesia. Yang masalah sekarang ialah kita belum sampai kepada tingkat kedewasaan berperilaku politik. Jadi yang tadinya masyarakat maupun elite politik itu berada pada situasi dibungkam, tidak boleh berbicara, tiba-tiba semua dibuka dan tidak ada kendali, karena memang mereka tidak terbiasa mengendalikan diri dari perilaku politiknya. Nah, kalau tadi bapak-bapak pendahulu, menyatakan bahwa pendidikan politik itu harus diberikan pada masyarakat, menurut saya, mungkin memang betul itu. Tapi harusnya, perguruan tinggi sebagai suatu instansi yang netral, disitulah muncul gagasan tentang pendidikan politik. Jadi kita di perguruan tinggi jangan hanya bergerak dari pembahasan-pembahasan yang sifatnya hanya menganalisis atau diskursus-diskursus yang memuaskan, kebutuhan pengetahuan mengenai gejala-gejala yang terjadi di masyarakat, tetapi juga turun pada apa yang harus dilakukan atau tindakan-tindakan mendidik masyarakat, terhadap dari elite politik hingga masyarakat kelas paling bawah, lapisan masyarakat paling bawah. Nah kalau masih kita bicara dalam pemikiran politik menyimpang, maka saya khawatir pada pembicaraan seperti apa perilaku politik normal dan itu akan sampai pada diskusi yang tidak akan pernah selesai.
- 4) **Muniroh Fakultas Psikologi UNPAD**. Saya tertarik oleh rangkuman pembicaraan tentang pengendalian diri. Kalau tadi bicara normal, kemudian juga dikemukakan bahwa akhir-akhir itu yang berkembang adalah pengertian normal dengan ukuran statistik. Lalu juga diberikan contoh tentang kalimat Jawa yang menyatakan bahwa “sekarang itu orang lebih banyak edan, karena kalau nggak edan, nggak kebagian”. Tetapi sebenarnya juga di ujung pernyataan itu, kalau kita kembali, ada juga pernyataan yang menyatakan juga sebaik-baiknya adalah mereka yang eling dan wospodo. Artinya, mereka yang sadar, bijaksanalah. Nah, saya melihat di dalam sadar dan bijaksana dalam mengatasi sesuatu itu yang ‘nggak muncul’ gitu. Apakah ini memang kesalahan kita bersama atau barangkali

apabila kita kembali juga dalam pendidikan dalam keluarga, menjadi hilang untuk membuat manusia jadi mampu berperilaku dengan bijak, budi pekerti yang lebih, yang bisa membuat diri dengan pengendalian diri yang lebih baik. Karena kita dari pihak pendidikan, mungkin pertanyaan saya, bagaimana membuat pendidikan yang mengembangkan pengendalian dengan mengembangkan sikap yang bijaksana dalam mengatasi suatu permasalahan, sehingga orang tidak lagi bergerak pada anggapan bahwa normal itu adalah 'ukuran kalau orang tidak baik, ya kita ikut tidak baik', tapi tidak ada yang berani berperilaku baik, meskipun dia menghadapi tantangan untuk dicemooh.

- 5) **Ariadi, masyarakat Bandung.** Apa yang dikatakan mengenai pendekatan kekuasaan, dan sebagainya yang juga dilakukan sekarang oleh masyarakat kita. Saya kira memang diajarkan begitu oleh pendahulu kita. Misalnya kita lihat zaman Bung Karno, kita memang diperkenalkan seperti itu, katakanlah, dengan revolusi, sedikit-sedikit revolusi. Masyarakat kita diajarkan seperti itu. Kemudian Pak Harto juga melanjutkan kekuasaan dengan pendekatan seperti itu juga; kekuatan, kekerasan yang dilakukan dengan ideologi stabilitas. Stabilitas yang diminta musti sabar, mengendalikan diri, itu rakyat, tapi mereka yang ada di kekuasaan tidak seperti itu, maka dengan demikian KKN itu sangat mulus melalui konsep stabilitas. ABRI juga politis, dengan senjata mereka juga begitu mengajar kita. Dengan kekerasan, dengan kekuasaan. Nah, kalau kita kritik sedikit, kita dianggap komunis. Ajaran-ajaran dari dulu sejak sekarang seperti itulah yang diterima oleh masyarakat, Nah, sekarang saatnya giliran masyarakat awam mencoba mempraktekkan itu, pada saat mungkin dianggap kekuasaan belum mantap, stabilitas belum mantap. Kita dengar para elite politik bicara apa saja saling menjewer, biang kerok. Itu adalah suatu wacana baru, yang wajar-wajar saja dalam wacana demokrasi. Persoalan bahwa dampaknya rakyat kemudian berkelahi, itu soal lain. Mereka barangkali begitu. Ada juga kelompok status quo yang menyatakan, yah jangan begitu, kita harus sopan, harus dengan bahasa yang bagus begitu. Kelompok yang anti status quo tentu tidak setuju. Karena itu sekarang, ada anggapan itulah demokrasi ada anggapan hal itu sah-sah saja karena peralihan mencari bentuk. Saya sepakat bahwa disamping orang/person, sistem ini yang harus dirubah, apalagi karena kita belajar dari negara-negara yang sudah maju. Pertanyaannya adalah sistem seperti apakah yang harus kita anut. Karena nilai-nilai kekuasaan, nilai-nilai kekerasan itu sudah diajarkan sedini mungkin, mendarah daging pada generasi yang sekarang. Karena yang saya lihat, yang mimpin sekarang ini kan masih Angkatan 45, sebagian, dan 66. Bersama-sama ABRI, Pak Harto memimpin bangsa ini dengan nilai-nilai begitu. Nah, jadi sistem apa seperti yang perlu kita terapkan sekarang untuk mengatasi persoalan bangsa sekarang. Terus yang kedua, apakah perilaku politik menyimpang itu sudah begitu? Dalam konteks membangun politik Indonesia, kalau salah dimana? Atau perilaku politik menyimpang itu memang tidak tepat? Adakah dampak perilaku politik menyimpang terhadap prospek kehidupan bangsa di milenium ketiga? Karena prospek kehidupan bangsa ini pun, banyak orang yang menyatakan agak pesimis terhadap prospek bangsa kita ini. Nah, karena apa? Gus Dur nggak punya platform yang jelas? Atau mainstream-nya yang tidak jelas?

Bahasan:

- (1) a. Pertama, Pak Ernan, dari FISIP, tadi menggunakan istilah juvenile political delinquency. Kami ini menggunakan perilaku menyimpang itu: 'deviant behaviour', Ada studi tersendiri tentang deviant behaviour. Yang jadi masalah, kita menggunakan yang mana? Kalau pada zaman Orba, yang tidak KKN itu yang tidak normal, "kamu ini, semua main komisi, kok, kamu enggak?" "kamu lurus-lurus saja, kamu tidak normal", karena yang dipegang adalah normalitas menurut statistik. Jadi kalau orang banyak melakukan hal yang sama, dan anda melakukan hal yang tidak sama, maka anda berperilaku menyimpang. Jadi ini yang mau dipegang yang mana?
- b. Lalu yang kedua, ya atas dasar idealisme. Jadi kalau idealnya seperti itu, kalau ada orang yang tidak mengikuti idealisme itulah yang menyimpang.
- c. Yang ketiga, yang klinis itu, secara efektif menggunakan, memanfaatkan kesempatan secara baik dan seterusnya. Jadi kita ini, menyimpang itu, tentu sebagai akademisi, kita ingin idealisme itu yang dipegang, apapun yang terjadi, dan itu adalah yang universal. Demokrasi, HAM itu adalah hal yang universal berlaku. Valuestyle paternalistik itu menganggap negara, kepala negara sebagai bapak. Anda ini anak-anak saya, saya ini father, anda anak-anak. Saya harus dipatuhi. Jadi paternalistik menganggap 'punya sendiri', informal (misalnya, anak-anak semua harus saya besarkan, anak-anak tidak usah ikut partisipasilah, biar saya yang cari uang, nanti anda dapat uang saku, dan sebagainya). Ini budaya paternalistik. Ini studi yang dilakukan oleh bagian psikologi sosial. Pada Pak Harto, barangkali ini ada budaya Jawa. Jadi anak-anak, lingkaran yang dekat harus dipelihara, harus dipola sebaik-baiknya, yang membesarkan anak-anak. Kemudian, kita ini reformasi atau revolusi? Saya melihatnya itu perlu menjadi revolusi? Bukan reformasi lagi. Kalau reformasi itu yang sudah ada kita perbaiki, sistemnya belum jalan, jangan merubah sistem. Bagian mana yang lemah, yang lemah barangkali SDM-nya, barangkali manajemennya, jadi sistemnya jangan diubah. Kalau reformasi ini A ini ada cacatnya, kita perbaiki ini. Tapi jangan dirubah jadi B, apalagi Z, gitu. Nah, ini kita kayaknya jadi B, jadi Z, ini kayaknya revolusi, ini yang harus kita mencermati.
- d. Mengenai isonomia, kasus Ambon, dan sebagainya saya mengatakan apa kita ini Anomie, Anomous, no law sama sekali? Kita ini apa? Ini salah, itu salah, begitu? Hukum apa yang berlaku? Tidak ada sense of direction. Kalau Orde Baru masih ada. Kalau kamu begini, saya tangkap, saya culik. Masih ada sense of direction. Masih ada yang dipegang walaupun salah. Sekarang ini, masyarakat kita dalam keadaan anomie. Marton juga mengatakan anomie adalah keadaan dimana power tidak dapat mengendalikan behaviour. Kekuasaan tidak dapat mengendalikan masyarakatnya. Kekuasaan tidak dapat

mengendalikan tingkah laku warganya? Polisi dilawan, bahkan tentara pun dicegat di Salemba, mobil tentara dibakar saja dan seterusnya. Jadi ini hukum apa kita ini? Kepada polisi tidak takut, polisi pun dalam keadaan dilematis. Pertama, jiwanya terancam kalau dia terlalu mengatur begitu tangkap-tangkap. Kalau tidak menangkap salah, kalau menangkap salah. Itu kan dilematis karena jiwanya terancam oleh massa yang beringas. Image polisi sebagai bagian dari ABRI itu belum bisa hilang sama sekali. Khusus mengenai Ambon dan seterusnya itu, setahu saya, sudah ada staf yang kesana dari Psikologi, sekarang sudah semakin kompleks karena bukan hanya masalah agama, tapi masuk unsur politik. Ada yang mau jadi gubernur, ada yang ingin jadi bupati. Satu pihak senang pada marinir, satu pihak senang pada Brimob. Jadi dua kelompok itu sudah susah sekali. Ada tentara yang berasal dari situ, tentu kalau dia beragama Kristen, dia akan memihak paling tidak dia akan menyatakan sesuatu. Ada tentara dari situ, bertugas di situ, agama saya Islam, rumah saya terbakar, tentu dia lepaslah baju tentara dia sekarang. Saya harus menjaga, ya harus menghantam yang membakar ini, begitu kan?. Jadi ini sudah sangat kompleks sekarang, makin kompleks. Makin kompleks untuk kita saja katanya. Unpati sudah rata dengan tanah. Sekarang ini, begitu ya?. Sekarang sudah betul-betul kehabisan akal, bagaimana? Sebab kalau menjaga dua kelompok yang sedang berkelahi kemudian membawa senjata apa satu kelompok yang mundur-mundur. Apa diberondong?. Karena tembakan peringatan sudah tidak takut lagi, terus aja masuk. Bahkan polisi pun, ada yang Brimob yang jadi korban. Tapi kalau menurut social identity theory. Bahwa setiap orang itu, barangkali ya biasa. Ada yang ekonomi, ada yang teknik, itu barangkali sudah biasa ya Pak. Tapi begitu merasa FISIP-nya ini tersinggung, bangkitlag FISIP-nya, gitu kan Pak, ya. Fakultas Ekonomi, fakultas Teknik dengan fakultas Sastra di Unas dulu itu, ya tidak apa-apa bergaul begitu. Nunjuk-nunjuk ke fakultas Sastra, 'penganggur-penganggur', sambil lari-lari OSPEK. Wah, tersinggunglah Sastra-nya, begitu yah. Satu, dua tahun dia tidak berani. Tahun ketiga, ia menyatakan, "hayo kita FISIP, Ekonomi, Hukum, kita berkumpul, kita serang aja Teknik." Nah, itu sudah mulai antara Teknik dengan non-Teknik. Jadi sudah mulai ada ingroup, outgroup. Kalau sudah ada ingroup-outgroup ada ingroup favouritism. Outgroup itu pasti lebih jelek, outgroup itu kasar, outgroup itu kotor. Nah, sudah mulai stereotipe seperti itu. Terjadilah, emang orang Kristen begitu, oh emang orang Islam itu begitu. Tadinya bersahabat, tidak ada masalah, bahkan mungkin dengan pulau disana tidak kenal. Tapi begitu dikelompokkan, anda orang Islam, anda orang Kristen, maka pengelompokkan Islam-Kristen ini menjadi penting. Yang semula tidak penting, kita bermasyarakat biasa saja berteman, tapi begitu di kelompok ini, "eh, ada masjid yang dibakar, ada gereja..." nah, mulailah timbullah, kalau mau diterangkan.

- (2) a. Ada pengertian barangkali, saya ini bicara teori saja. Wah, ini teoritis. Bagi saya, teori itu dari praktek. Jadi setelah melihat praktek-praktek, dari empirik berbagai lapangan, praktek segala macam, disimpulkan

teorinya. Lalu menjadi dalil, lalu menjadi teori. Jadi, teori itu tidak bisa lepas dari praktek. Sebetulnya teori itu diperoleh karena kita melihat berbagai praktek. Negara yang berhasil itu, coba lihat Singapore, coba lihat, negara Belanda, negara kecil-kecil, tidak punya sumber daya alam, tidak punya sumber daya alam. Kalau begitu SDM. Itu dari praktek, dari empirik, dari pengalaman diteliti. Negara-negara kecil dengan penghasilan demikian, coba kita bandingkan, ada nggak sumber daya alamnya. Taiwan, nggak ada. Singapore, nggak ada. Three little dragon. Ini nggak punya sumber daya alam, kalau begitu SDM-nya. Jadilah teori. Kalau akan maju, itu, penerapannya, SDM harus kita benahi, begitu.

- b. Diatas ini elite politik yang harus sadar, harus sama persepsinya bahwa kepentingan rakyat diatas segalanya. Gejala etnosentrisme Riau mau pecah, kemudian Papua, Aceh, dan seterusnya. Itu umumnya. Kalau yang kaya-kaya, peduli amat dengan yang lain. Kalau yang kaya berani, ia pecah memisahkan diri, jadi separatis. Coba, tidak ada kekayaan. Ini karena dulu pembagian keuangan tidak beres dan seterusnya. Jadi mungkin yang harus dilakukan sekali lagi, bagaimana pola panutan itu harus mulai dalam keadaan memberikan suasana politik yang sejuk. Istilah jower, bagaimana secara baik. Apakah pemimpin itu perlu dilatih asertif, Assertive training. Jadi kalau saya nonton bioskop, terus disini, ada yang terus-terus bergerak kepalanya, lebih tinggi daripada saya, kan ada tiga hal yang bisa dilakukan. Jitak kepalanya, saya OK, dia tidak OK. I'm OK, he's not OK. Atau saya diam saja, dia OK, saya tidak OK. Bagaimana jika win-win solution, you OK, I'm OK, I'm OK, you OK, gitu kan "mas maaf..." tapi kalau, wah, ini gerak terus... jitak dia yang marah. Saya yang OK, dia tidak. Kalau saya diam, saya yang jadi korban apakah assertive training ini perlu disosialisasikan?. Bicara yang sopan, kembali lagi ke hal-hal yang mendasar, dengan silakan kritik, silakan menyampaikan pendapat karena itulah yang menyebabkan kita maju.
 - c. Kemudian, saya kurang paham, maksudnya, wacana politik kurang berlangsung. Menurut saya, sudah berlangsung. Politik itu kan membicarakan kekuasaan, pengaruh mempengaruhi. Jadi, misalnya, kekuasaan kalau yang ini naik, bagaimana. Kalau yang itu? Membicarakan kekuasaan ini politik sebetulnya. Jadi sekarang pendidikan politik dalam psikologi, ada yang disebut-sebut latent learning. Jadi belajar secara tidak terbuka, seperti dalam kelas. Bisa juga. Hanya mengamati, mengobservasi lalu dia belajar suatu, memperoleh pelajaran. Nah, pelajaran apa yang diperoleh saat ini? Saya mengatakan pelajaran yang dianut, bahkan dipraktekkan, bahwa yang besar dan banyak itu yang menang, itu yang berhasil. Kalau kecil demonstrasi hanya lima orang, hanya spanduk, nggak akan didengar. Tapi harus tidur disitu, pasang tenda, gitu. Satu minggu pasang tenda, nanti DPR, surat kabar masuk, baru mendapat perhatian.
- (3) a. Ini merupakan scientific curiosity, lalu nanti kalau sampai sini, kapan ini, apa kita bisa menyelesaikan? Jadi memang ilmu ini kan ada yang

scientific curiosity, ada yang terapan, yang problem solving. Ini problem solving atau tidak? Menurut saya yang harus dilakukan di negara kita yang seperti ini pattern centersnya, panutan itulah yang harus berubah. Jadi kalau saya menanyakan sistem atau orang, saya akan menyatakan orang. Orang semua sudah bejat, adakah orang-orang yang masih baik? Mestinya ada. Bisakah kita mengangkat orang-orang itu menjadi panutan? Mulai dari suatu yang kecil. Sistem ini tergantung bagaimana pelakunya. Jadi kalau yang saya ingin sampaikan bahwa yang harus berubah itu elite politiknya dahulu, pattern centers. Elite politik ini, jangan lupa, mempunyai pengikut. Kalau disitunya kisruh, di bawah pun berkelahi. Barisan ini dengan barisan ini, barisan ini siap dengan barisan ini.

- (4). a. Apa yang harus dilakukan dalam pendidikan? Saya bukan penganut EQ, EQ itu kan melihat bahwa mengapa orang yang IQnya tinggi tidak berhasil, sedangkan ada orang yang IQnya rata-rata berhasil. Lalu dari pengalaman diteliti macam-macam itu akhirnya, disimpulkan, oh yang IQnya rata-rata berhasil itu karena dia mampu mengendalikan emosinya. Itu kan mulainya eksperimen anak kecil yang dapat kue sekarang, dapat sekarang tapi nanti konsekuensinya negatif. Tidak makan kue sekarang, tapi nanti pada masa yang akan datang akan bisa lebih berhasil. Nah, orang-orang yang memilih, saya tidak akan makan kue sekarang, saya akan simpan nanti, diteliti terus. Ternyata itulah yang berhasil meskipun IQnya rata-rata. Nah, saya melihat bila ditanyakan pendidikan pola asuh ini, pola asuh yang harus dilakukan pada anak didik kita adalah pola asuh yang memberikan reasoning/penalaran. Eh, jangan nonton TV gitu ya, belajar ini... tapi filmnya baik, Pa... apa kamu berani? Centil! Itulah yang menggunakan power. Jadi power assertion. Pendidikan seharusnya memberikan reasoning. Apa sih alasannya kita nggak boleh nonton? Apa sih, kamu kan harus belajar, kalau sekarang kamu nonton, nanti...? Tapi kalau sekarang saya sampai selesai nonton dulu boleh nggak? Sampai jam berapa ini?... Sampai jam 08.30, setelah itu kamu janji mau belajar? Ya. Jadi tidak benar bahwa disiplin tidak bisa berdampingan dengan demokrasi. Jadi disiplin berdemokrasi itu malah harus berdampingan. Memberikan keleluasaan pada orang itu, tapi tetap ada target, ada disiplin. Kamu jam 09.00 harus tidur. Ditanya; kenapa? Kalau hari ini tidak tidur jam 09.00 boleh tidak? Kenapa tidak tidur jam 09.00... terus. Jadi demokrasi dan disiplin itu harus berdampingan.
- b. Sekarang kita dihadapkan pada pilihan. Kita ini mau main keras, atau kita permisif saja. Kalau kita lihat Lee Kuan Yew. Siapa yang ke Singapore tahun 1960an menemukan, Singapore itu betul-betul bau, karena kota pelabuhan. Sekarang itu sudah sangat bersih dan maju. Kemajuannya sangat luar biasa. Itu karena tangan besinya Lee Kuan Yew. Apakah kita itu mau permisif. Silakan. Atau kita mau dengan, dengan kekerasan. Jadi saya mau mengulangi bahwa demokrasi itu, itu liberty dan order itu berdampingan. Dua sisi dari satu keping. Ada kebebasan, tapi ada ketertiban. Tidak mungkin kebebasan tidak diikuti

oleh tanggung jawab. Jadi kalau menurut reasoning, harus diberikan dalam pendidikan kita, kalau kita ingin mendidik masyarakat yang demokratis dan beranggapan dari rumah mulainya. Maka rumah itu harus memberikan kesempatan dan harus memberikan reasoning, mengapa ini tidak boleh. Kamu jangan godain adik kamu kalau nggak saya pukul kamu. Ini, suatu power assertion, menyodorkan power, menggunakan power. Tapi coba, kalau kamu seperti itu, sakit atau tidak. Kamu sendiri mau nggak sakit begitu. Kamu mau nggak digoda kalau orang lain menggoda. Jadi terus ada dialog yang terus menerus. Itu di level rumah tangga. Barangkali level negara pun harus seperti ini, sehingga menyebabkan ada partisipasi.

- c. Helbert Kellman menyatakan suatu pembaharuan ini ada tiga nilai prosesnya. Pertama, menyatakan apa yang disebut selalu patuh saja (compliance). Lampu merah, kenapa berhenti? Lampu sudah merah itu, berhenti sana. Sudah. Kalau tidak berhenti kenapa? Kalau tidak berhenti ada power nanti. Pownya siapa? Kamu kena tilang, diperas polisi, dan lain-lain. Itu mesti patuhnya karena takut, dan harus ada polisinya. Kalau nggak ada polisi, dia akan terus. Yang kedua, identifikasi. Karena lihat Pak Rektor kalau lampu merah berhenti, saya kagum pada Pak Rektor, jadi berhenti juga. Itu identifikasi. Tapi suatu saat lihat Pak Rektor, kok lampu merah terus. Wah, nggak bener nih, Pak Rektor, nih. Saya juga jadi kacau kalau pola panutan idola saya tidak seperti itu. Yang ketiga, internalisasi. Memang melalui reasoning diketahui sebab mengapa. Oh, kalau lampu merah, saya berhenti karena kalau tidak berhenti mencelakakan orang lain, gitu. Coba bayangkan kalau saudara kita sendiri, istri kita sendiri celaka karena lampu merah begitu. Yah, jadi reasoningnya. Hidup dalam masyarakat itu harus tertib. Ini yang harus terjadi dalam rumah tangga.
- (5) a. Sekarang sistem apa yang kita anut? Sekali lagi, kita sekarang, harus berhadapan dengan pilihan apakah kita mau model Ali Sadikin untuk supaya Jakarta tertib? Tapi persyaratannya clean government, Lee Kuan Yew, itu clean government. Kalau dia sendiri korupsi, dia sendiri anaknya masuk, dan sebagainya, kan jadi wibawa ini. Inilah barangkali apa yang disebut dengan krisis kewibawaan. Kalau orang yang tidak dihormati atau tidak punya wibawa bagaimana bisa? Eh, kamu jangan merokok. Bapak juga merokok kok melarang-larang saya? Eh sholat subuh. Papa juga subuhnya jam tujuh, kok. Jadi krisis kewibawaan ini yang berakibat sangat besar pada masyarakat kita. Kalau menurut saya, pilihannya barangkali, sudah tiba saatnya pada batas-batas tertentu memang harus kembali kepada clean government sekarang ini. Menteri ini dipertanyakan. Wah, ini cacat-cacatnya. Jadi kalau mau dianut sistem apa yang dianut, kalau menurut saya, kita harus menghindari kembali label-label yang kita beri pada waktu lalu. Ngaco sedikit, komunis. Ngaco sedikit, mengganggu stabilitas. Apakah sekarang juga di HAM kalau situ akan kita gunakan, melanggar HAM, melanggar demokrasi. Jadi ini label-label yang paling mudah. Masyarakat kita malas nih. Masyarakat kita malas untuk lebih dalam mencari pengetahuannya. HAM itu apa sih? HAM

itu dibalik itu ada kewajiban juga. Karena pakai hak, bukan haknya itu saja yang dipakai.

- b. Barangkali saya bisa menyampaikan hasil penelitian yang dimuat di koran dengan akibat yang besar. Saya sering sampaikan ini, dua dari pria di kota besar itu. Dua dari pria di kota besar, laki-laki di kota besar punya 'simpenan'. Wah, hasil itu lalu dijadikan seminar, dijadikan wawancara. Wah, laku sekali itu. Sebetulnya, kalau kita lihat subjeknya siapa? Yang mungkin yang disubyek itu yang di disko-disko barangkali. Yah, kalau ke kampus barangkali itu salah sama sekali. Tapi kalau ke disko benar, itu kan. Jadi tidak pernah meneliti lagi dimana penelitiannya, metodanya apa. Jadi kita ini malas. Lain kalau dua dari responden yang diteliti, itu lain lagi. Kan ada syaratnya untuk generalisasi. Random sampling, non-random sampling. Kalau hanya di disko, mau digeneralisasi orang yang di pesantren, orang yang siang malam zakatnya besar, kebayangkan?. Jadi sampelnya barangkali tidak representatif. Tapi itu dijadikan komoditi yang ramai, di hotel-hotel. Wawancara sana, sini, sana. Dan saya nggak tahu, ibu-ibu jadi takut atau tidak dengan hasil penelitian itu. Ini ilmiah lho. UI yang melakukan. Udah percaya aja. Padahal di kalangan ilmu kita, harus setiap saat skeptis. Bener nggak metodanya?. Poolingnya di kampus itu betul? Apakah metodanya pakai telpon itu sudah betul? Berapa? Tapi saya sudah mengatakan dengan signifikan 0,05. Jadi kemungkinan salahnya kecil. Kita percaya. Jadi ini sebenarnya orang perguruan tinggi harus lebih kritis untuk melihat segala fenomena yang ada.

—— 0 ——

Bab III

MOTIVASI CINTA BANGSA DAN PERILAKU POLITIK MENYIMPANG PADA BANGSA DAN NEGARA INDONESIA

A. **Nasionalisme Indonesia Dalam Perspektif Milenium III**

ARIA ARYANA SIREGAR, S.Psi.,Psi.
Fakultas Psikologi Universitas Padjadjaran Bandung

Perkembangan politik kebangsaan Indonesia tidak pernah lepas dari kemelut konflik berkepanjangan, antara masyarakat dengan pemerintah, maupun diantara kalangan pemerintahan sendiri. Kesenjangan sosial, masalah SARA atau perbedaan opini dapat dengan mudah menjadikan pemicu kerusuhan massa, pertentangan antara etnis, bahkan sampai saat ini tidak sedikit diantara saudara sebangsa di Indonesia yang menjadi korban sesamanya hanya karena suatu pertentangan yang bahkan bersifat sederhana. Masalah pertikaian masyarakat di Maluku telah melibatkan sebagian orang di luar pulau Maluku yang pada akhirnya menghadapi dua kubu Islami dan Kristiani. Setiap orang seolah sudah tidak peduli lagi bahwa yang menjadi seteru mereka adalah sesama keluarga bangsa.

Sebagian daerah bahkan telah memerintah untuk memiliki otonomi sendiri. Bahkan Timor Timur telah menjadi negara merdeka. Masalah keinginan untuk memerdekakan daerah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia juga muncul di Irian Jaya (Papua Barat), Aceh, Riau, dlsb. Isu keinginan merdeka muncul karena sebelumnya merasa selalu dirugikan oleh pemerintah pusat menjadi tema utama dari setiap daerah yang ingin merdeka.

Masalah yang sedang dialami oleh Indonesia sekarang sebenarnya tidak hanya karena alasan dalam negeri, tetapi juga tekanan dari luar negeri. Masalah hutang luar negeri yang menumpuk; kemacetan ekspor impor Indonesia karena L/C tertahan di luar negeri. Indonesia seringkali mendapatkan tekanan luar yang seakan tidak mempercayai kemampuan Indonesia dalam penegakan HAM, ancaman embargo ekonomi, tekanan internasional terhadap kondisi ekonomi Indonesia. Perselisihan dengan Australia tentang masalah Timor Timur, dan pengadilan internasional yang mencoba memperkarakan beberapa perwira di Indonesia atas tuduhan pelanggaran HAM.

Kemudian menjadi suatu pertanyaan tentang bagaimana sikap para aparaturnya dan terutama masyarakat luas dalam menyikapi setiap perkembangan bangsa yang sedang terjadi. Diantara bangsa sendiri, seakan berlangsung konflik berkepanjangan, membiarkan opini sendiri berkembang tanpa mencoba menyatukan dengan opini orang lain, apalagi opini dari kubu yang dianggapnya bertentangan. Banyak sekali

pendapat-pendapat yang saling bertentangan antara individu bahkan saling menyerang diantara satu sama lain.

Padahal yang dibutuhkan oleh bangsa Indonesia sekarang adalah sinergi, kekuatan untuk menyatukan seluruh energi dan potensi bersama agar dapat mencapai suatu performance sebagai suatu kelompok bangsa. Kondisi sekarang, seluruh potensi Indonesia, hampir seluruhnya digunakan untuk mempertahankan diri, terhadap terutama konflik-konflik di dalam negeri seperti misalnya konsentrasi dan tenaga diarahkan untuk menyelidiki atau menengahi pendapat-pendapat yang saling bertentangan diantara para pejabat, sehingga energi yang digunakan tidak menjadi efektif untuk meningkatkan pembangunan di setiap bidang.

Perkembangan bangsa menuju satu sinergi, terbentuk dari masih terdapatnya pengakuan dan perasaan terikat sebagai suatu kelompok bangsa. Pengakuan dan merasa terikat sebagai satu bangsa, sebenarnya sudah dikenal lama di Indonesia, bahkan di seluruh dunia dengan istilah nasionalisme. Oleh karena itu, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana sebenarnya nasionalisme di Indonesia?

Nasionalisme di dalam Psikologi dan Dampaknya bagi Perkembangan Individu

Sebagai suatu definisi, nasionalisme sebenarnya sangat susah karena setiap ahli kebangsaan memiliki sendiri pendapat nasionalismenya, dan sangat terkait dengan situasi kondisi masyarakat saat itu. Beberapa ahli yang pendapatnya perlu digaris bawahi mengenai nasionalisme adalah:

Menurut Snyder (Kemnacovic, 1996:15), nasionalisme adalah kondisi pernyataan, pemikiran, perasaan dari sekelompok manusia yang menempati wilayah tertentu, berbicara dengan bahasa tertentu, terkait dengan tradisi tertentu, memiliki suatu literatur yang berisi pandangan tentang aspirasi bangsanya, dan kadang-kadang memiliki kesamaan keturunan,

Nationalism is a condition of mind, feeling, or sentiment of a group of people living in a well defined geographical area, speaking in a common language, possessing a literature in which the aspirations of the nation has been expressed, being attached to the common traditions and in some cases having a common origin

The Institute of International Affairs (Kemnacovic, 1996:15) menyatakan nasionalisme adalah suatu keinginan yang tidak hanya diekspresikan ke dalam bangsanya, tetapi juga untuk memajukan kekuatan, kemerdekaan, kemakmuran bangsanya terhadap bangsa lain.

A desire to forward the strength, liberty or prosperity of a nation whether one's own or another.

Seorang ahli lain, yaitu Hans Kohn (Political Psychologies v.17/4) menyatakan nasionalisme sebagai suatu keadaan dalam pemikiran dimana individu mengidentifikasi dirinya terhadap kelompoknya dengan pemberian kesetiaan yang sangat tinggi.

As a state of mind in which the individual identified himself with the “we group” to which supreme loyalty is given (Hans, 1944)

Sedangkan menurut Otto Bauer, nasionalisme adalah solidaritas berdasarkan persamaan watak (A.W. Widjaja, 1986: 43). Salah satu konsep nasionalisme yang cukup dikenal adalah konsep yang dikemukakan oleh Ernest Renan tahun 1823-1890 (A.W. Widjaja, 1986: 43) menyatakan bahwa nasionalisme adalah kesatuan solidaritas bukan hanya ras, suku bangsa, kebudayaan, agama, atau batas teritorial tertentu:

Nasion adalah suatu jiwa, suatu azas spiritual... satu nasional adalah suatu satuan solidaritas yang besar, tercipta oleh perasaan pengorbanan yang telah dibuat dalam masa lampau dan yang bersedia dibuat di masa yang akan datang. Nasion dianggap mempunyai suatu masa lampau akan tetapi di masa lampau ini melanjutkan dirinya dalam masa kini oleh suatu kenyataan kesepakatan keinginan yang dinyatakan dengan jelas untuk terus hidup bersama (Sorbonne, Paris, 1882) (A.W. Widjaja, 1986: 43)

Menurut Drs. A.W. Widjaja (1986), nasionalisme Indonesia adalah adanya persatuan antara orang dan tempat, persatuan antara manusia dan tanahnya, mempunyai persamaan nasib, dan persatuan watak serta mempunyai cita-cita untuk bersatu sebagai bangsa. Menurut pandangan Prof. Padmo Wahjono, SH, kebangsaan Indonesia diwujudkan dalam naskah proklamasi Indonesia, dan pembukaan UUD 1945 tentang gagasan kemerdekaan bangsa (Padmo, 1982). Bapak Presiden RI pertama, Sukarno, memiliki pandangan tersendiri mengenai nasionalisme yaitu kesadaran persatuan demi bangsa yang sangat kuat bahkan melebihi ideologi dan kepentingan masing-masing golongan, yang digambarkan sebagai berikut:

Tidak ada halangannya Nasionalis itu dalam geraknya bekerja sama dengan Islamis dan Marxis. Nasionalis yang sejati yang cintanya pada tanah air itu bersendi pada pengetahuan atas susunan ekonomi dunia dan riwayat, bukan semata-mata timbul dari kesombongan bangsa belaka, Nasionalis yang chauvinis, tak boleh tidak, haruslah menolak segala faham pengeculian yang sempit budi itu. (Bachtiar, 1987: 94)

Pemikiran dari ahli kebangsaan di Indonesia, dituangkan secara kritis dalam pokok-pokok proklamasi dan UUD 1945, yang pemahamannya antara lain adalah keinginan untuk berkehidupan bersama dalam satu cita-cita bersama, dan merupakan suratan takdir dari Tuhan Yang Mahaesa.

Birgit Meyer (1999) menyatakan kemajuan globalisasi akan menghilangkan pembatasan wilayah disetiap bangsa, sehingga konsep suatu bangsa atau negara akan berubah, sehingga nasionalismenya pun berubah. Ideologi yang mengajarkan kecintaan terhadap paham, ras, dan agama tertentu yang bersifat lebih fleksibel daripada negara akan lebih berkembang daripada kecintaan terhadap bangsa. Dari pendapat-pendapat para ahli tersebut, maka terlepas dari perkembangan nasionalisme yang akan terjadi di era globalisasi, tampaknya masalah pembentukan nasionalisme suatu bangsa perlu mendapat perhatian di era globalisasi ini.

Dari uraian beberapa pendapat ahli diatas, maka dapat disimpulkan bahwa nasionalisme adalah suatu pengertian yang menunjukkan suatu keterikatan pada

kelompok yang disebut bangsa. Nasionalisme menunjukkan semangat untuk tetap bersatu dan bekerja sebagai kelompok bangsa.

Kedudukan nasionalisme dalam psikologi sangat tampak jelas, terutama dari definisi yang diungkapkan oleh Snyder, yaitu terdiri dari pemikiran, perasaan, dan kecenderungan. Dalam psikologi sosial, kondisi yang terdiri dari aspek pemikiran, perasaan, dan kecenderungan (konasi) dapat disebut sebagai sikap (attitude). Oleh karena itu, disimpulkan bahwa nasionalisme adalah sikap yang mencerminkan keinginan positif untuk bersatu dan bersama dengan kelompoknya untuk mencapai tujuan bangsa bersama.

Sejalan dengan yang diungkapkan oleh Drs. H. Hatta Albanik, M.Psi (2000) dalam psikologi dinyatakan bahwa setiap perkembangan manusia ditentukan dari interaksinya dengan lingkungan. Oleh karena itu, sikap-sikap politik pun sebenarnya berawal dari interaksi manusia dengan lingkungannya. Sehingga kondisi-kondisi yang kondusif atau menghambat individu dalam berinteraksi dengan lingkungan, juga turut mempengaruhi ketika ia berinteraksi dengan politik, perbedaannya hanyalah masalah setting tempat. Dihubungkan dengan nasionalisme, maka sebenarnya perkembangan dari individu selama interaksi di kehidupan sehari-hari, terutama ketika ia berinteraksi dengan kelompoknya, turut mempengaruhi pembentukan interaksi dengan kelompok bangsanya. Beberapa hal yang turut mempengaruhi interaksi individu dalam kelompok:

1. Masalah mentalitas kelompok besar atau etnik, sehingga unsur yang paling berpengaruh pada loyalitas akan diberikan. Pada Indonesia tampaknya sekarang terjadi suatu kemunduran (Farid, 2000) dalam hal berpolitik yang lebih mementingkan kelompok daripada bangsa.
2. Kecenderungan manusia untuk sendiri atau hidup berkelompok, sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya masyarakat sekitar. Salah satu nilai yang berkembang adalah nilai individualisme versus kolektivisme. Menurut Dr. Zulrizka, dan penelitian yang dilakukan pada sejumlah remaja 18-20 tahun (Aria, 2000) pada dasarnya nilai-nilai yang dianut masyarakat Indonesia adalah kolektivisme, yaitu keinginan untuk tetap bersatu.
3. Tingkat persaudaraan dalam kelompok dan non-kelompok. Sentimen-sentimen tertentu yang dapat menciptakan kesenjangan dan pertentangan dengan kelompok dan orang yang dianggap non-kelompok. Kadangkala sentimen tersebut yang menimbulkan perasaan eksklusif pada suatu kelompok.
4. Komitmen yang digali antara individu dengan negaranya sendiri, berdasarkan hubungan darah/saudara, hubungan timbal balik, atau investasi tertentu?

Analisa Perkembangan yang Terjadi dan Antisipasi Kondisi Mendatang

Sesuai dengan analisa psikologis pada perkembangan kelompok, maka apabila dilihat pada perkembangan Indonesia sekarang, yang terutama perlu dianalisa dari aspek-aspek kelompok adalah intensitas loyalitas dari bangsa yang sekarang sedang mengarah pada kelompok-kelompok atau masih pada kelompok bangsanya? Kemudian melihat bagaimana sikap dan sentimen yang tampaknya masih sekarang cukup tinggi diantara kelompok-kelompok kecil di bangsa Indonesia sendiri, yang sekarang tampak pada perselisihan SARA. Terakhir pada kondisi individunya,

berdasarkan suatu penelitian yang dilakukan, tampak kondisi remaja Indonesia sebagai cikal bakal penerus bangsa, sedang berada di tengah-tengah antara kecenderungan integrasi/kolektivistik dengan sendiri/individualistik. Mungkin perkembangan informasi dari budaya Barat yang pada dasarnya individualistik, memperkuat perubahan nilai dari semula kolektivistik (Zulrizka, 2000), menjadi di tengah-tengah. Jadi memang tampak ada gejala dalam kelompok bangsa Indonesia saat ini baik pada kondisi individunya maupun diantara kelompok-kelompok suku/lainnya.

Perkembangan kelompok bangsa Indonesia saat ini sedang berada pada tahap storming, yaitu suatu fase dimana suatu kelompok sedang mengalami suatu krisis, setiap anggota saling menyalahkan, banyak tidak sepaham dan hanya melihat dari satu kepentingan saja. Yang perlu ditingkatkan menjadi fase norming, yaitu muncul kesepahaman dan kesepakatan antara satu dengan yang lain, sehingga akhirnya kelompok menjadi kompak dan memasuki fase performing, yaitu mau bekerja bersama-sama menampilkan prestasi kelompok Indonesia yang terbaik.

Apabila kondisi storming tetap bertahan, dan kondisi aspek salam kelompok di bangsa Indonesia tidak dibenahi, terutama sentimen yang kurang baik terhadap kelompok-kelompok kecil di Indonesia, niscaya perkembangan bangsa Indonesia akan mengarah pada disintegrasi di masa mendatang. Kondisi ini juga akan ditunjang oleh perkembangan nasionalisme di milenium ketiga yang diperkirakan akan lebih mengarah pada nasionalisme kelompok agama/suku/ideologi daripada nasionalisme sebagai bangsa atau negara (Birgit Meyer, 1999).

Oleh karena itu, yang perlu diperbaiki oleh bangsa Indonesia dewasa ini adalah sikap untuk menahan bahkan menghentikan setiap statement yang hanya meresahkan dan membuang energi untuk maintenance saja, terutama diantara kalangan pejabat atau kelompok yang berpengaruh di perkembangan bangsa Indonesia. Perlu dikembangkan sikap saling menghormati dan mengutamakan kata “maaf” yang disertai ketulusan hati, karena demi kepentingan bangsa yang lebih besar (Zulrizka, 2000). Dengan demikian, akan tercipta rasa perdamaian dan sikap kebangsaan yang baik, yang tetap memperlakukan secara manusiawi terhadap setiap pihak politik baik yang sama atau bertentangan, karena hal itu dilakukan demi bangsa.

Sebagai tambahan, pendidikan kebangsaan di Indonesia perlu dikembangkan menjadi lebih dari ajaran formal dan pengetahuan administratif negara seperti lambang negara, Pancasila, UUD 1945, tetapi juga diarahkan pada diskusi untuk menumbuhkan pribadi-pribadi yang kritis terhadap perkembangan negara sekaligus juga memiliki budi pekerti yang baik. Tampaknya disini peran pengajar kebangsaan sangatlah dominan.

B.

**Perilaku Menyimpang Dalam
Praktek Politik Indonesia**

**Prospek Kehidupan Bangsa-Negara
Indonesia Dalam Milenium III**

Drs. Farid Prawiranegara
Ketua DPP Partai Bulan Bintang Jakarta

Bangsa kita sedang mengalami krisis berkepanjangan yang membuat berbagai kalangan menjadi khawatir tentang disintegrasi nasional. Pada urun rembuk yang saya hadiri di Bali beberapa waktu yang lalu, dapat saya simpulkan bahwa tokoh-tokoh elite di negara kita juga merasakan hal yang sama.

Saya adalah putera dari seorang tokoh yang sempat ditahan pada masa kepemimpinan Sukarno. Keluarga saya mengalami masa-masa sulit sampai ketika Leimena dan Subandrio memberikan pertolongan berupa bahan pokok setiap bulan selama ayah ditahan. Bahkan Presiden Sukarno memberikan dua buah mobil kepada keluarga saya. Pengalaman ini membuat saya bertanya-tanya ketika melihat apa yang terjadi sekarang ini. Sebenarnya perilaku yang menyimpang itu yang mana? Pada Orde Lama, perilaku berpolitik boleh bertentangan, tetapi perilaku orang yang berbangsa tidak berubah.

Menurut Natsir, yang saya kunjungi bersama Prabowo seminggu sebelum beliau meninggalkan dunia, kita telah mengalami kemunduran dalam hal perilaku politik.

Bukan itu saja, perilaku sehari-hari juga semakin membuat saya muak. Saya pernah melihat seseorang yang sudah tergeletak tak berdaya tetapi masih menerima perlakuan yang tidak manusiawi dari massa. Atau hakim yang meminta uang pelicin agar kasus di pengadilan berjalan cepat. Dimana letak keadilan sekarang? Oleh karena itulah masyarakat memutuskan untuk melaksanakan keadilan dengan tangan sendiri. Rakyat Indonesia sekarang tidak menyadari apa yang disebut cinta bangsa. Ketidakperdulian ini membuat saya berpikir bahwa ada tiga masalah besar yang dihadapi oleh bangsa kita:

1. Masalah ekonomi. Tiap tahun kita memiliki duapuluh lima milyar dollar surplus perdagangan, tapi mengapa tiap tahun kita hanya memiliki cadangan devisa 12-15 milyar dollar. Selama ini ekspor impor tertahan di Singapura karena dokumen L/C kita tidak dipercayai oleh dunia internasional sehingga harus di-endorse oleh Singapura. Sedangkan Singapura sendiri meminta enam persen dari jasa tersebut. Hal itu sangat menyedihkan. Apabila ada ekonom yang mengatakan bahwa fundamental ekonomi kita bagus, menurut saya hal itu salah besar. Salah satu kesalahan terbesar ekonom kita adalah percaya

kepada IMF. Kepentingan IMF adalah bagaimana Indonesia bisa membayar hutang, sedangkan untuk itu diperlukan dollar yang menjadi komoditi mereka. Konsekuensi tersebut membuat Indonesia terus bergantung kepada IMF.

2. Masalah psikologi massa. Hal ini yang selalu menjadi pembicaraan akhir-akhir ini. Ketika saya bekerja di radio Jepang, ada satu pelajaran yang saya dapatkan bahwa pers Jepang memiliki suatu kesadaran bahwa apa yang mereka tulis atau siarkan akan mempengaruhi keadaan negaranya, sedangkan saya melihat pers Indonesia tidak memiliki hal yang sama.
3. Narkoba. Saya tidak bisa menghindari pemikiran bahwa ada suatu konspirasi yang berniat menghancurkan generasi muda Indonesia. Narkoba adalah salah satu bagian dari konspirasi tersebut. Ada satu skenario besar yang tersusun dengan menggunakan alasan kesejahteraan (welfare) untuk menghancurkan bangsa Indonesia. Camdesus pernah mengatakan pada suatu seminar yang kemudian dikutip oleh New York Times dan Washington Post bahwa memang ada kesengajaan untuk memperlambat turunnya bantuan IMF kepada Indonesia agar Suharto turun sehingga pembersihan terhadap pemerintahan Indonesia.

Demikianlah sedikit ungkapan kegalauan saya mengenai kondisi dalam perilaku politik dan perilaku sehari-hari masyarakat Indonesia.

————— 0 —————

Diskusi

- 1) Syamsudi Arsyad dari Seskoau Lembang. Sudah dijelaskan bahwa tentang cinta bangsa, kelihatannya kita ini sudah muak melihat kelakuan elite politik atau siapalah. Saya tidak menyalahkan siapa, tapi kenyataannya demikian. Bapak Eep Saefullah Fatah sudah menulis dalam bukunya yang menyatakan “bangsaku yang menyebalkan”. Dia sudah muak juga, terus, kita-kita ini mau kemana ? Nah sekarang dalam topik ini, cinta bangsa untuk generasi yang akan datang, barangkali nanti yang diatas akan lewat secara alamiah, biarkan dia lewat, sekarang kita berikan pada yang dibawah kita ini supaya cinta bangsa. Sekarang apa tugas kita yang generasi sekarang ini untuk adik-adik kita yang SMP, SMA, SD supaya jangan mereka ini mengalami seperti yang kita alami sekarang ini? Pertanyaan saya, apa yang harus kita perbuat? Orangtua apa yang harus diperbuat terhadap anak-anaknya? Para guru, pengajar, terhadap murid-muridnya supaya cinta bangsa dia ini? Karena sekarang juga anak-anak SMP, SMA sudah tawuran melulu. Nah bagaimana secara psikologis mereka kita ayomi, begitu Pak. Terima kasih.
- 2) Mahmud Majid. Begitu bagus penjelasan indikator permasalahan bangsa yang kita hadapi dipandang suatu segi aspek praktis. Nah, setelah mengikuti dengan cermat, pertanyaan yang timbul adalah setelah menjelaskan indikator itu, solusi pemulihannya bagaimana? Yang kedua, dalam penjelasan ada sedikit kontradiksi. Kalau disitu dijelaskan dengan tegas, saya tidak setuju kalau sekarang elite politik kita menganggap masyarakat kurang mengerti tentang segala sesuatu yang terjadi. Di pihak lain, ternyata masyarakat kita ini, tidak banyak perubahan karena setiap lima tahun keadaannya begitu-begitu saja. Dari alur berpikir yang kontradiktif ini mohon dijelaskan supaya ada satu pemahaman kira-kira seperti apa mencermati kondisi masyarakat.

Jawab

Bahasan

- (1) a. Barangkali, bapak-bapak kita dahulu itu bisa bersatu, bisa merasakan bagaimana persatuan itu, bagaimana indahnya persatuan itu karena mereka sendiri menghadapi tantangan yang luar biasa besarnya ketika harus melawan Belanda, zaman Jepang, kemudian melawan Belanda. Itu adalah suatu cobaan yang luar biasa, sehingga mereka merasakan bagaimana beratnya tekanan-tekanan seperti itu. Kemudian mereka bersatu, walaupun ada perbedaan paham, perbedaan pendapat, Konstituante 1950-1955, pemilu. Saya melihat dua kali pemilu. Masalah utama sama juga, tidak ada satu partai pun yang menang mutlak. Barangkali kunci permasalahan kita sekarang adalah karena pemilu yang kita harapkan bisa menghasilkan suatu yang konkret, ternyata tidak menghasilkan apa-apa. Bagaimana sang Gus Dur yang PKB, partai kecil sebetulnya kalau dibandingkan dengan Megawati, bisa menjadi presiden. Bagaimana Amien Rais dengan tujuh persen di parlemen bisa menjadi ketua MPR? Tidak ada satu

partai pun yang kemudian bisa menyatakan bahwa akulah yang berkuasa di negara ini, dan ini garis yang aku berikan.

- b. Memang ada perundang-undangan yang perlu diperbaiki, menurut pandangan saya, misalnya contoh, amandemen terhadap UUD 45. Oleh sebab itu saya setuju sekali terhadap amandemen terhadap UUD 45 dimana nanti akan ada utusan daerah, dewan utusan daerah, dan DPR. Itu seperti Senat dan, parlemen di Amerika, majelis rendah. Ini barangkali jalan keluar tapi itu jalan keluar yang masih agak lama. Yang kita inginkan kan jawaban-jawaban sekarang ini. Jawaban-jawaban yang ada sekarang ini kesadaran-kesadaran segera yang *immediately otherwise were gone*. Sampai sekarang ini elite politik manapun yang saya ajak bicara belum bisa mendapatkan itu belum bisa mengatakan barangkali mustinya kita perang dulu. Kadang saya suka berpikir barangkali kita mesti gontok-gontokan habis-habisan baru kita sadar, bahwa sebetulnya itu merugikan kita semua. Apa itu yang kita inginkan? Kalau itu yang nggak kita inginkan tentu kita semua harus sadar bahwa bangsa ini sedang mengalami krisis berkepanjangan dan semua mengatakan krisis, krisis, tapi tidak ada satupun yang mengatakan ayo kita sama-sama membangun kepercayaan masing-masing. Saling percaya satu dengan yang lain itu yang tidak ada. Coba katakan forum rembuk nasional, saya datang kesana, sampai di airport ada Salim Said, ada berbagai tokoh politik disitu. Pertanyaan pertama, siapa yang membiayai ini. Kemudian, apa maksudnya ini, ini skenario apalagi. Kok bisa-bisanya mereka berpikir seperti itu. Saya bilang kenapa sih nggak khusnudzan, sekali-kali kita berbaik sangka, sekali-kali bahwa ini dilakukan karena kita diajak rembuk untuk bicara satu dengan yang lain. Saya katakan pada mereka bahwa pada saat pemilu, saya paling depan membela Megawati, sekarang saya *I don't have any problem if he becomes a president, but this is democracy, you have to accept that*, nggak bisa, kita harus bicara. Kata Islam ini, orang Islam bilang Megawati ini perempuan, jadi nggak bisa jadi presiden. Saya debat panjang dengan Amien Rais. Saya ceritakan sedikit, agak menyimpang. Saya debat panjang. Saya bilang, mas Amien, saya pengen tahu nih, mas Amien, madzhab mana di Islam yang mengatakan orang cacat boleh jadi pemimpin, ada nggak tuh, kalau nggak salah saya, Syafi'i atau Hanafi, ada ini. Tapi ditulis itu, boleh cacat asal jangan cacat mata. Kalau mas Amien bilang, saya bilang, bahwa Megawati wanita perempuan, dia nggak boleh... bahwa merupakan kewajiban syar'i kita melawannya sementara Gus Dur ini buta, dan ini juga melanggar syariah, seandainya kita milih dia. Dalam konteks ini kan kita harus menimbang-nimbang mana yang lebih baik, mana mudarat dan manfaatnya. Itu sebelum pemilihan itu. Saya bilang, mas tolong deh, saya minta tolong betul, kita problem besar ini, menghadapi problem besar. Dia bilang, nggak bisa Rid, nggak bisa, harus Gus Dur. Saya bilang, begini deh, katanya Qur'an, sorry, hadits nabi mengatakan kalau kita harus memimpin antara orang kafir dan orang munafik, kita kan pilih orang kafir. Iya, sekarang saya bilang, gini deh, apa ciri-ciri orang munafik. Ciri orang munafik itu kalau ngomong suka

berbohong, kalau diberi amanah berkhianat sama amanahnya, yang ketiga janjinya nggak bisa dipegang. Saya bilang sama mas Amien, mas Amien, tiga-tiganya ada sama Gus Dur. Saya bukannya mau... waktu itu belum pemilihan presiden. Setelah itu... jadi, mudarat sama manfaatnya sudah jelas sama saya. Saya sampai dituduh sama dia pendukung 'Megawati-acute', kata dia. Saya bilang, bukan, ini demi kepentingan bangsa. Waktu itu saya bilang, ini kita, kata mas Amien, kalau Mega yang jadi pertumpahan darah, kalau seandainya Habibie yang jadi pertumpahan darah. Jadi ini cuma calon, dia adalah calon kita dan ia akan menghindarkan Indonesia dari pertumpahan darah.

- c. Saya berdebat panjang tapi toh akhirnya dia tetap ngotot bahwa itu pilihan dia untuk menjadikan presiden Gus Dur. Jadi pada saat itulah, saya kemudian mulai berpikir, aduh ini nggak bisa kita keluar dari kemelut ini, kecuali elite-elite politik kita, karena yang menentukan memang elite-elite politik di Indonesia ini, sadar apa yang terpenting untuk bangsa ini, bukan sadar apa yang terpenting untuk orang-orang di sekelilingnya atau kelompoknya. Ketika sesudah pemilu, kita harus kembali begitu. Pada saat pemilu, kita harus bilang Megawati ini begini, itu banyak Kristennya kita bilang, banyak ininya, supaya orang milih kita kan. Tapi sesudah itu selesai, kembali lagi dong ke masalah yang hakiki. Apa dong sekarang kita sudah duduk semua, apa yang harus kita lakukan untuk bangsa ini, karena setelah ini nggak ada lagi perwakilan, ini adalah kita, kita yang beberapa ini yang menentukan ke arah mana bangsa ini. Ini yang kurang di kita sekarang. Kita punya Megawati, kita punya Amien Rais, kita punya Gus Dur, tapi kita tidak punya pemimpin. Seorang pemimpin yang bisa memberikan arah yang jelas kepada kita, punya visi, visioner yah kata orang Barat, dan semuanya berpikir. Dikritik marah, 2,5 juta Banser mau turun seandainya Gus Dur mau dicopot. Nah, siapa yang bilang mau nyopot. Kita kan Cuma mau nanya aja apa nggak boleh. Nanya, udah bilang mau copot, susah kan? Saya sudah bilang sama kawan-kawan di Jakarta, ya udahlah, kita stay away from this politics, makanya saya terima kasih diundang karena saya memang merencanakan untuk keliling dari kampus-kampus. Mungkin untuk mengajak supaya kita barangkali dari bawah ini, mesti diangkat. Mungkin adik-adik mahasiswa tidak usah berdemonstrasi, tapi coba sadarkan bapak-bapak yang diatas, untuk mau memikirkan kepentingan bangsa yang lebih besar. Saya masih ingat Pak Natsir mengatakan pada saya, Pak Natsir tokoh Islam, mengatakan pada saya, Farid apa yang terbaik pada bangsa ini pasti terbaik pada umat Islam. Umat Islam nggak perlu takut, umat Islam tidak perlu khawatir karena umat Islam mayoritas di negara ini. So kenapa kita mesti takut gitu, dipimpin sama Mega saja kita ketakutan semua.

- (2) Yang kedua, pertanyaan adalah Apa ada solusinya? Saya sudah berkali-kali, diwawancarai di TV. Saya bilang kalau masalah ekonomi di Indoensia nggak bisa lihat text book lagi. Ini bicara dagang uang. Oleh sebab itu, kita harus mengembalikan rupiah itu menjadi bukan alat perdagangan, tapi alat tukar. Rupiah itu alat tukar yang berlaku di negara

Republik ini. Dan dolar bukan alat tukar dan alat perdagangan yang berlaku di republik Indonesia. Oleh sebab itu, saya katakan sekarang ini uang rupiah kalau lagi bagus-bagus di Singapore, ratenya lagi bagus di Singapore, itu bisa dari kontainer dibawanya kesana atau dolar masuk ke Indonesia juga dengan kontainer atau dolar keluar Indonesia. Jadi, physically, padahal rupiah nggak laku di Singapura, dolar mestinya juga nggak laku di Indonesia, tapi kenapa orang beli secara fisik?

Oleh sebab itu saya mengatakan, kita harus tutup border kita. Tutup kasih waktu dua minggu, tiga minggu, satu bulan dari sekarang. Yang keluar masuk secara fisik dari border kami akan dibatasi. Suka nggak suka, mau dibatasi, tutup border itu. Katakanlah 10.000 dolar hanya masuk keluar di Indonesia, katakanlah 10 juta rupiah boleh keluar masuk, selebihnya harus lewat bank transfer. Kartu kredit boleh berlaku, seperti di Amerika, seperti di negara-negara lain juga begitu. Yang kedua, adanya keharusan menyetorkan hasil ekspor. Sekarang ini tidak ada kewajiban bagi eksportir untuk menyetorkan uangnya ke Bank Indonesia. sehingga eksportir itu hanya dicatat tapi uangnya nyangkut di Singapore. Seperti apa yang saya katakan tadi, bank-bank di Indonesia tidak dipercaya. Kemudian dilarang melakukan profit taking antara rupiah dengan valuta asing lainnya. Iya kan, akan tetapi mereka yang membutuhkan dolar, dengan ketentuan yang berlaku bisa membeli dolar.

Apa ketentuannya? Orang yang bisa membeli dolar, yang pertama adalah importir yang mau mengimpor barang. Supaya, bagaimana ia bisa mengimpor barang bila tidak melalui dolar. Yang kedua, mereka yang melakukan ekspatriasi dari profit mereka, depatriasi profit. Jadi investor asing yang mau mengembalikan keuntungannya ke luar negeri itu harus dijamin. Dan ketiga adalah orang-orang yang akan membayar hutangnya karena hutangnya dalam bentuk dolar dan itu dilakukannya di luar negeri. Akan tetapi, berapa dolar yang akan dibeli itu tergantung banyaknya permintaan dan keterbatasan suplai yang ada di dolar Amerika tadi, nggak perlu kita tip-ex. Saya rasa dengan cara ini, saya bicara yang praktis saja, sekarang dengan cara ini maka otomatis, uang 60 milyar yang lari ke Singapore dari BLBI itu nggak balik lagi ke Indonesia, tapi apa akibatnya. Akibatnya adalah Singapore harus membayar bunga yang cukup besar untuk me-maintain itu. Cukup besar itu bunganya. Kenapa mereka bisa dan berani pegang uang itu sekarang? Karena mereka masih bisa mainkan itu dolar di Indonesia. Mereka masih dapat untung. Bunga naik 70 persen, mereka jual dolar mereka, mereka dapat rupiah, mereka depositokan dalam bentuk surat berharga BI, dapat bunga disitu 70 persen. Dari bunganya mereka jadikan dolar, larikan ke luar negeri lagi, dolar turun dijual lagi, rupiahnya dibelikan dolar, balik lagi kesana, balik lagi dia, itu aja kerjanya.

Kalau ini-ini, just for the sake of arguments yah, kalau saya punya uang satu juta dolar, saya sisihkan 250.000, saya tukar sama rupiah sekarang, kemudian saya bagi empat, saya kasih ke Medan satu, ke Jakarta satu, ke Surabaya satu, ke Ujung Pandang satu, bagi empat total rupiah kita bagi. Suruh bikin demonstrasi gede-gede, dalam waktu singkat itu jadi

15.000 sekarang harganya berapa? Sekarang kita sudah untung 100 persen. Dari 750 ribu kita sudah dapat 1,5 juta. Iya, terus kenapa kita mesti susah-susah? Kalau itu bisa dilakukan orang-orang berduit, mungkin-mungkin saja, apa kita itu gampang dilakukan di Indonesia, apalagi sekarang ini pasar dolar sangat thin, sangat tipis, sangat tipis sedikit saja uang itu, sudah gret, naik dia. Dulu waktu Pak Harto kuasa, kalau nggak salah saya, 500 milyar sehari transaksinya, sekarang kalau nggak salah 700 juta. Banget turunnya, very thin itu. Maksud saya jadi yah model orang-orang berduit kayak Ginandjar gitu, mungkin masih bisa-bisa main juga kayak begituan. Saya pikir, kalau saya jadi Ginandjar, saya mungkin gitu juga, kalau saya jadi mafia. Kenapa nggak? Dalam waktu 1-2 bulan, naik itu. Dari 15. Saya nggak mengatakan Pak Ginandjar melakukan itu, nggak sama sekali tidak, tentu, tapi kalau saya sekaya dia, mungkin saya lakukan itu, mungkin.

Tentang kontradiksi, saya rasa tidak ada kontradiksi. Maksud saya begitu banyak elite politik menyatakan banyak rakyat kita nggak ngerti. Kita 'tuh diciptakan stigma seolah-olah rakyat kita ini bodoh, maksud saya. Seolah-olah rakyat kita bodoh, nggak ngerti, pendidikannya kurang, blah-blah-blah. Jadi kita harus kasih tahu sama mereka apa yang musti dikerjakan, didikte mereka, 'kan itu elite politik kerjanya. Sekarang kita ditakut-takutkan kalau Gus Dur turun nanti siapa yang gantiin? Nanti akan ada pertumpahan darah. Pertumpahan darah itu nggak ada, pertumpahan darah itu karena kemudian orang-orang ini jadi nekat, karena terus-terusan dicekoki sama ketakutan-ketakutan yang bukan-bukan maka akhirnya nekat pergi ke Ambon, dia perang di Ambon beneran. Kebetulan disana lagi rusuh. Kan itu masalahnya, jadi nggak ada kontradiksi. Rakyat kita tidak berubah kehidupan sehari-harinya, tidak berubah, tapi otaknya jalan. Mereka lebih tahu apa yang mereka ingini daripada kita yang di elite politik. Rakyat itu miskin, jadi nggak mungkin lagi jatuh miskin. Yang bisa jatuh miskin adalah elite politik, yang setengah kaya, dan sudah kaya, itu bisa jatuh miskin mendadak. Contoh, Hasyim beli saham Bank Niaga 8000, sekarang harganya 350, dalam semalam bisa terjadi seperti itu. Bret, hilang semuanya. Itu yang ditakuti oleh elite-elite itu sekarang. Mereka takut miskin, takut jatuh miskin. Kalau rakyat sih nggak takut apa-apa, wong rakyat dari dulu juga begitu dan tahu apa. Rakyat sih sudah tahu mereka sudah jatuh miskin dari dulu sampai sekarang, sudah kayak begini saja hidupnya, jadi nggak perlu ngeri-ngeri lah, dan rakyat itu bukan rakyat... itu yang perang, rakyat yang kecil-kecil nggak perang itu. Disana di Ambon, baru dipanas-panasin luar biasa baru bunuh-bunuhan. Itu juga dipancing baru terjadi kerusuhan besar, selama ini nggak ada kerusuhan-kerusuhan seperti itu. Saya pergi ke Banten, ngeliat tempat tinggal orangtua saya. Saya kaget juga liatnya, kok kampung saya masih kayak begitu saja dari dulu. Ternyata saya sudah ke Australia, Amerika, balik lagi kesana, oh, ternyata saya nggak pernah lihat kampung saya, coba... saya saja nggak pernah lihat kampung saya, baru-baru saja, itu pun karena kampanye. Jadi sekarang saya berpikir, barangkali kita-kita itu perlu pulang kampung lagi, lihat kampung kita masing-masing, lihat kita punya kehidupan dulu bagaimana, kemudian bangun masing-masing kampung masing-masing, barangkali itu lebih berguna daripada kita ribut-

ribut di kota, takut-takutin orang supaya harga dolar naik, supaya kita dapat untung besar. Jadi saya rasa tidak ada kontradiksi dalam hal penerangan saya tadi. Jadi elite politik itu ngomongnya aja dia tahu masyarakat, sebenarnya dia nggak tahu apa yang terjadi di masyarakat. Dan rakyat tidak berubah, yang tidak berubah rakyat dan ia tahu persis apa yang dia mau, yang nggak tahu maunya apa kan, kita-kita yang di kota.

Tadi saya mengatakan masalah psikologi massa. Psikologi massa yang agak sulit untuk itu, barangkali psikolog-psikolog lebih tahu untuk menjawabnya daripada saya. Tetapi saya melihat bahwa ke depan barangkali kita perlu ada code of conduct, yang praktis-praktis. Kita musti ada code of conduct. Kalau di Australia, kalau di Amerika, namanya code of conduct, kalau di Australia namanya trade practices act. Jadi ini elite-politik yang suka kasih komentar itu bisa kena sanksi hukum. Di Australia itu ada seorang bankir, ada orang datang sama dia, kemudian dia tanya ini klien anda. Yah, ini salah satu ini, dia kasih lihat beberapa informasi, dia tanya sama bankir itu, dia tanya ini klien anda. Ya, nasabah anda. Ya, bagaimana dia. Bagus nggak? Dia (bankir) tanya, untuk apa ini. Oh, saya mau melakukan investasi di perusahaan itu. Oh, ya, ini bagus, dia katakan ini bagus. Ternyata 2-3 hari kemudian, perusahaan itu bangkrut. Dia (bankir) dituntut dan ada hukum yang mengatur sehingga ia dinyatakan bersalah, kemudian dia... nah, itu jangka pendek. Jadi mesti ada code of conduct. Yah, dari setiap kita yang berusaha, yang berbicara, jangan sampai kita ini sesukanya saja berbicara seenak-enaknya saja berbicara tanpa mempertimbangkan yang dalam mengenai masalah-masalah yang dihadapi oleh bangsa kita, itu satu.

Saya berpikir begini. Maybe dalam Islam, di dalam Islam itu tidak ada kedaulatan rakyat. Yang Islam kenal itu adalah kedaulatan hukum, dan hukum itu adalah al-Quran. Jadi hukum Allah kalau menurut agama Islam. Kita ini mesti menyadari bahwa bangsa kita ini mesti menyadari bahwa di mata Tuhan kita ini semua sama. Kita anak Tuhan. Saya ini bukan apa-apa, Gus Dur bukan apa-apa, dia itu seorang manusia yang bisa banyak berbuat salah. Kalau kita semua bisa sadar kalau kita bukan apa-apa, apa yang kita miliki di dunia ini hanya sementara, kalau dalam Islam ada hadits yang menyatakan, yang mengatakan bahwa... bukan hadits sebetulnya, yang pertama Quran tapi saya lupa ayat apa, tapi menyatakan bahwa apa yang ada di langit, apa-apa yang ada di bumi, apa yang ada diantara langit dan bumi, apa yang ada di tanah adalah milik-Ku, kata Allah. Hadits qudsi kemudian menyatakan orang kaya itu, Aku pemilik semuanya ini, orang kaya itu wali-Ku, orang miskin itu asuhan-Ku, dan Aku turunkan laknat pada wali-Ku yang zalim dan bakhil kepada asuhan-Ku. Jadi konsepnya adalah (saya tidak mengatakan ini adalah konsep yang terbaik), tapi konsep Islam adalah bahwa kita ini bagian dari suatu konseptual yang lebih besar, ada aturan main diatas, dan tidak bisa kita argue. Dia yang mengatur. Dia yang Khalik. Dia satu-satunya yang menyatakan ya apa tidak. Kita ini bukan apa-apa. Kita ini hanya manusia-manusia yang merupakan bagian. Jadi cintanya kita kepada manusia itu disebabkan karena cintanya kita kepada Yang Satu itu. Jadi kalau tadi Pak

Hatta bilang: *loyalty to my party ends when loyalty to my country begins*, saya mau menambahkan; sebelumnya *loyalty to my party ends, when loyalty to my God, so indeed my country begins*. Jadi segala sesuatunya kalau kita lihat dari kacamata seperti itu maka barangkali, maybe, barangkali ke depan bangsa kita akan lebih adem, karena kita tidak merasa bangsa kita ini lebih daripada yang lain, dan orang juga tidak merasa dia lebih hebat daripada kita karena di mata Tuhan tidak ada yang hebat. Dialah satu-satunya yang paling hebat dan paling benar. Barangkali, barangkali, kalau bapak-bapak, kiai-kiai, bapak-bapak pemuka agama, romo-romo kita di Katolik, saya punya romo, sudah tua, dia guru saya waktu saya sekolah Katolik dulu di PL, barangkali kalau kita mulai berbicara ke arah satu memberikan pengertian kalau kita ini orang-orang biasa yang penuh kekhilafan, penuh dengan kesalahan sehingga kita mau memaafkan dengan sebenar-benarnya memaafkan karena cinta kepada sesama, karena kita cinta kepada Allah, dan Allahlah yang menentukan segala sesuatunya. Maka barangkali kesadaran itu yang perlu kita tanamkan kepada anak bangsa kita ke depan. Barangkali itu juga Pak Natsir mengatakan, Y. Kasimo sahabat saya, seminggu sebelum beliau meninggal menelpon saya, kalaulah Konstituante itu berhasil, Natsir, maka negara ini nggak akan seperti ini. Untuk Anda ketahui, bahwa Pak Y. Kasimo adalah orang yang, bukan memberi, tapi mencarikan rumah bagi Pak Prawoto untuk beliau, baru datang dari Jawa sana. Beliau cari rumah, nggak ada, akhirnya ada seorang pastur baru pulang ke Belanda, rumahnya di jalan Kertosono. Kemudian oleh Pak Kasimo, dibicarakan pada gereja itu, gereja belinya murah, karena gereja separuh, kasih Pak Prawoto, akhirnya rumah Pak Prawoto itu dibeli beliau yang baik beragama itu. Melihat dirinya bukan bagian dari suatu kepentingan, mereka melihat bahwa mereka ini hanya sekedar orang-orang yang dilahirkan, diciptakan oleh Allah, sesama kita yang barangkali galib seperti yang lain, nggak melihat lebih hebat daripada yang satu, yang satu nggak melihat lebih hebat daripada yang lain. Nah, jadi cobalah kita berpikir ke depan, bagaimana bangsa ini. Saya tadi memberikan gambaran-gambaran yang praktis, langkah-langkah yang praktis, bagaimana mengatasi kemelut bangsa kita ini, ekonomi dan masalah politik. Saya serahkan barangkali kepada polisi untuk menangani masalah narkoba, hukuman yang berat itu bagaimana. Tapi yang pasti adalah setiap kesalahan itu pasti dihukum, one way or another, harus dihukum. Tidak bisa kita maafkan begitu saja. Karena begini, saya sekarang dengar, saya maafkan tapi saya tidak lupakan. Saya punya Oom. Saya bilang Oom Halim, bekas menteri pertahanan. Dia juga salah satu ketua PSSI. Jadi PSSI semuanya dikumpulkan ketua-ketuanya di Istana, terus Pak Harto datang kasih salam sama semua, sampai di Oom Halim dia pindah. Dia nggak salamin tuh Oom Halim ini. Saya tanya sama Oom, kenapa Oom nggak disalamin sama Pak Harto. Dulu Oom yang tanda tangan itu turun pangkatnya Pak Harto karena dia terlibat di dalam penyelundupan mobil kalau saya nggak salah. Jadi itu yang menyebabkan ia marah, jadi dendamnya panjang, jadi pikirannya panjang, kulitnya tipis. Itulah bangsa Indonesia ini, kebanyakan sekarang ini terutama. Saya rasa barangkali itu jawaban dari saya, mudah-mudahan bermanfaat.

———— 0 ————

C.

**Cinta Bangsa Sebagai Sumber Motivasi
Perilaku Bernegara Bangsa Indonesia
Dan Penyimpangannya**

Dr. Zulrizka Iskandar M.Sc.
Dekan Fakultas Psikologi
Universitas Padjadjaran Bandung/Jatinangor

Pendahuluan

Indonesia pada tahun-tahun ini diguncang berbagai krisis, yang diwarnai oleh tindakan kerusuhan, bahkan ada pula gerakan-gerakan yang menginginkan lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. konflik etnis yang terjadi di Kalimantan Barat, menyebabkan etnis Madura tersingkir dari daerah Sambas. Terlepas dari akar penyebabnya yang sudah sangat mendalam, sebagai warganegara Republik Indonesia, etnis Madura tidak dapat (belum dapat) memasuki daerah Sambas yang berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Konflik yang diwarnai oleh perbedaan agama di Maluku mengakibatkan penderitaan dan tidak bebasnya warga Maluku untuk berpergian di daerahnya yang tertokot-kotak oleh batas daerah tempat tinggal yang berdasarkan agama. Daerah Aceh yang mendapatkan tekanan-tekanan secara militer dalam kurun waktu lama karena perbedaan-perbedaan dari sekelompok masyarakat yang berbeda dengan pemerintah. Sebagai akibat dari tekanan tersebut, muncul gerakan-gerakan yang ingin “merdeka” atau memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peristiwa-peristiwa tersebut menunjukkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia yang multi etnik, multi agama sangat peka terhadap masalah SARA yang dapat menyebabkan disintegrasi.

Berdasarkan permasalahan yang muncul di Indonesia, apakah warganegara Indonesia akan kehilangan sebagai bangsa Indonesia? Apakah warganegara Indonesia sudah tidak mencintai bangsanya lagi, sehingga harus terpecah belah? Apakah mudah untuk melepaskan diri dari suatu negara dan mendirikan negara sendiri?

Menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut diatas, perpecahan suatu negara, secara teoritis mungkin terjadi. Pada konflik-konflik etnik yang terjadi, “golongan rakyat” yang dirugikan atau kelompok etnik yang tertindas oleh “kelompok rakyat” lain ingin menentukan nasibnya sendiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Penentuan nasib sendiri telah menjadi pembenaran internasional yang tertuang dalam Piagam Perserikatan Bangsa-bangsa. Hal ini telah dialami oleh Indonesia, dengan lepasnya propinsi Timor Timur dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Demikian pula dengan Bangladesh yang lepas dari Pakistan dan sebagainya. Namun demikian, di pihak lain rakyat yang didorong oleh nasionalisme yang kuat dan berskala besar menyatakan perlunya satu bentuk pemerintah negara bersama yang dipersatukan oleh bahasa, persamaan asal usul, pengalaman dan kebudayaan. Sebagai contoh adalah berbagai kerajaan di Bismarck, Jerman dan Cavour, Italia bersepakat untuk bergabung

dalam pemerintahan negara bersama dan kekuasaan rakyat yang otonom (Larry Diamond dan Marc F. Plattner, 1998).

Adanya berbagai contoh yang dapat mempersatukan negara dan memecah negara, topik bahasa tentang cinta bangsa Indonesia dan penyimpangannya menjadi sangat relevan dalam mengkaji kondisi Indonesia yang dilanda konflik besar pada saat ini. Pecahnya Negara Kesatuan Republik Indonesia sudah barang tentu tidak diinginkan oleh kita semua. Oleh karena itu, dalam diskusi ini mari kita kembangkan ide-ide yang mengupayakan tegaknya persatuan bangsa Indonesia.

Nasionalisme dan Kebangsaan

Nasionalisme seringkali diperhadapkan dengan liberalisme, sehingga nasionalisme sulit untuk demokrasi. Pandangan tersebut sudah barang tentu dikemukakan oleh liberalisme. Liberalisme merupakan suatu doktrin yang memandang kemerdekaan manusia perseorangan sebagai nilai politik yang utama. Sedangkan nasionalisme lebih mengistimewakan hak kolektif yang didasarkan pada ras, kebudayaan, atau identitas bersama lainnya, sehingga tidak bergantung pada pilihan pribadi. Namun demikian, apakah nasionalisme dan liberalisme identik dengan perbedaan hitam putih dalam demokrasi?

Konsep lain yang berkaitan dengan nasionalisme adalah kebangsaan. Kesadaran diri sebagai bangsa dibentuk melalui pencetakan kepribadian manusia perseorangan. Dimana kepribadian merupakan gaya hidup individu atau cara yang mencirikan seseorang dalam merespon masalah hidup termasuk tujuan hidupnya (Adler). Hal ini berarti bahwa kepribadian manusia adalah mandiri dalam berkehendak untuk menaati peraturan yang ditentukan sendiri. Dengan demikian, seseorang secara mandiri menentukan nasib sendiri dalam menentukan kelompok masyarakat yang mengorganisasikan sebagai bangsa dan membutuhkan adanya mitra dan pengakuan bangsa lain.

Berdasarkan pemahaman tersebut bahwa kebangsaan dan kepribadian mempunyai suatu hubungan logis, sehingga bangsa yang merupakan kumpulan pribadi-pribadi yang sepakat mengorganisasikan dirinya sebagai suatu negara, menuntut penentuan nasibnya sendiri sebagai suatu negara dan mendapatkan pengakuan dari negara lain. Penentuan nasib sendiri dan munculnya nasionalisme yang isothymic (menuntut pengakuan yang sama, penghormatan atas kedaulatan bangsa) merupakan dasar pemahaman universal yang diterima oleh PBB. Bahkan prinsip umum nasionalisme tersebut lebih diterima daripada liberalisme atau ideologi lain pada dunia yang lebih luas, sehingga negara-negara Eropa Barat membuat pola baru persatuan internasional. Sikap hormat antar negara (isothymic) memperkuat identitas bersama. Oleh karena itu, nasionalisme dan kebangsaan merupakan pemahaman yang tidak bertentangan dengan demokrasi dan dapat mempererat persatuan.

Para pendiri bangsa Indonesia telah mempersiapkan negara Indonesia sejak lama, mereka menyadari bahwa Indonesia yang multi etnik harus disatukan. Oleh karena itu, ikrar sebagai bangsa Indonesia dicanangkan pada tahun 1928. Pemikiran yang demikian jauh dicanangkan oleh pendiri bangsa Indonesia, dan isunya masih tetap berkembang dan berlaku, seperti misalnya Uni Eropa. Namun demikian, kondisi

Indonesia sangat menyedihkan. Isu pecah belah mencuat di berbagai daerah. Nampaknya, Indonesia sedang mengalami kemunduran dengan isu tersebut, dan tidak dapat menjaga amanah/wasiat dari pendiri bangsa Indonesia. Cinta bangsa Indonesia perlu ditumbuhkan dengan subur.

Indonesia sebagai bangsa dan mengembangkan nasionalisme adalah sudah tepat. Indonesia yang multi etnik mempunyai karakteristik yang sama yaitu nilai-nilai kolektivistik. Etnik yang ada di Indonesia mempunyai gaya hidup yang bercirikan pertanian. Pada masyarakat bercirikan pertanian disebut *gemeinschaft* (Tonnies). Keluarga tinggal dalam masyarakat tertentu untuk beberapa generasi, dan orang-orang saling mengenal, hubungannya berdasarkan gotong royong, kerjasama kolektif, dan saling percaya.

Kagitsibasi menyebut kolektivistik sebagai budaya yang berhubungan. Masyarakat dengan budaya yang berhubungan tersebut mendasarkan hubungan interpersonal sebagai dasar kemasyarakatan. Menjaga hubungan dan kelompok-kelompok dalam budaya yang berhubungan, sering berkembang menjadi pengkotak-kotakan etnis, regionalism, dan sebagainya. Kondisi demikian sangat rentan untuk perpecahan di satu sisi, tetapi apabila nasionalisme yang *isothymic* (saling menghargai antar etnis dikembangkan) maka perpecahan dapat diatasi dengan baik.

Perilaku Penyimpangan dalam Bangsa

Berbagai kerusuhan, pembunuhan antar golongan, tindak kekerasan, dan tindakan merugikan pihak lain merupakan suatu perilaku yang tidak normal dalam kehidupan masyarakat. Apabila perilaku tersebut tidak normal, maka dapat dikatakan perilaku tersebut adalah menyimpang. Apakah batasannya untuk menentukan menyimpang tidaknya perilaku tersebut?

Untuk menentukan perilaku tersebut menyimpang atau tidak, dapat dikaitkan dengan standar umum masyarakat, yaitu melanggar hukum, norma, atau moral. Peraturan yang tertuang dalam hukum sudah jelas mengatur perilaku seseorang sebagai warganegara yang harus diikuti. Demikian pula dengan moral yang berkaitan erat dengan tanggung jawab dan kewajibannya sebagai manusia, yang berada dalam etika politik aturan negara sangat berpengaruh untuk menentukan perilaku warganegaranya. Aristoteles dalam Franz Magnis-Suseno (1999:15) menyatakan bahwa:

Identitas antara manusia yang baik dan warganegara yang baik hanya terdapat apabila negara sendiri baik.

Tindak kekerasan yang mengakibatkan manusia lain menderita, berdasarkan pemahaman etika politik diatas, merupakan perilaku menyimpang. Hal ini berarti bahwa tanggung jawab dan kewajibannya sesama manusia dan terhadap negara diabaikannya. Kekacauan, keamanan terganggu, kehidupan masyarakat terganggu karena ketakutan akan keselamatan dirinya. Demikian pula halnya perilaku korupsi merupakan suatu perilaku yang menyimpang. Melihat perilaku-perilaku warga bangsa Indonesia pada akhir-akhir ini nampaknya banyak yang masuk ke dalam kategori perilaku menyimpang. Namun demikian, mengapa hukum yang berlaku sebagai

pengatur perilaku politik yang menyimpang tidak terlampau berperan? Apakah kondisi negara juga sedang sakit?

Tindakan atau perilaku politik menyimpang tersebut bukanlah tanpa alasan. Perilaku menyimpang terjadi sejak Orde Baru dan merupakan reaksi dari kondisi politik saat ini. Seringnya perilaku politik menyimpang akhir-akhir ini karena sejak gerakan reformasi muncul, ada suatu negative public mood (pengalaman perasaan yang negatif dalam kehidupan politik setiap harinya). Suasana hati publik yang negatif terhadap kondisi politik muncul sebagai akibat kekecewaan-kekecewaan dan merasa ada perlakuan yang tidak adil. Proses hukum yang tidak memberikan ketenangan pada masyarakat dan negative public mood mendorong untuk perilaku main hakim sendiri. Oleh karena itu, perilaku politik menyimpang akan mudah dijumpai bila sistem negara tidak segera diperbaiki.

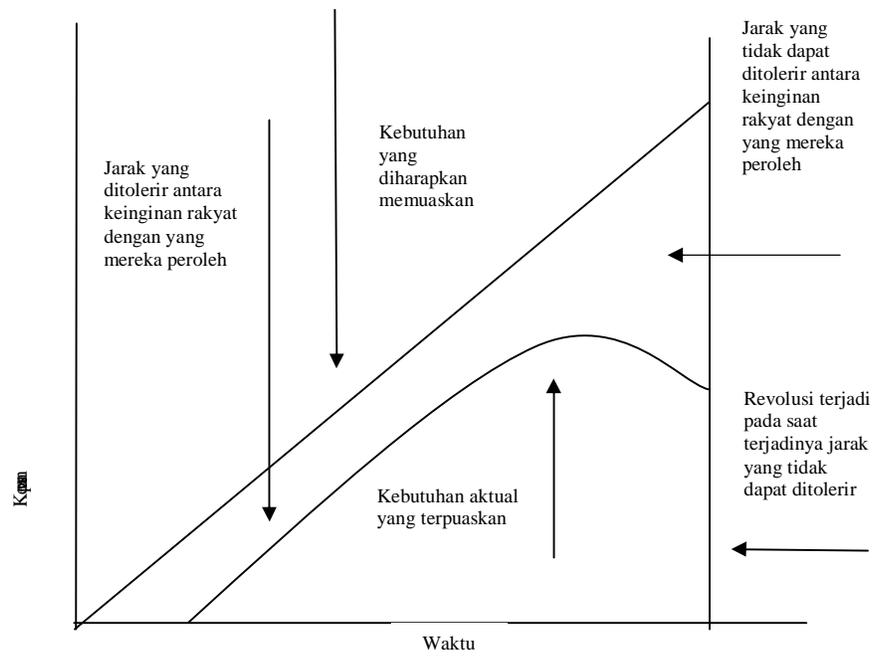
Cinta Bangsa

Cinta bangsa merupakan suatu perasaan positif yang kuat yang dinyatakan atau diungkapkan terhadap bangsanya. Bagaimanakah perasaan cinta bangsa tersebut muncul? Peristiwa-peristiwa yang membanggakan masyarakat atau bangsa, dan diakui oleh bangsa lain, akan memunculkan cinta bangsa. Namun demikian, kondisi bangsa Indonesia yang banyak dilanda kerusuhan dan berbagai krisis merupakan peristiwa-peristiwa yang “memalukan”, sehingga berbagai perasaan negatif muncul dalam menyikapi kondisi politik Indonesia. tidaklah mengherankan apabila ada manusia Indonesia yang merasa malu mengakui sebagai warganegara Indonesia karena kondisi yang memalukan. Tetapi apakah kita akan tetap meratapi peristiwa-peristiwa yang memalukan tersebut?

Elite-elite politik dengan menggunakan gaya demokrasi liberal mengungkapkan berbagai pernyataan. Pernyataan yang simpang siur menimbulkan kebingungan pada kognitif masyarakat. Setiap tokoh kembali pada kelompoknya, sehingga bela membela sudah pada tahap irasional. Kondisi demikian sangat berpotensi untuk terjadi perpecahan. Hal ini menunjukkan bahwa belum adanya kematangan masyarakat dalam berpolitik.

Perlu disadari bahwa situasi Indonesia saat ini adalah sangat kritis. Kesulitan ekonomi atau krisis ekonomi yang belum terselesaikan akan menambah negative public mood. Kehancuran dapat terjadi, apabila situasi politik tidak terselesaikan, sehingga terjadi kegagalan reformasi demokrasi. Oleh karena itu, perlunya merenung kembali untuk memikirkan keutuhan negara Republik Indonesia.

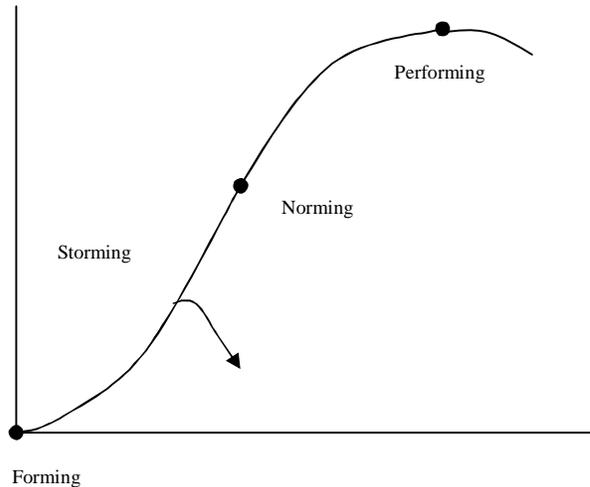
Apakah yang diperlukan oleh bangsa Indonesia saat ini? Untuk dapat keluar dari kemelut yang dialami bangsa Indonesia, dibutuhkan sinergi dari seluruh rakyat Indonesia. Total energy dari seluruh energi rakyat Indonesia diarahkan pada tujuan bersama, yaitu keluar dari krisis ekonomi. Effective energy diarahkan pada pencapaian pembangunan ekonomi. Statement yang membingungkan rakyat akan mengurangi effective energy sehingga maintenance energy lebih banyak digunakan dibandingkan dengan effective energy.



Bagan : Waktu terjadinya revolusi di satu negara (diadaptasikan dari teori Davies)

Sebelum negara Indonesia jatuh pada kondisi yang tidak dikehendaki oleh kita bersama, yaitu adanya revolusi yang dapat merugikan rakyat Indonesia. maka perlu disadari perlunya sinergi. Hal ini berarti bahwa perlunya persatuan bangsa Indonesia. Cinta bangsa dapat digunakan sebagai motivasi untuk merapatkan bangsa Indonesia yang terancam kehancuran. Dengan demikian, nasionalisme perlu diangkat sebagai nilai yang diperlukan untuk mencapai tujuan bangsa Indonesia yang dapat keluar dari berbagai krisis. Bangsa Indonesia yang sedang mengalami storming (situasi yang penuh konflik, hanya melihat dari sisi kepentingan individu, kelompok, atau partai) harus beranjak berkembang ke arah norming (seluruh komponen bangsa berupaya menyelesaikan ketidaksepahaman, ketegangan yang mengancam perpecahan bangsa dengan menetapkan norma-norma, aturan-aturan, dan peran-peran yang membawa pada penyelesaian serta merasa adanya kesatuan, kekompakan sebagai hasilnya), dan kemudian beranjak pada fase performing (mencapai tujuan bangsa, keberhasilan pembangunan, dan sebagainya).

Seluruh komponen bangsa Indonesia pada saat ini perlu menyadari untuk menghentikan pernyataan-pernyataan yang memicu rekasi pihak lain. Konflik – konflik perlu segera diatasi/diselesaikan, demikian pula dengan berbagai ketegangan. Pada saat ini perlu dikembangkan saling menghormati antar komponen bangsa, antar partai, tidak perlu dikembangkan pendapatnya atau pendapat partainya yang paling benar. Sejalan dengan membangun saling menghormati, dibuat aturan-aturan main yang mengarahkan persatuan, dan produktif, dan menjelaskan peran masing-masing dalam membangun bangsa dari situasi keterpurukan.



Bagan: Tahapan Perkembangan Kelompok yang Dianalogikan pada Kehidupan Bangsa

Pemahaman nasionalism dapat dilihat dari dua sisi, yaitu politik dan etnik. Sebagaimana telah diungkapkan mengenai pengertian nasionalisme yang mengistimewakan hak kolektif yang didasarkan pada ras, kebudayaan, atau identitas bersama lainnya, bukanlah sesuatu yang tidak ada resiko apabila nasionalisme dibangun dari multi etnik seperti halnya Indonesia. Para pendiri bangsa Indonesia telah membuat landasan perekatnya dengan Sumpah Pemuda. Tetapi kebanggaan etnik atas zaman keemasannya, asal usul keturunan, dan tradisi-tradisi patriotik tidak dapat diabaikan begitu saja. Ketidak mampuan untuk mengendalikan aspek keetnikan tersebut dapat mengarah pada rasisme. Hal ini terjadi adalah disebabkan karena adanya hambatan dalam mengungkapkan politik secara sehat bagi perasaan kebangsaan.

Apakah gejala tuntutan putra daerah harus memimpin daerahnya merupakan masalah keetnikan yang tidak terkendalikan dan adanya hambatan politik? Nampaknya sejak Indonesia merdeka dasar perekat bangsa dicanangkan pada Sumpah Pemuda mengalami berbagai hambatan. Pemerataan dan keadilan di berbagai bidang belum dirasakan secara sama oleh seluruh etnis yang berada di Indonesia. Oleh karena itu, tuntutan yang bernuansa etnis di Indonesia menjadi isu utama dalam persatuan Indonesia. Oleh karena itu, kekeliruan-kekeliruan di masa lalu harus segera diperbaiki, apabila Indonesia tidak ingin bercerai berai. Dorongan etnik sentris sangat berbahaya dalam persatuan dan kesatuan bangsa.

Cinta bangsa nampaknya harus digalakkan untuk menjadi perekat persatuan dan kesatuan bangsa. Hal ini dikarenakan kita sebagai bangsa Indonesia tidak menginginkan adanya perpecahan negara. Oleh karena itu, komitmen persatuan bangsa, cinta bangsa harus disosialisasikan, dan rasa keadilan harus direalisasikan oleh pemerintah.

Pemberian Maaf, Hukum, dan Rekonsiliasi

Masalah-masalah konflik yang terjadi di Indonesia saat ini sangatlah besar dan banyak sekali. Apakah seluruh kejadian konflik harus diselesaikan secara hukum? Apabila ingin mendengepkan hukum tentu jawabnya adalah “Ya”. Namun demikian, apakah dengan penyelesaian secara hukum permasalahannya dapat terselesaikan dengan baik? Belum tentu. Sebagai ilustrasi berbagai upaya hukum tidak dilakukan untuk menuntaskan masalah pemberontakan atau kerusuhan yang pernah terjadi di Indonesia. Ternyata masalahnya berhenti setelah vonis pengadilan diputuskan. Berbagai rangkaian masalah terjadi mengikuti etelah ketetapan hukum diputuskan. Bahkan setelah pemerintahan berganti, masalah tersebut digugat kembali.

Pertikaian antar etnik pun sering terjadi, seperti yang terjadi di Kalimantan Barat, yaitu antara etnis Madura dengan etnis setempat. Perjanjian-perjanjian merupakan upaya penyelesaian konflik tersebut. Tetapi pelanggaran terhadap perjanjian berulang terus menerus. Konflik antar etnis ini terjadi sejak tahun 1933 sampai sekarang.

Peristiwa-peristiwa tersebut diatas dan cara penyelesaiannya, nampaknya menjadi permasalahan sendiri, dan dapat mengancam persatuan bangsa Indonesia. Bagaimanakah cara yang terbaik? Tentunya untuk penyelesaian masalah konflik tersebut belum ditemukan suatu cara yang terbaik. Hal ini dikarenakan permasalahannya adalah sangat kompleks.

Penyelesaian secara hukum adalah baik, asalkan memenuhi unsur-unsur keadilan. Penyelesaian secara huku sering dimanfaatkan dengan mengatasnamakan kepentingan negara, bangsa, dan rakyat, sehingga hukum dijadikan sebagai sandaran dan digunakan sebagai alat politik. Namun demikian, masalah penyelesaian secara hukum masih merupakan alternatif yang baik, tetapi harus memenuhi berbagai persyaratan. Selain itu pula, penyelesaian secara hukum memerlukan waktu, energi, dan biaya yang cukup besar. Oleh karena itu, apabila akan diambil langkah penyelesaian secara hukum, perlu dilakukan berbagai pertimbangan.

Penyelesaian konflik yang lain adalah tindakan memberikan maaf. Pemberian maaf merupakan suatu tindakan yang disadari. Apabila memberikan maaf ditawarkan sebagai suatu cara, diri kita membebaskan jiwa dari kebutuhan untuk membalas dendam. Memberikan maaf adalah suatu proses yang memfokuskan pada perbaikan dalam diri. Proses dimulai ketika seseorang mempersepsikan orang lain menyakiti dirinya, dan diakhiri secara psikologis, perdamaian dengan fihak yang dipersepsi sebagai menyakitinya. Pemberian maaf ini memang tidak mudah. Berbagai bentuk pemberian maaf dapat terjadi dan dilakukan, hal ini dapat dilihat pada tahapan pemberian maaf pada tabel di bawah ini:

Tahap 1	Pemberian maaf dengan adanya dendam. Saya dapat memaafkannya hanya apabila saya dapat menghukumnya sesuai dengan sakit yang saya rasakan.
Tahap 2	Pemberian maaf bersyarat atau ada penggantian, apabila saya mendapatkan kembali apa yang diambil dari saya, saya dapat memaafkan.
Tahap 3	Saya dapat memaafkan apabila tidak ada lagi tekanan dari orang lain yang mengharuskan saya memberi maaf. Saya memberikan maaf karena orang-orang mengharapkannya.
Tahap 4	Pemberian maaf sesuai dengan aturan. Saya memberikan maaf karena agama mengharuskan.
Tahap 5	Pemberian maaf sebagai keserasian sosial. Saya memberikan maaf karena akan memperbaiki hubungan dalam masyarakat. Memberikan maaf akan mengurangi perpecahan dan konflik di masyarakat.

Tabel: Tahapan Pemberian Maaf

Permasalahan konflik yang terjadi selama ini sudah barang tentu memerlukan berbagai cara penyelesaiannya. Dapatkah pemberian maaf tahap 5 diwujudkan? Tahapan tersebut merupakan suatu proses, karena “percaya” merupakan elemen lain yang harus dikembangkan, terutama dalam proses rekonsiliasi (perdamaian). Rasa percaya harus ditambah dan dikembangkan apabila rekonsiliasi akan dilakukan. Rekonsiliasi adalah suatu proses memperbaiki hubungan yang pecah yang diakibatkan oleh konflik dan digunakan untuk membangun masyarakat kembali. Apabila kita menghendaki adanya rekonsiliasi, maka persyaratan untuk saling percaya, dan tidak saling mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang membangkitkan perasaan-perasaan kurang menyenangkan dan pada akhirnya kepercayaan yang ada menjadi luntur.

Kesimpulan

Cinta bangsa merupakan langkah yang harus ditempuh guna menghindari berbagai pertikaian dan konflik yang terjadi di Indonesia. nasionalisme yang dikembangkan adalah yang saling menghargai, sehingga demokrasi dapat berjalan dengan baik. Hal ini perlu ditegaskan, bahwa nasionalisme Indonesia merupakan salah satu metode perekat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia karena Indonesia yang multi etnik dan bersifat kolektif.

Untuk menyelesaikan masalah konflik, prosedur hukum masih merupakan alternatif yang dapat diterapkan, asal dirasakan adil dan tidak dijadikan alat politik. Alternatif lain adalah dengan memberikan rasa maaf dan rekonsiliasi.

Diskusi

1. MAHMUD MADJID, Forum Masyarakat Bandung Anti Korupsi

Saya betul-betul tidak puas karena para cendekiawan kita hanya berbicara berputar-putar secara teoritis, kemudian implementasi praktisnya di tengah-tengah masyarakat nol besar. Saya mohon maaf bicara seperti ini apa adanya karena kita mencoba mencerdaskan, mencoba mencerahkan segala sesuatu yang perlu kita ungkapkan apa adanya dengan... tentu saja dengan argumentasi. Seperti Bapak menceritakan mengenai nasionalisme, liberalisme, demokrasi dan seterusnya, ini saya kira di bangku kuliah juga diperoleh, Pak. Menjadi pertanyaan kita adalah kalau semua cendekiawan kita pada tataran seperti berbicara lalu rakyat kita ini mau dikemanakan? Nah, bahkan barangkali mulia kita berpikir bahwa paradigma berpikir kita untuk mencerdaskan bangsa itu sudah harus mulai dirubah. Bukan melalui dari seminar-seminar di hotel-hotel dengan AC yang dingin dengan makanan yang mewah. Tapi ada baiknya kita memikirkan untuk mencerdaskan bangsa mulai dari tingkat yang paling bawah, tingkat grassroot, tingkat akar rumput. Saya juga tidak menafikan perlunya pendidikan dan perlunya satu... proses ilmiah berkembang. Tapi tolong dijelaskan bagaimana menjembatani antara kecenderungan intelektual kita dengan keadaan real yang tengah dihadapi masyarakat, karena saya betul-betul melihat bahwa di tengah-tengah masyarakat kita ini seperti dijelaskan ini kok krisis semua, merasa terancam. Tapi sesungguhnya kalau Bapak tahu, di tengah-tengah masyarakat itu sebenarnya di kalangan grass root itu everything is OK. Yang penting, mereka bisa makan, gitu lho. Sementara kita sepertinya mau kiamat gitu membicarakan bangsa ini. Nah, barangkali nalar saya sedikit bias. Tolong diluruskan..

Bahasan:

1. Kalau kita bicara tentang bagaimana untuk generasi kita selanjutnya, generasi penerus, anak, adik-adik kita yang masih SD, SMP, SMA, dan sebagainya. Memang saat sekarang ini pelajaran kekerasan banyak sekali. Contoh-contoh kekerasan banyak sekali ditayangkan di televisi maupun juga di media-media massa. Barangkali perlu kita coba sadari bahwa kondisi demikian tidak bisa diteruskan tentunya. Artinya mau kemana bangsa kita ini, kalau itu yang dipelajarinya. Tentunya kita bisa berawal dari keluarga. Sebetulnya perilaku politik pun merupakan suatu cerminan dari keluarga. Kita bisa berdemokrasi kalau memang orangtua ini sebagai figur otoritas kalau interaksi antar orangtua dan anak ini bisa berdialog dengan baik. Tetapi, kalau misalnya, dulu barangkali orangtua-orangtua kita masih agak feodal, apa yang dikatakan orangtua adalah yang benar, maka kita bisa lihat cerminannya bahwa pemerintah adalah yang paling benar. Jadi kalau dikatakan bahwa kita masih belajar berdemokrasi, yah, memang mungkin, karena cerminan di keluarga pun kita masih belajar untuk si anak berani mengungkapkan pendapat. Ini memerlukan proses sosialisasi, dan harus mulai kita berikan di generasi kita sendiri yang kita masih bisa kendalikan dan berikan contoh. Tapi kalau contohnya juga keliru, maka yang terjadi adalah kekeliruan-kekeliruan lebih lanjut. Dari contoh-contoh kecil, misalnya, orangtuanya melanggar aturan lalu lintas, misalnya, yah, tentu saja si anak mulai melihat, oh, bapak juga berani kok, kenapa saya tidak. Perilaku mana yang akan kita ciptakan sebetulnya.

Saya kira ini harus membutuhkan, dulu zamannya Bung Karno, dikenal dengan national character building. Sejauh mana sekarang kita masih membutuhkan untuk menanamkan nilai-nilai cinta bangsa ini. Tidak seperti misalnya dulu, Aku Cinta Produk Indonesia, tapi yang dibeli pimpinan barang luar negeri, sepatu Bally. Yang musti cinta adalah rakyat, itu sudah tidak konsisten. Dalam modeling saja sudah nggak benar. Nah, itu yang harus ada dalam proses belajar, suatu konsistensi antara model dengan orang yang belajar tadi, yaitu antara pemimpin dan rakyat. Antara pemimpin dan rakyat harusnya dalam suatu segitiga yang menyatu, ini yang barangkali yang harus kita lakukan. Pimpinan harus menyadari tentang kondisi-kondisi tadi. Tentunya pelatihan-pelatihan tentang masalah itu bisa dikembangkan dan masih sangat dibutuhkan untuk negara kita supaya tidak terjadi iklim-iklim kekerasan, anak-anak tawuran dan sebagainya.

2. Saya hanya untuk mengingatkan bahwa mengapa sekarang ini orang berperilaku seperti terutama elite-elite politik berperilaku seolah-olah tidak memperhatikan lingkungan. Saya mengingatkan, kita ini mempunyai ciri masyarakat yang kolektif, bukan individual, bukan seperti masyarakat Amerika yang individualis, sehingga kondisi tadi bahwa kita sebagai bangsa collective society sebenarnya lebih tepat kalau kita mengarah pada nasionalisme yang sifatnya kolektif. Itu yang bisa bangkitkan untuk cinta bangsa. Seringkali ditentang bahwa nasionalisme itu nggak bisa demokrasi dan sebagainya, sebenarnya tidak. Selama kita masih menghargai orang lain, menghargai pendapat orang lain, maka hal tersebut bisa sejalan.

Apakah masyarakat Indramayu yang bertengkar, berkelahi antar desa itu bukan masyarakat bawah. Kalau mereka yang berkelahi siapa yang rugi sebetulnya? Anak-anak berandalan, siapa yang rugi? Di Kalimantan sana, siapa yang rugi? Kembali adalah masyarakat bawah. Jadi ini adalah suatu kondisi konflik yang menurut hemat kami sudah pada suatu kondisi yang betul-betul perlu diperhatikan. Bukan bisa-bisanya orang kampus atau orang ilmuwan mengatakannya itu sebagai suatu hal yang rawan. Apakah kita ingin mempunyai masyarakat yang selalu berkelahi? Kapan kita mau membangun? Kapan kita mau makmur? Kalau dikatakan masyarakat miskin nggak akan jatuh miskin karena memang sudah miskin. Tapi kapan masyarakat miskin itu mau bangun, kalau berkelahi terus? Kerangka ini yang saya kira kita coba angkat untuk supaya kita menyadari betul bahwa konflik yang terjadi di Indonesia itu sudah ada pada tahap-tahap yang rawan, kalau tidak bisa dikelola dengan baik, negara ini, seperti yang saya katakan tadi, revolusi bisa terjadi. Siapa yang rugi? Kembali ke kita semua. Oleh karena itu, saya kira topik dengan masalah cinta bangsa ini, saya kira, suatu hal yang pantas, wajar dan tepat untuk bagaimana kita mengatasi masalah-masalah di Indonesia sekarang ini. Saat sekarang sebenarnya kita butuh suatu sinergi untuk bangsa ini, bukan maintenance energy yang berkelahi terus.

———— 0 ————

Bab IV

PERANAN KELOMPOK SIGNIFIKAN DALAM KEHIDUPAN BANGSA NEGARA INDONESIA DAN PERILAKU POLITIK MENYIMPANG

A. **Perilaku Kelompok Signifikan Dalam Kehidupan Bangsa-
Negara Indonesia Dan Penyimpangan Perilaku Politiknya**

Ferdy Eko Saputro, S.Psi.
Dinas Psikologi Angkatan Darat

Kelompok Signifikan dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara di Indonesia

Semenjak Indonesia merdeka pada tahun 1945, terdapat beberapa kelompok yang menonjol dan menentukan arah serta proses kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada masa awal kemerdekaan sampai dengan tahun 1965, kelompok sipil memegang peranan utama dalam menjalankan aktivitas bernegara. Selanjutnya tahun 1966 sampai dengan pertengahan tahun 1998, kelompok militer mengambil peranan penting dalam menyokong pemerintahan Orde Baru dibawah Presiden Suharto. Setelah melewati masa transisi selama enam belas bulan, bangsa Indonesia kembali dipimpin oleh kelompok sipil dengan terpilihnya Abdurrahman Wahid sebagai Presiden Republik Indonesia.

Berdasarkan perjalanan sejarah selama Indonesia merdeka tersebut, terdapat dua kelompok besar yang memberikan pengaruh bagi perkembangan kenegaraan Indonesia. Kedua kelompok itu adalah kelompok sipil dan militer. Karena kelompok sipil terdiri atas berbagai kelompok dalam masyarakat maka dalam pemaparan ini akan diuraikan tentang beberapa kelompok dalam masyarakat sipil yang dianggap memiliki peranan dalam aktivitas politik bernegara, beberapa kelompok dalam masyarakat itu adalah kelompok cendekiawan, profesional, Islam, Nasionalis, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Interaksi Antar Kelompok Signifikan dalam Aktivitas Bernegaran dan Penyimpangan Perilaku Politiknya

Pada bagian ini akan diuraikan tentang bagaimana interaksi masing-masing kelompok signifikan dalam aktivitas bernegara dalam beberapa fase politik yang telah dilalui oleh bangsa Indonesia

Fase pertama, yaitu antara tahun 1945 sampai dengan tahun 1950. pada masa ini, kelompok sipil memegang peranan utama dalam merumuskan dasar negara, Undang-undang Dasar, dan menentukan sistem berpolitik Indonesia merdeka. Namun, pada masa ini terjadi revolusi fisik melawan penjajah sehingga kelompok sipil tidak memiliki kesempatan untuk membangun sistem politik berdasarkan dasar negara serta

Undang-undang Dasar yang berlaku. Kelompok sipil bekerja sama dengan kelompok militer untuk berjuang memenangkan revolusi dan perjuangan kemerdekaan mengusir penjajah. Berbagai upaya bersama tersebut, diantaranya adalah berbentuk perjuangan fisik mengusir penjajah serta didukung oleh perjuangan melalui jalur diplomasi.

Fase kedua dalam perkembangan politik Indonesia adalah antara tahun 1950 sampai dengan tahun 1959. Periode ini merupakan periode eksperimen sistem politik demokrasi liberal, dengan sistem pemerintahan parlementer. Dalam sistem ini, parlemen memiliki kewenangan untuk membentuk dan menjatuhkan pemerintah sesuai dengan suara mayoritas parlemen. Masalahnya, di dalam parlemen tidak ada satu partai yang memiliki suara mayoritas serta ditambah pula dengan banyaknya pertentangan politik diantara partai-partai politik yang ada di parlemen. Di samping itu, Presiden Sukarno merasa terlalu besar dan kuat untuk berkedudukan hanya sebagai kepala negara, sehingga ia terus-terusan melakukan intervensi dalam proses-proses politik. Akibatnya, instabilitas politik yang terjadi terus-menerus, kabinet setiap saat jatuh dan digantikan oleh kabinet yang baru, politik dagang sapi merajalela yang disusupi oleh kepentingan politik sempit dan primordial. Dalam pada itu, terjadi pula ketidakpuasan di daerah terhadap kepemimpinan para elite politik di Jakarta yang mengakibatkan timbulnya gejala separatisme dan pemberontakan di daerah terhadap kekuasaan pemerintah pusat. Dalam pemberontakan tersebut, banyak tokoh-tokoh militer, juga merupakan putra daerah, terlibat sebagai pemimpin pemberontakan, seperti Andi Aziz, kelompok PRRI-Permesta, Daud Beureuh, dan sebagainya. Ketegangan antara sipil dan kelompok-kelompok militer terjadi pula di pusat pemerintahan yang kadang kala mengancam keselamatan Presiden Sukarno, seperti banyaknya kasus penembakan Istana Negara yang dilakukan oleh anggota militer. Namun pemberontakan-pemberontakan tersebut dapat dipatahkan dengan menggelar berbagai operasi yang dilakukan oleh militer yang masih setia kepada pemerintah Republik Indonesia.

Fase ketiga dalam perkembangan politik di Indonesia adalah antara tahun 1960 sampai dengan 1965, dimana eksperimen demokrasi liberal gagal dan digantikan oleh sistem demokrasi terpimpin. Unsur terpimpin mendominasi sistem politik, sedangkan unsur demokrasinya hampir tidak ada. Segala sesuatunya ditentukan oleh satu orang, Presiden/Panglima Tertinggi/Pemimpin Besar Revolusi. Berbagai partai politik yang pernah berkembang harus tunduk pada kekuasaan presiden. Kelompok Islam yang tidak sepaham dengan presiden dibubarkan dan para pemimpinnya dijebloskan ke dalam penjara. Otomatis, kekuatan politik yang masih berada di bawah bayang-bayang presiden adalah kelompok nasionalis, nomunis, kelompok Islam tradisional (NU), dan kelompok militer. Kekuatan-kekuatan politik tersebut bersaing untuk dapat dekat dengan presiden sehingga dapat mempengaruhi berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh presiden. Kelompok komunis menggunakan segala cara untuk dapat mengalahkan kelompok-kelompok politik yang lain sehingga pada akhirnya kelompok komunis tinggal berhadapan dengan kelompok militer untuk dapat merebut pengaruh terhadap presiden, yang menyebabkan terjadinya peristiwa G30S/PKI.

Fase keempat dalam perkembangan politik Indonesia adalah masa pemerintahan Orde Baru, yang lahir sebagai upaya melaksanakan sistem politik Demokrasi Pancasila dan pada awal kelahirannya didukung oleh militer, kelompok mahasiswa dan pelajar, serta kelompok-kelompok sosial-politik non-komunis lainnya. Pemerintahan Orde Baru merupakan suatu era terpanjang dalam kehidupan politik

Indonesia, yaitu berlangsung antara tahun 1966 sampai dengan Mei 1998. Prestasi ini merupakan hasil dari doktrin Dwifungsi ABRI, yang berhasil mewujudkan stabilitas nasional dengan melakukan depolitisasi partai-partai politik dan kelompok politik yang dianggap dapat mengancam stabilitas nasional.

Salahsatu fungsi ABRI, selain fungsi pertahanan dan keamanan, adalah fungsi sosial politik. Fungsi sosial politik inilah yang menyebabkan ABRI sangat berpengaruh dalam masa pemerintahan Orde Baru ini. ABRI bersama dengan kelompok-kelompok sipil yang mendukung pemerintahan Orde Baru membentuk golongan politik yang berfungsi sebagai alat legitimasi pemerintahan Orde Baru yang bernama Golongan Karya (Golkar). Dengan sokongan dari ABRI, Golkar inilah yang selama tiga dasawarsa selalu memenangkan secara mutlak pemilu yang dilakukan sehingga dapat mempertahankan kekuasaan Presiden Suharto. Fungsi sosial politik inilah yang menyebabkan ABRI dapat melakukan intervensi politik terhadap partai-partai politik serta kelompok-kelompok politik yang dianggap dapat mengancam kekuasaan pemerintahan Orde Baru. Pembentukan Badan Koordinasi Pemantapan Stabilitas Nasional (Bakorstanas) menunjukkan bahwa intervensi militer terhadap kelompok sipil memperoleh jaminan dan diperbolehkan oleh negara, terutama dalam rangka menjaga stabilitas nasional. Stabilitas nasional ini dipersepsikan bahwa segala sesuatu di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan berbagai kebijakan pemerintah sehingga ekspresi politik warganegara harus merujuk pada pandangan pemerintah. Dalam kedudukan itu, ABRI cenderung kurang toleran, peka dan responsif terhadap perbedaan pendapat. Ia juga cenderung mencurigai semua golongan masyarakat di luar ABRI yang berbeda pendapat atau mengkritik pemerintah. ABRI sering terlalu cepat menuduh, dan mengancam pihak-pihak yang mengkritik itu sebagai subversif, ekstrim kiri, ekstrim kanan, anti Orde Baru, tidak Pancasila, menyimpang dari UUD 45, mengancam persatuan dan kesatuan, dan ancaman-ancaman sejenis lainnya. Kemudian, tentara sering menggunakan tangan besi untuk mengatasi huru-hara dan pembangkangan-pembangkangan (atau yang dipersepsikan sebagai pembangkangan) yang timbul, misalnya, dengan memakai peluru tajam, tembak di tempat, menyiksa para tersangka dan saksi-saksi kunci tanpa melalui proses pengadilan, atau menculik aktivis HAM dan demokrasi. Hal ini secara sadar atau tidak sadar sedang membangun suatu budaya politik kekerasan, yang diberi nama Demokrasi Pancasila.

Kekuasaan politik hampir tak terbatas itu ternyata meracuni mental sebagian pimpinan ABRI, pemerintah Orde Baru, serta kalangan sipil yang dekat dengan para penguasa Orde Baru tersebut. Mereka merasa bahwa hukum dapat dimanipulasi, tidak ada lembaga yang dapat menghalangi keinginan mereka untuk meraih segala sesuatu secara semena-mena, korupsi dan kolusi merajalela, nepotisme terjadi dimana-mana dan lain-lain.

Krisis moneter dan ekonomi yang tiba-tiba menerjang Indonesia pada pertengahan 1997, dan berkembang menjadi krisis total dan multidimensional dalam waktu singkat, menyebabkan konsep dwifungsi dipersalahkan karena telah memungkinkan Orde Baru membangun pemerintahan yang paling represif, otoritarian, dan korup yang pernah ada di Indonesia merdeka. Di tengah-tengah protes yang semakin gencar dilakukan oleh berbagai kalangan sipil masyarakat, yang dimulai oleh gerakan-gerakan demonstrasi yang dilakukan oleh para mahasiswa, Presiden Suharto terpaksa meninggalkan kekuasaannya pada tanggal 21 Mei 1998, yang berarti berakhirnya masa kekuasaan pemerintahan Orde Baru.

Fase kelima dalam perkembangan politik Indonesia adalah era transisi menuju kepada reformasi yang dipelopori oleh para mahasiswa, yang dalam bidang politik bertujuan untuk membangun suatu sistem politik yang lebih terbuka dan demokratis. Orde transisi yang berlangsung sekitar 16 bulan memang menunjukkan langkah-langkah awal menuju demokrasi, seperti adanya kebebasan pers, kebebasan membentuk partai politik baru, berhasil melaksanakan pemilu yang paling jujur dan adil sejak 1955, dan terpilihnya Presiden Abdurrahman Wahid secara demokratis melalui manipulasi Poros Tengah dalam sidang MPR.

Namun banyak rintangan yang harus dilalui untuk dapat mewujudkan tuntutan reformasi tersebut, karena banyaknya partai serta golongan politik yang berusaha memainkan peranan politik bernegara, karena tidak adanya pemenang pemilu 1999 yang mayoritas, menyebabkan banyak timbulnya pertentangan politik diantara elite-politik yang dianggap mewakili kelompok-kelompok dalam masyarakat, sehingga pertentangan ini menyebabkan berkurangnya energi bangsa untuk dapat mengatasi berbagai kesulitan ekonomi yang saat ini masih melanda Indonesia. Para politisi yang mewakili golongan Islam tradisional, golongan Islam moderat, golongan nasionalis, dan kelompok partai Golkar bersitegang untuk memperoleh porsi dalam kekuasaan negara. Para pengusaha, yang mapan karena berlingung dibalik kekuasaan Orde Baru, berupaya untuk mencari perlindungan diri dari berbagai tuntutan yang mungkin dapat ditimpakan kepadanya karena kesalahan-kesalahannya pada masa lalu. Para cendekiawan tampaknya masih kebingungan untuk menganalisa permasalahan yang terjadi di Indonesia secara komprehensif sehingga kalangan mahasiswa semakin tidak jelas tuntutan politiknya dan kalangan pengamat politik lebih banyak bersuara seperti layaknya provokator dibandingkan memberikan pemecahan masalah bangsa Indonesia yang sangat rumit karena sudah berlangsung dalam jangka waktu yang lama dan sudah merusak segenap sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Sementara kalangan media massa semakin banyak memberikan informasi politik yang menggambarkan pertentangan politik, ancaman keamanan, serta banyaknya isu-isu politik akibat banyaknya peristiwa politik yang terjadi dalam setiap harinya. Kelompok militer meskipun sudah bertekad untuk mereformasi dirinya, yaitu akan memfokuskan terhadap masalah pertahanan negara, namun masih terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi TNI dalam melakukan proses reformasi, diantaranya TNI belum memiliki satu konsep yang disepakati bersama tentang reformasi internal TNI, belum adanya kesepakatan tentang hubungan sipil-militer, adanya tantangan budaya dan penyesuaian mental, dan lain-lain. Keadaan ini memperparah permasalahan bangsa Indonesia dalam menghadapi milenium ke-3 dimana kita harus segera menyiapkan diri dalam menghadapi berbagai tantangan global yang sudah di depan mata.

Prediksi dan Antisipasi

1. Berdasarkan perkembangan perpolitikan Indonesia sejak kemerdekaan sampai saat ini, bangsa Indonesia belum memiliki penerapan budaya demokrasi politik yang sehat. Oleh karena itu, penerapan demokrasi politik akan berlangsung dalam jangka waktu yang lama dan berlarut-larut apabila para elite politik terus menerus menunjukkan perilaku dan pengeolalaan negara yang tidak demokratis. Meskipun para elite politik mampu menunjukkan perilaku yang demokratis, masyarakat Indonesia masih memerlukan sosialisasi dan praktek penerapan nilai-nilai demokrasi dalam melakukan berbagai aktivitas politik dan bermasyarakat
2. Kelompok-kelompok signifikan di Indonesia terbiasa untuk melakukan aktivitas politik yang lebih mengedepankan kepentingan kelompok dan primordialisme. Untuk antisipasi dalam memperbaiki kehidupan bernegara ke depan diharapkan setiap kelompok politik di Indonesia belajar untuk menghargai kepentingan politik kelompok yang lain serta berupaya untuk mencari solusi yang bersifat win-win dan meletakkan setiap permasalahan bangsa dalam perspektif demi kepentingan bersama
3. Kelompok yang berkuasa terbiasa untuk mempraktekkan kemampuannya memanipulasi hukum yang berlaku, sehingga proses penegakan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, kekuasaan Kehakiman, Kejaksaan, dan Kepolisian harus dapat terbebas dari segala bentuk intervensi kekuasaan sehingga mereka dapat menegakkan keadilan secara merata bagi setiap warganegara
4. Perlu adanya ketulusan niat dari setiap kelompok signifikan untuk tidak menghalalkan segala cara untuk memperoleh tujuan politiknya. Cara-cara memperoleh kekuasaan politik harus berlandaskan pada ketentuan dan mekanisme politik yang berlaku serta harus dihindari persaingan politik yang kotor, seperti fitnah, provokasi, teror dan lain sebagainya sehingga tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara dapat dijaga.

B.

Kecendekiawanan Dalam Perilaku Politik Indonesia

Transkrip Audio Visual

DR. H. Amien Rais

Ketua MPR-RI

Perilaku politik ideal

Karena kita hidup di alam demokrasi dan kita belajar untuk menegakkan demokrasi setelah lama hidup dalam cengkeraman rezim otoriter, baik Orde Lama maupun Orde Baru. Maka pertama-tama perilaku politik yang ideal adalah perilaku yang demokratis artinya bahwa para politisi kita itu betul-betul memegang accountability, jadi rasa tanggung jawab dan rasa akuntabilitas, artinya setiap gerak politik itu harus dapat dipertanggungjawabkan di depan khalayak ramai, di depan Undang-undang negara, maupun secara moral keagamaan di depan Allah, Tuhan Yang Mahaesa. Dan yang kedua, tentu transparansi walaupun politik itu ada sesuatu deal, kesepakatan-kesepakatan yang tidak harus dipublikasikan semuanya, tetapi begitu menyangkut kepentingan publik memang harus transparan sehingga para politisi tidak melakukan deal yang rahasia, yang dapat menjerumuskan kepentingan bangsa dan negara. Yang ketiga, tentu ada fatsoen, sopan santun politik, artinya di dalam membawakan langkah-langkah politik, pemikiran-pemikiran apapun juga para politisi itu memiliki sopan santun politik dengan bahasa-bahasa yang terkendali, bukan dengan bahasa norak, dengan bahasa yang ofensif, yang menyakitkan hati, tetapi tegas, tegar, straight forward, direct, kalau perlu blunt langsung saja tetapi tetap dengan kata-kata yang memang bisa, diterima, santun, bukan dengan kata yang misalnya, ya sudahlah, yang kasar-kasar dan last but not least, ya, menurut saya memang sesungguhnya yang lebih asasi lagi, lebih mendasar lagi, memang perilaku yang bagus, yang bertanggung jawab, yang sedap ditonton itu tentu karena niatan yang benar, kalau niatan benar, dalam orang beragama istilah itu mencari ridha Ilahi, mencari ridha Tuhan. Maka langkah-langkahnya juga, insya Allah, terkendali. Kalau langkahnya, ah saya mau jadi politikus, mau numpuk-numpuk kekayaan, mau koleksi mobil mewah, misalnya, mau mengelembungkan deposito, wah, itu saya kira sejak semula sudah akan rusak perilaku.

Pancasila : Rambu-rambu perilaku politik di Indonesia

Sesungguhnya, kalau kita punya ideologi, Pancasila. Pancasila itu our state ideology, our state philosophy, ideologi dan sifat negara, ya Pancasila itu. Nah, Pancasila itu sebenarnya sudah sangat bagus, ada Ketuhanan Yang Mahaesa, ada Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, bahkan sila terakhir itu juga Keadilan Sosial buat Seluruh Bangsa Indonesia, disamping tentu ada Persatuan Indonesia, kemudian Permusyawaratan Rakyat yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan, dan seterusnya. Nah, dari segi ideologi, sesungguhnya perilaku politik yang

ideologis benar itu yang agamis dan manusiawi. Jadi tidak bisa dilepaskan dari supervisi Tuhan Yang Mahaesa itu. Karena kita yakin sekali seluruh gerak langkah kita di tempat terang maupun gelap, dalam kota-luar kota, dalam negeri-luar negeri, di rumah maupun di pasar, di kantor maupun di jalan raya, itu kan harus etis, harus bermoral. Dari konstitusi saya kira kalau kita lihat, jelas sekali bahwa negara itu diwujudkan, termasuk mereka itu, untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, menolong fakir miskin, untuk membela kaum yang lemah dan lain-lain. Jadi sesungguhnya, dari segi ideologi maupun konstitusi, apalagi konstitusi itu diartikan dengan Undang-undangnya, GBHN-nya, dan lain-lain, itu sudah cukup jelas. Misalnya, GBHN itu mengisyaratkan bahwa pejabat negara harus bertakwa terhadap Tuhan Yang Mahaesa. Kata takwa itu sendiri, kalau dikupas, kalimat syahadat. Hanya saja sekarang, kalau sudah sampai implementasi kita punya bangsa ini agak, mengecewakan. Teori ideologi muluk-muluk, konstitusinya juga sudah bagus walaupun mungkin belum lengkap tapi begitu sampai pada pelaksanaan kita tiba-tiba jadi bangsa yang begitu kendor yah, begitu itu.

Konstitusi sebagai sumber Perilaku Politik

Saya kira tentu harus dihargai karena tentunya mereka ingin mengatakan bahwa sumber dari political behaviour, tingkah laku politik, itu kan pada masing-masing orang. Nah, kalau saya itu, ingat kata-kata seorang pakar bahwa there's no law without morality and there's no morality without religion. There's no law without morality artinya tidak ada hukum tanpa adanya moralitas dan moralitas itu tidak mungkin ada tanpa berakar pada agama. Jadi pendapat itu kalau dikawinkan dengan yang saya katakan tadi itu, yah, tidak masalah.

Perilaku Politik Komponen-komponen Signifikan Negara:

Saya kira apakah Anda di legislatif, apakah Anda di yudikatif, apakah Anda di eksekutif, apakah Anda di badan pengawasan, apakah Anda bergerak di media massa; saya kira sudah ada kode etiknya yang mengatur tingkah laku yang pas, yang dapat diterima, yang etis, yang manusiawi, yang pantas, yang adil, yang wajar. Jadi, buat saya pada umumnya dari segi kaidah agama, norma-norma etik dan moral, bahkan juga tuntutan ideologi-konstitusi, insya Allah, bangsa kita ini sudah cukup. Hanya lagi-lagi, ketika sampai pada melaksanakan itu, implementasinya itu, mungkin ini yang oleh para psikolog perlu mencari mengapa jadi, what's wrong with our nation, what's wrong with us. Jadi diri kita sendiri karena sepertinya disiplin jadi hilang dan kerja keras tidak ada dalam kamus kita. Lantas kesediaan berkorban juga sepertinya samar-samar saja. Padahal untuk enforcement hukum, untuk enforcement peraturan, untuk pemberlakuan kesepakatan, untuk konsensus nasional, dan lain-lain; dibutuhkan kesediaan komitmen yang aktif bahkan juga kesediaan berkorban pada saat-saat dibutuhkan, ini mengapa seperti itu. Saya bukan psikolog, saya tidak bisa memberi tahu, kecuali, ya, saya hanya berpikir pada kaidah-kaidah idda binafsihi, artinya mulailah dari dirimu sendiri, kemudian hasibul qabla an muhassabul, artinya nilailah dirimu sendiri sebelum menilai orang lain. Kalau begitu artinya mengisyaratkan bahwa masing-masing warganegara itu memang sebelum menuding yang lain itu supaya menuding dirinya sendiri, apa yang kurang dalam diri saya sebagai warganegara yang baik itu, apa yang saya bisa kerjakan di masa depan nanti.

Perilaku Komponen Intelektual dalam Perilaku Politik

Kalau praktisi dalam artian praktis betul-betul, kadang-kadang kehilangan visi juga. Saya pun sering dinasehati teman-teman yang bilang sama saya, Bung Amien atau Mas Amien, Anda ini kan politisi, jadi jangan seperti orang kampus dong, kalau bisa itu berbelok-belok, zig-zag gitu, sehingga tidak ketahuan apa maksudnya gitu. Jadi saya tidak mau seperti itu juga. Jadi saya memang terjun ke politik riil atau praktis itu kan dua tahun yang lalu. Sebetulnya saya kan orang kampus, saya guru besar, saya pengamat, saya penulis, mungkin juga sedikit pemikir dan lain-lain. Dan saya sekarang menjadi ketua MPR, saya memimpin sebuah partai terbuka yang sifatnya memang nasional dan merangkul segenap kekuatan golongan, insya Allah, dan memang saya mengalami bahwa seni berpolitik, seni memimpin sebuah kekuatan politik itu memerlukan apa... kesabaran, kecanggihan, kecekatan berpikir, dan lain-lain; tapi juga rasa keadilan saya. Jadi saya sekarang sedang belajar, I'm learning, dan dalam proses learning ini ada orang suka sama saya, ada yang tidak suka, ada yang cukup, ya tapi memang inilah, proses belajar itu tidak sekaligus lantas bisa mendapat nilai A gitu, tapi menuntut next time dan waktu luang.

Peranan Psikologi dalam Perilaku Politik

Saya mengharapkan terms of reference-nya itu sudah menggambarkan tujuannya dan mudah-mudahan sebagian tujuan tercapai. Namun, kalau bisa menambahkan, jadilah psychologist yang mumpuni tolong belajar terus, arungi khazanah psikologi darimana datangnya, dari Barat maupun Timur. Jangan terpaku pada beberapa mazhab atau pada beberapa buku saja. Bukalah pikiran kita ini, kita dengarkan mana yang paling bagus diantara berbagai perspektif dan teori. Dan juga kalau boleh saya menambahkan supaya psikolog kita itu lebih down to earth, lebih meaningful, lebih relevan, dan lebih bermakna, mungkin kalau ilmu psikologi yang dikembangkan tokoh-tokoh dari Barat itu memang to great extent itu dikombinasikan dengan perspektif kita punya agama, kalau psikologi murni betul mungkin juga tidak begitu produktif, sampai-sampai dulu ada buku kecil itu menyiratkan ilmu psikologi yang sama sekali sekuler itu bisa masuk lubang biawak tapi dengan bimbingan wahyu itu, kita mungkin lebih jernih lagi, karena kita manusia mempelajari diri kita sendiri, otak kita digunakan untuk mempelajari mekanisme dan proses berpikirnya otak itu sendiri, nurani kita juga harus menganalisa diri sendiri. Jadi saya kira mungkin disitu lebih bagus kalau jika ada satu hal yang diatas akal kita yang sempit ini, yang pas-pasan itu, yang bisa menunjukkan persepsi yang lebih jauh. Saya kira begitu saja.

C.

Perilaku Kelompok Signifikan dalam Kehidupan Bangsa dan Negara Indonesia dan Penyimpangannya¹

Letjen TNI (Purn) A. Hasnan Habib

Pendahuluan

Salahsatu kelompok signifikan dalam kehidupan bangsa dan negara Indonesia sejak proklamasi 1945 sampai saat ini, bahkan pernah dalam suatu kurun waktu tertentu mendominasi kehidupan politik bangsa dan negara, adalah kelompok militer (TNI, khususnya, TNI AD). Meskipun terdapat kelompok-kelompok signifikan lainnya, namun makalah ini membatasi penyorotannya pada kelompok militer saja.

Menggambarkan perilaku politik kelompok militer selama ini adalah lebih mudah ketimbang mengemukakan penyimpangan-penyimpangannya. Hal ini disebabkan terutama sekali oleh karena kita dapat melihat suatu penyimpangan jika ada tolak ukur perilaku yang seharusnya. Sedangkan kehidupan politik bangsa dan negara kita sejak lahir tidak pernah membangun suatu sistem politik secara berkelanjutan yang akan dapat menciptakan suatu budaya politik tertentu yang mencerminkan sikap (attitude), perasaan, kepercayaan, cita-cita, dan norma-norma hidup bangsa-negara yang dapat dilihat dari respon-respon perilaku bangsa-negara itu dalam semua situasi yang dihadapinya. Selama revolusi fisik (1945-50) jelas tidak ada kesempatan sama sekali membangun sistem politik. Segala sesuatunya dipusatkan kepada memenangkan revolusi dan perang kemerdekaan. Meskipun UUD 45 sudah diberlakukan sejak tanggal 16 Agustus 1945, namun pelaksanaannya menyimpang sama sekali. Pertimbangan-pertimbangan politik dan strategi perjuangan jauh lebih mendominasi usaha menanamkan budaya politik dan pembangunan dan penataan lembaga-lembaga politik yang dapat dianggap paling cocok untuk bangsa ini.

Periode berikutnya (1950-59) merupakan periode eksperimen sistem politik demokrasi liberal, dengan sistem pemerintahan parlementer. Eksperimen ini mengalami kegagalan, tidak saja karena para elite partai politik langsung terjun ke sistem demokrasi liberal yang tidak pernah ada akarnya di Indonesia, tetapi juga karena Presiden Sukarno terlalu besar dan kuat untuk puas berkedudukan hanya sebagai kepala negara, sehingga ia terus-terusan melakukan intervensi dalam proses-proses politik. Akibatnya ialah instabilitas politik terus menerus. Pemerintah tiap sebentar berganti, dagang sapi merajalela, kepentingan politik sempit dan primordial merajalela.

¹ Makalah untuk Seminar Nasional Perilaku Politik Menyimpang dan Prospek Kehidupan Bangsa-Negara Indonesia dalam Milenium III, Bandung 15 Juli 2000. Isinya banyak diambil dari makalah penulis pada seminar yang diselenggarakan oleh Yayasan Dharmapena Indonesia di Surabaya, 12 November 1956 dengan adaptasi seperlunya.

Eksperimen demokrasi liberal gagal, diganti oleh demokrasi terpimpin. Unsur terpimpin mendominasi sistem politik, sedangkan unsur demokrasinya hampir tidak ada. Segala sesuatu ditentukan oleh satu orang, Presiden/Panglima Tertinggi/Pemimpin Besar Revolusi. Ciri khas periode ini adalah api revolusi abadi yang harus dinyalakan terus, tidak saja dalam dimensi nasional melainkan juga dalam dimensi internasional, yang dikenal dengan konfrontasi NEFOs vs OLDEFOS dalam rangka menghapus kolonialisme/neo-kolonialisme dan imperialisme/neo-imperialisme sampai ke akar-akarnya. Bahkan juga PBB ditantang dan hendak disaingi dengan keinginan membentuk organisasi tandingan: NEFOs. Akibatnya? Gagal total. Melalui peristiwa traumatik dan tragedi dinihari 1 Oktober 1965 yang dikenal sebagai peristiwa G30S/PKI.

Peristiwa itu membuka pintu bagi era berikutnya, era Orde Baru, suatu era terpanjang dalam kehidupan republik ini. Sistem politik yang dibangun dengan gegap gempita adalah sistem Orde Baru dengan label Demokrasi Pancasila. Jika saat-saat permulaan Orde Baru terkesan ditandai oleh semangat sungguh-sungguh untuk melaksanakan UUD 45 dan Pancasila “secara konsekwen dan semurni-murninya”, semakin lama, terutama sekali dalam paruh kedua, Orde Demokrasi Pancasila mengalami metamorfose menjadi orde rezim otoritarian, atau orde rezim militer yang didukung penuh oleh kelompok militer dan Golkar. Tetapi pada tahun-tahun menjelang jatuhnya Orde Baru ini, kekuasaan politik hampir sepenuhnya berada dalam tangan satu orang: Presiden Suharto. Peranan politik kelompok militer direduksi menjadi hanya sebagai kaki tangan, pelaksana, dan pengaman belaka dari keinginan-keinginan politik Presiden Suharto.

Jatuhnya rezim Orde Baru pada bulan Mei 1998 melahirkan era transisi menuju reformasi yang dipelopori oleh para mahasiswa, yang dalam bidang politik bertujuan ialah membangun suatu sistem politik yang lebih terbuka dan demokratik. Orde transisi berlangsung hanya sekitar 16 bulan saja. Memang ada langkah-langkah awal yang mengindikasikan arah menuju demokrasi, seperti kebebasan pers, berdirinya sekitar 150 partai politik baru, 48 diantaranya memenuhi syarat untuk ikut dalam pemilu, dibebaskannya secara selektif tahanan-tahanan politik, pemilu 1999 yang dinilai sebagai pemilu paling luber dan jurdil sejak 1955. Pemilu menghasilkan DPR dan MPR baru (meskipun masih banyak muka-muka lama) dan terpilihnya secara voting (pertama kali sejak Orde Baru) presiden baru, Abdurrahman Wahid. Harapan rakyat menjulang tinggi, terlalu tinggi untuk seorang presiden yang dipilih melalui manipulasi Poros Tengah dan kabinet yang ditentukan dan digaransi oleh lima orang. Akibatnya: situasi politik dan keamanan menurun drastik yang sangat memprihatinkan, ancaman disintegrasi, konflik-konflik horizontal bahkan vertikal yang meluas dan kadang tidak menentu.

Dari uraian ringkas diatas itu jelas tidak adanya tolak ukur yang reliable untuk menilai apa dan dimana terjadinya penyimpangan-penyimpangan perilaku kelompok-kelompok signifikan, termasuk kelompok militer. Namun demikian, tetap akan dicoba melakukan penilaian itu dengan berpedoman pada beberapa konsensus umum (universal) menyangkut sistem politik demokrasi yang dalam makalah ini mengenai semua kelompok signifikan. Dilanjutkan kemudian dengan menilai perilaku dan penyimpangan perilaku politik kelompok militer dengan menggunakan kode etik kelompok itu sendiri sebagai tolak ukur, Sapta Marga. Dalam bagian pertama, beberapa konsensus umum/universal akan dicoba mengenal masalah-masalah sekitar

demokrasi dan demokratisasi di dunia, yang sejak jatuhnya sistem komunisme dan bersamaan dengan proses globalisasi yang meningkat telah menjadi salah satu unsur sangat penting dari politik luar negeri dari negara-negara Dunia Ketiga, negara-negara kapitalis-liberal-demokrasi, bersamaan dengan HAM dan lingkungan hidup.

Beberapa Isu Penting tentang Demokrasi

Gelombang Demokrasi dan Anti-demokrasi

Masalah demokrasi bukan menonjol akhir-akhir ini saja. Ia telah menjadi subjek perdebatan dan perjuangan selama dua abad. Para pemegang kekuasaan kadang-kadang mengklaim bahwa mereka memerintah atas nama rakyat, dan klaim itu kadang-kadang ditantang oleh gerakan-gerakan sosial. Pada kurun-kurun waktu tertentu dalam sejarah demokratisasi, gerakan-gerakan tertentu memainkan peran-peran khusus, diantaranya gerakan untuk menghapus perbudakan, gerakan kaum buruh, gerakan hak-hak wanita. Pada waktu-waktu lain, para pemegang kekuasaan yang reform-minded dalam suatu negara mencoba meniru praktek-praktek dari negara-negara lain. Proses-proses demikian senantiasa menghasilkan redefinisi dari makna demokrasi.

Selama dua abad itu mencuat momen-momen sejarah tertentu: momen-momen dimana demokrasi dibicarakan dimana-mana, pemerintah-pemerintah melakukan reformasi, gerakan-gerakan sosial menuntut demokrasi. Jika momen-momen demikian itu terjadi di banyak negara secara bersamaan, maka terjadilah gelombang demokratisasi. Dewasa ini dunia sedang mengalami salah satu dari gelombang demokrasi itu.

Setelah komunisme jatuh, ide demokrasi semakin meluas ke hampir seluruh penjuru dunia. Proses demokratisasi global mulai di Eropa Selatan hampir seperempat abad yang lalu, kemudian menjalar ke Amerika Latin dan Asia, disebut sebagai salah satu ciri dari proses globalisasi yang semakin kuat, disamping HAM yang semakin disadari dan dihormati dan meningkatnya ketergantungan antar bangsa. Dalam dasawarsa 1990an kebanyakan negara mengklaim bahwa negaranya adalah negara demokrasi, sedangkan negara-negara yang otokratik sering berkilah bahwa langkah-langkah rezimnya yang tidak demokratik itu hanya merupakan suatu fase antara yang terpaksa harus diambil dalam perjalanan panjang dan sulit mencapai demokrasi sebagai tujuan akhir.

Namun dekade 1960 dan tahun-tahun pertama dekade 1970 adalah dekade yang penuh keraguan mengenai masa depan lembaga-lembaga demokrasi. Uni Soviet dan sekutu-sekutu komunis dan klien-kliennya tampak berhasil baik dalam menindas disensi dan menguasai opini melalui lembaga-lembaga negara. Bagian terbesar dari Amerika Latin berada dibawah kekuasaan berbagai kekuatan anti-demokratik. Di Afrika, demokrasi-demokrasi pasca penjajahan runtuh dan digantikan oleh para pemimpin militer dan presiden-presiden seumur hidup. Di Asia, harapan bermulanya evolusi demokrasi kandas oleh berbagai undang-undang keadaan darurat/militer dan kekerasan-kekerasan massa. Bahkan juga di Amerika Serikat dan Eropa Barat, jantung demokrasi, protes-protes anti-pemerintah berkembang jadi aksi-aksi terorisme, penculikan, pemboman, penyanderaan, hijacks, dsb.

Tetapi secara tiba-tiba, pertengahan dasawarsa 1970 sampai pertengahan dasawarsa 1990, gelombang anti-demokrasi itu berbalik menjadi gelombang demokrasi. Negara-negara anti-demokrasi di Eropa, Amerika Latin, Asia, Timur Tengah, dan Afrika secara mendadak merangkul prinsip-prinsip demokratik. Lebih mencengangkan lagi, pada tahun 1989 satu demi satu rezim komunis tumbang digantikan oleh pemerintah-pemerintah demokratik, setidaknya mengaku demokratik. Mengapa hal itu terjadi? Terlalu kompleks permasalahannya, dan berada jauh diluar lingkup makalah ini untuk dijelaskan.²

Menurut Huntington, gelombang demokrasi yang seolah-olah datang mendadak itu adalah gelombang ke-3 dari demokratisasi global, yang mulai pada tahun 1974, yaitu tahun ditumbangkannya rezim diktator Portugal.³ Ia mendefinisikan gelombang demokrasi sebagai suatu “kelompok transisi dari rezim-rezim non-demokratik ke demokratik yang terjadi dalam suatu kurun waktu tertentu yang jumlahnya melebihi secara signifikan transisi-transisi yang terjadi sebaliknya.” Gelombang ke-1 berlangsung lambat dan lama, hampir satu abad, mulai tahun 1828 sampai dengan tahun 1926, gelombang ke-2 dari tahun 1943 sampai tahun 1964. Yang menarik ialah bahwa setiap gelombang demokrasi itu diakhiri oleh gelombang balik, yaitu jatuhnya rezim-rezim demokratik. Yang pertama berlangsung dari 1922-42, yang kedua dari tahun 1966-75. Gelombang balik ini mengakibatkan setback parah mengenai kebebasan politik, hak-hak asasi, dan perdamaian. Oleh karena itu, sangat penting bagi semua negara yang mendambakan perdamaian untuk berupaya bersama-sama dengan semua lembaga dunia mencegah terjadinya gelombang balik ketiga.

Ekspansi demokrasi gelombang ke-3 itu cukup mengesankan. Terutama sejak jatuhnya rezim komunis dan berakhirnya perang dingin, proses demokrasi yang terjadi merupakan terobosan yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Sejak tahun 1990 jumlah dan presentase negara demokrasi meningkat setiap tahun. Jika pada tahun 1974 (permulaan gelombang ketiga) hanya ada 39 negara demokrasi dari 142 negara merdeka (27,5%), pada tahun 1990 meningkat menjadi 76 dari 145 negara merdeka (46,1%) dan pada akhir tahun 1995 jumlah itu menjadi 117 dari 191 negara merdeka (63,1%).⁴ Tetapi tidak semua negara itu merupakan negara demokrasi liberal. Sejak tahun 1990 pertumbuhan negara demokrasi liberal telah stagnan. Proporsi demokrasi liberal terhadap jumlah total negara demokrasi menurun dari 85,5 persen pada tahun 1990 (65 dari 76 negara) menjadi 65 persen pada tahun 1995 (76 dari 117 negara), namun dalam jumlah total meningkat (dari 65 tahun 1990 menjadi 76 tahun 1995). Ini menunjukkan bahwa kualitas demokrasi dari banyak negara demokrasi baru itu masih memerlukan peningkatan.⁵

Meskipun hasil akhirnya menggembirakan, namun transformasi politik dalam gelombang ketiga tidak hanya berlangsung satu arah. Gelombang balik juga terjadi.

² Untuk pengertian lebih mendalam mengenai gelombang-gelombang demokrasi dan anti-demokrasi serta sebab-sebabnya, baca: John Markoff, 1996, *Waves of Democracy: Social Movements and Political Change*, Pine Forge Press.

³ Samuel P. Huntington, 1991, *The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century*, Norman: University of Oklahoma Press.

⁴ Lihat Larry Diamond, 1996, *Is the Third Wave Over?*, *Journal of Democracy*, July 1996: 26

⁵ Menurut penelitian, demokratisasi gelombang ke-3, terutama sejak hancurnya komunisme, didasari motivasi untuk memperoleh simpati dan bantuan ekonomi dari negara-negara demokrasi liberal, terutama negara-negara besar Barat.

Dalam enam tahun pertama, lima negara mengalami keruntuhan atau erosi demokrasi. Sungguhpun kecenderungan umum menunjukkan pertumbuhan jumlah negara demokrasi, namun selama tahun 1974-91 sejumlah 22 negara mengalami keruntuhan demokrasi, dan sesudah tahun 1991 telah terjadi pula beberapa keruntuhan lagi.

Pada sisi lain, proporsi rezim otoriter menurun drastik menjadi 22,9 persen pada tahun 1991 (42 dari 183 negara) dari 46,2 persen pada tahun 1972 (67 dari 145 negara). Dan sejak itu turun lagi menjadi 20,4 persen pada tahun 1992 (38 dari 186 negara), tetapi kemudian naik menjadi 27,7 persen pada tahun 1995 (53 dari 191 negara). Hasil umumnya menunjukkan semakin berkurangnya negara otoriter, yaitu hampir separuh (46,2 persen) pada permulaan gelombang ke-3 tahun 1974 menjadi sedikit dibawah 28 persen pada tahun 1996.

Makna konsep demokrasi

Seperti telah dijelaskan diatas, pada akhir tahun 1995 terdapat antara 76-117 negara demokrasi, tergantung dari bagaimana cara kita menilai. Bagaimana cara menilai adalah sangat penting, karena ia fundamental tentang apa yang kita artikan dengan demokrasi. Terdapat kekaburan konseptual dan keamburadulan kepustakaan tentang demokrasi itu. Dua orang ilmuwan politik Barat mengidentifikasi lebih dari 550 pengertian dan sub tipe demokrasi.⁶ Banyak diantaranya merupakan bentuk-bentuk demokrasi yang disunat dan tumpang tindih satu sama lain. Namun kebanyakan konsepsi demokrasi dewasa ini—berbeda dari tahun-tahun 1960an dan 1970an, misalnya—sepakat bahwa demokrasi adalah suatu sistem kewenangan/kekuasaan politik, terpisah dari segi apapun dari sistem ekonomi dan sosial. Walaupun demikian, perbedaan-perbedaan mendasar tentang konsep demokrasi masih tetap ada, terutama mengenai luas dan tingkat atribut-atribut politik yang tercakup didalamnya.

Ada beberapa pengertian minimalis dari demokrasi yang diambil dari konsep demokrasi Schumpeter (1947: 269), yaitu sebagai “suatu sistem untuk mencapai keputusan-keputusan politik dalam sistem mana perorangan mempunyai kekuasaan menentukan melalui perjuangan kompetitif guna memenangkan suara rakyat” (a system for arriving at political decisions in which individuals acquire the power to decide by means of a competitive struggle for the people’s vote). Banyak pakar ilmu politik memberi tekanan pada “kompetisi memperoleh suara rakyat/para pemilih” sebagai intisari dari demokrasi. Pengertian demokrasi demikian itu merupakan pengertian minimalis, disebut demokrasi elektoral. Dikatakan minimalis, karena betapapun sentralnya pemilu dalam demokrasi, tetapi pemilu terjadi hanya secara berkala dan hanya memberi peluang kepada rakyat untuk memilih alternatif-alternatif yang dikemas oleh orsospol dalam bentuk yang sangat umum atau sangat agregatif.

Oleh karena itu, definisi Schumpeter itu memerlukan elaborasi lebih lanjut yang lebih luas dari hanya kriteria pemilu saja. Elaborasi yang paling terkenal adalah

⁶ Lihat David Collier and Steven Levitsky, 1996, *Democracy with Adjectives: Conceptual Innovation in Comparative Research*, unpublished manuscript, Dept of Political Science, University of Berkeley, seperti dikutip dalam Larry Diamond, 1996, *Is the Third Wave Over?*, *Journal of Democracy*, July 1996: 26

konsep polyarchy dari Robert Dahl, yang menginginkan tidak saja perlu adanya kompetisi dan partisipasi politik yang lebih luas dari rakyat tetapi juga terdapat tingkat-tingkat kebebasan sipil yang substansial (berbicara, pers, agama, berpendapat/berpikir, berkumpul, dsb) dan pluralisme, sehingga memungkinkan rakyat membentuk dan menyatakan preferensi-preferensi politiknya secara bermakna.⁷

Pengertian minimal dewasa ini atau demokrasi elektoral menghendaki supaya kompetisi dan partisipasi itu mempunyai makna, perlu adanya kebebasan-kebebasan sipil minimal. Disamping itu perlu diwaspadai bahwa suatu pemilihan multipartai kendati dilakukan secara *luber*, dapat dengan efektif meniadakan peluang bagi beberapa kelompok rakyat yang kurang disenangi dalam bertanding memperoleh kursi atau memajukan dan melindungi kepentingannya. Demokrasi elektoral saja juga dapat membiarkan kelompok-kelompok signifikan mengambil keputusan-keputusan diluar aturan main, melalui bidang-bidang diluar jangkauan pengawasan atau pengendalian para pejabat terpilih (*reserved domains*). Misalnya, pimpinan kelompok militer yang mengambil keputusan-keputusan politik keamanan (dalam dan luar negeri), sedangkan ia tidak dipilih oleh dan tidak bertanggung jawab kepada rakyat.

Jauh lebih luas daripada demokrasi elektoral (atau juga disebut demokrasi formal) ialah demokrasi liberal. Selain daripada pemilihan yang teratur secara berkala, *luber*, dan *jurdil*, ia juga:

1. Tidak menghendaki adanya *reserved domains* bagi militer atau kekuatan-kekuatan sosial dan politik lainnya yang tidak *accountable* kepada para pemilih (rakyat), baik secara langsung atau tidak langsung.
2. Harus ada *accountability* vertikal, yakni pertanggung jawaban dari pemegang (yang dipercaya memegang) kekuasaan kepada yang memberi kekuasaan (rakyat) dan pertanggung jawaban horisontal (ke samping), yaitu antara para pemegang kekuasaan satu sama lain (misalnya, antara eksekutif dan legislatif), sehingga tercipta suatu sistem *checks and balances*; sistem *checks and balances* ini membantu melindungi konstitusi, menegakkan *rule of law* dan menjamin berlangsungnya proses musyawarah.
3. Memuat ketentuan-ketentuan tentang pluralisme civic dan politik serta kebebasan-kebebasan perorangan dan kelompok.

Secara lebih lengkap, beberapa ciri suatu demokrasi liberal ialah:⁸

- Kekuasaan berada pada pejabat-pejabat yang dipilih, tidak pada orang-orang atau pejabat-pejabat yang tidak dipilih (misalnya, pejabat-pejabat militer). Hal ini sangat jelas pada sistem pemerintahan parlementer
- Kekuasaan pemerintah eksekutif dibatasi oleh konstitusi dan *accountable* kepada lembaga-lembaga pemerintah lainnya (kehakiman yang bebas, parlemen, ombudsman, dan badan pemeriksa keuangan).

⁷ Robert A. Dahl, 1971, *Polyarchy: Participation and Opposition*, New haven: Yale University Press

⁸ Larry Diamond, *op.cit.*: 23-34

- Hasil pemilu tidak boleh direayasa dan diketahui sebelumnya; pihak oposisi harus memperoleh peluang untuk menang, serta harus ada kemungkinan pergantian partai yang memerintah. Selain daripada itu, tidak boleh ada kelompok yang berpegang pada ketentuan-ketentuan konstitusi, dikebiri haknya untuk membentuk partai dan ikut pemilu.
- Kelompok-kelompok kultural, etnik, agama, dan minoritas, tidak boleh dilarang (berdasarkan hukum maupun dalam praktek) untuk menyatakan dan memperjuangkan kepentingan-kepentingannya dalam proses politik untuk menggunakan bahasa dan budayanya.
- Selain melalui partai dan pemilu, rakyat mempunyai banyak saluran dan sarana lain untuk menyuarakan kepentingan dan nilai-nilai yang dianutnya, bebas membentuk atau menjadi anggota berbagai macam perkumpulan/perhimpunan yang otonom, gerakan dan kelompok
- Selain dari kebebasan berasosiasi dan pluralisme, terdapat pula sumber-sumber alternatif informasi, termasuk media massa/pers yang bebas
- Perorangan mempunyai kebebasan substansial mengenai kepercayaan/beragama, pendapat, berdiskusi, berbicara, publikasi, berkumpul, berdemonstrasi, dan menyampaikan petisi.
- Semua warga adalah sama dalam undang-undang, kebebasan-kebebasan perorangan maupun kelompok, dilindungi secara efektif oleh kehakiman yang bebas dan tidak berpihak serta semua keputusannya dihormati dan dilaksanakan oleh semua kekuasaan lainnya.
- Rule of law melindungi semua warga dari penahanan yang tidak sah dan tidak beralasan, pengasingan, teror, penyiksaan, dan campur tangan yang tidak semestinya dalam kehidupan pribadinya, tidak saja oleh negara melainkan juga oleh kekuatan-kekuatan terorganisir anti-pemerintah

Selain bentuk-bentuk demokrasi elektoral dan demokrasi liberal, terdapat pula bentuk ketiga. Rezim bentuk ketiga itu yang lebih minim lagi daripada demokrasi minimalis, tetapi masih dapat dibedakan jelas dari rezim yang benar-benar otoriter, ialah demokrasi pseudo (palsu). Dalam demokrasi palsu itu secara legal masih diizinkan kehadiran partai-partai oposisi dan mungkin juga terdapat ketentuan konstitusional seperti dalam demokrasi elektoral. Tetapi suatu persyaratan krusial tidak ada, yaitu peluang yang fair dalam berkompetisi yang memungkinkan kalahnya partai yang berkuasa (partai pemerintah) dan dengan demikian kehilangan kekuasaan untuk memerintah. Ada banyak variasi dalam demokrasi pseudo, tetapi tidak dijelaskan dalam makalah ini. Yang membedakan demokrasi pseudo dari rezim otoriter adalah bahwa demokrasi pseudo mentolerir kehadiran partai-partai oposisi yang bebas, sedangkan rezim otoriter sama sekali tidak membolehkan adanya partai oposisi.

Militer dan Demokrasi

Militer adalah lembaga yang paling tidak demokratis dalam pengalaman manusia. Kebiasaan-kebiasaan dan prosedur-prosedur dalam perang secara alamiah bertolak belakang dengan kemerdekaan perorangan dan kebebasan-kebebasan sipil yang merupakan nilai-nilai tertinggi dalam masyarakat-masyarakat demokratis. Oleh karena tujuan fundamentalnya, bahkan pembenaran kehadirannya (*raison d'être*) adalah untuk bertempur dalam konflik bersenjata, lembaga-lembaga militer didesain untuk kekerasan dan koersi. Melalui masa berabad-abad, ia telah mengembangkan struktur organisasi, prosedur-prosedur bertugas (*operating procedures*), dan nilai-nilai individual yang diperlukan untuk berhasil dalam perang. Kewenangan dan kekuasaan dalam militer menekankan hirarki sedemikian rupa, sehingga perorangan dan satuan-satuan bertindak sesuai dengan keinginan komandan dan mampu menghadapi keadaan fisik terburuk dan tekanan mental berat.

Sementara banyak diantara nilai-nilai profesional militer—keberanian, kejujuran, kesediaan berkorban, integritas, loyalitas, pengabdian—merupakan nilai-nilai yang paling tinggi dalam pengalaman manusia, namun norma-norma dan prosedur-prosedur yang intrinsik pada lembaga-lembaga militer berbeda demikian besarnya dari premis-premis suatu masyarakat yang demokratis, sehingga hubungan antara keduanya secara inheren mengandung konflik yang kadang-kadang menimbulkan instabilitas. Perilaku militer merupakan imperatif-imperatif fungsional. Apabila suatu masyarakat dikendalikan oleh gagasan-gagasan pribadi atau oleh perspektif-perspektif militer yang telah berkembang selama berabad-abad untuk mengabdikan negara dan berkorban dalam perang, maka setiap warga (dan tujuan nasional) akan tunduk kepada keamanan nasional, dengan mengabaikan atau paling sedikit menomorduakan kebutuhan-kebutuhan dan konsern-konsern lainnya. Persoalan bagaimana menjamin bahwa militer tunduk dibawah kekuasaan politik sipil merupakan salahsatu masalah tertua dalam sejarah pemerintahan. Dalam abad ke-20 ini saja, penguasaan sipil terhadap militer merupakan konsern negara-negara demokrasi seperti Amerika Serikat dan Perancis, juga konsern dari rezim-rezim komunis seperti Uni Soviet dan RRC, dari diktator fasis di Jerman dan Italia, dan sejak tahun 1945 dari sekian banyak negara-negara di Afrika, Asia, Amerika Latin. Apakah dan bagaimana suatu masyarakat mampu mengendalikan suatu lembaga yang memiliki kekuatan untuk koersi fisik dan menjamin loyalitasnya kepada pemerintah yang berkuasa, adalah sangat mendasar bagi suatu pemerintahan demokratis.⁹ Masalahnya ialah: bagaimana mencegah militer yang dibentuk untuk mengamankan negara dari ancaman kekerasan bersenjata, justeru memperkosa hak-hak sipil dan politik rakyat biasa. Suatu lembaga totaliter bersenjata yang dilahirkan, dibina, dan ditanamkan kebiasaan-kebiasaan untuk bersedia mati dalam situasi kekerasan bersenjata, demi keamanan dan kemerdekaan bangsa dan negara, pada saat bersamaan memang dapat memunculkan bayangan yang menyeramkan, bahwa ia akan mengambil alih kekuasaan negara yang membentuknya itu dan menciptakan suatu *garrison state* dengan dalih demi keamanan. Aforisme Lord Salisbury, seorang negarawan Inggris (1830-1903) sangat relevan dengan konsern itu. Ia berkata, “jika anda percaya dokter, tak ada yang sehat; jika anda percaya rohaniwan, tak ada yang tak berdosa; dan jika anda percaya tentara, tak ada yang aman (*if you believe the*

⁹ Baca Richard H. Kohn, 1997, *How Democracies Control the Military*, *Journal of Democracy*, Oct. 1997: 140

doctors, nothing is wholesome; if you believe the theologians, nothing is innocent; if you believe the soldiers, nothing is safe).”¹⁰

Penguasaan sipil dewasa ini mempunyai arti yang sangat signifikan di dunia. Di seluruh dunia paska-komunis, masyarakat-masyarakat sedang berjuang membangun lembaga-lembaga demokrasi. Dalam upaya mendorong demokratisasi, Amerika Serikat dan negara-negara Barat lainnya, menggunakan masalah kekuasaan sipil sebagai ukuran kemajuan suatu negara menuju demokrasi. Kendati demokrasi sedang meluas di Amerika Latin, di Eropa, Asia, dan Afrika, seperti telah dijelaskan terdahulu, namun tidak ada suatu cara standar yang dapat dipakai untuk menilai apakah terdapat kekuasaan sipil, apakah ia dapat berfungsi baik, dan bagaimana prognosisnya ke depan mengenai keberlangsungannya.

Untuk suatu demokrasi, kekuatan sipil—yaitu pengendalian militer oleh pejabat-pejabat sipil yang dipilih oleh rakyat—adalah sangat fundamental. Pengendalian oleh sipil memungkinkan suatu bangsa mengembangkan nilai-nilai, lembaga-lembaga, dan praktek-praktek yang didasarkan atas kehendak rakyat banyak, dan tidak didasarkan atas keinginan-keinginan para pemimpin militer yang pandangannya berfokus pada keperluan keamanan dalam dan luar negeri. Dan memang demikianlah yang terlihat dalam banyak negara-negara mantan rezim otokratik. Militer memusatkan perhatian dan energinya pada masalah keamanan dan kestabilan dalam negeri dan sering melibatkan diri dalam politik. Sering malahan militer mengawasi dan mencurigai masyarakat ketimbang melindunginya, sebagaimana juga kita alami di Indonesia, terutama sekali di paruh kedua Orde Baru.

Penyebab Intervensi Militer dalam Politik

Menurut Perlmutter (1977), “terdapat suatu hubungan (korelasi) antara stabilitas lembaga-lembaga sipil dan kecenderungan militer untuk melakukan intervensi. Semakin lemah infrastruktur politik, semakin besar kemungkinan intervensi militer itu. Semakin kuat dan semakin luas cakupan aparat sipil, semakin kecil kemungkinan militer untuk mengambil alih kekuasaan dan menjalankan pemerintahan.”¹¹ Lemah/kuatnya infrastruktur sosial politik itu harus diartikan secara luas, tidak terbatas hanya pada jumlah, kemampuan teknis-administratif saja, melainkan juga mencakup kondisi mental-rohani (korup, suka dagang sapi, penyalahgunaan kedudukan, malas, tak ada rasa tanggung jawab, tak ada disiplin, masyarakat terpecah belah), kondisi sosial ekonomi (ketimpangan-ketimpangan yang mencolok dalam kehidupan ekonomi masyarakat, penyalahgunaan sumber daya alam, dan tenaga kerja, KKN), kondisi sosial politik (lembaga-lembaga politik lemah dan tidak viable, anarki, tak adanya kredibilitas, dsb). Yang menarik ialah Perlmutter mempertanyakan efektivitas militer sebagai modernisator dalam masyarakat dunia ketiga, dan dalam kesimpulannya, ia menyarankan dilibatkannya militer secara langsung dalam proses transformasi sosial sebagai cara terbaik untuk memelihara kekuasaan sipil di masa depan.

¹⁰ Lihat Lady G. Cecil, *Life of Robert Marquis of Salisbury* (1921, II): 153 dikutip dari A. Hasnan Habib, *Militer dan Politik: suatu Tinjauan Sosio-historik*, dalam A. Hasnan Habib, *Kapita Selekta : Strategi dan Hubungan Internasional* (CSIS, Jakarta, 1997): 163.

¹¹ Amos Perlmutter, 1977, *The Military and Politics in Modern Times: on Professionals, Pretorians, and Revolutionary Soldiers*, New Haven: Yale University Press

Stupak, et.al, melihat penyebab intervensi militer dalam politika dunia ketiga dalam dua faktor utama, yaitu: (1) dampak dari delayed dependent development, (2) meningkatnya profesionalisme militer dan ramifikasi politiknya. Secara ringkas, penjelasannya adalah sebagai berikut:

1. Dampak dari tertundanya pembangunan yang tidak mandiri. Ada tiga kenyataan sangat penting dalam faktor itu, yakni: (a) apabila proses pembangunan di negara-negara Barat (yang telah dimulai sejak akhir abad ke-17) berlangsung secara spontan tanpa adanya sasaran-sasaran yang ditentukan secara konkret, di negara-negara berkembang ia dilakukan secara direncanakan dan sangat goal-oriented; (b) apabila krisis-krisis yang ditimbulkan oleh modernisasi (sebagai akibat pembangunan) di negara-negara yang telah jauh lebih dulu membangun secara gradual dan berurutan, di negara-negara merdeka krisis-krisis itu berlangsung secara simultan dan amburadul; (c) apabila di negara-negara Barat yang jauh lebih dahulu membangun itu negara, c.q. pemerintah berperan pasif dalam merangsang pertumbuhan ekonomi dan industrialisasi di negara-negara baru merdeka, negara berperan sangat dominan, malahan seringkali merupakan satu-satunya kekuatan yang berperan aktif. Untuk lebih memperumit keadaan, negara berkembang sangat bergantung dari negara maju mengenai teknologi, cara-cara berproduksi, modal, investasi, manajemen, akses ke pasar, terms of trade, nilai tukar mata uang, dll dalam suatu struktur ekonomi yang dualistik dan dalam kondisi meningkatnya tuntutan rakyat.

Dalam keadaan demikian, diperlukan elite politik sipil yang mampu mengendalikan semua kesulitan itu. Tetapi dalam kenyataannya tidak atau jarang sekali ditemukan elite politik dengan kemampuan demikian itu. Berbagai instabilitas muncul, kerusuhan, kekerasan bersenjata, pemberontakan yang langsung mengundang militer untuk menanganinya. Militer didorong oleh keadaan untuk campur tangan, memulihkan stabilitas dan keamanan demi kelanjutan pembangunan nasional, karena tidak mungkin suatu masyarakat membangun dalam keadaan kacau balau.

2. Profesionalisme militer yang meningkat. Terutama sejak tahun 1960an terlihat dua gejala dalam lembaga militer negara-negara berkembang, yaitu: (a) proses pendidikan, terutama pendidikan perwira, yang semakin diprioritaskan dalam rangka peningkatan profesionalisme militer; (b) semakin tergantungnya banyak militer dunia ketiga pada bantuan militer asing, pendidikan dan teknologi.

Salahsatu aspek sangat penting dalam proses pendidikan militer dunia ketiga ialah meluasnya skope pendidikan ke bidang-bidang yang secara tradisional berada diluar bidang militer. Pada jenjang-jenjang pendidikan militer yang lebih tinggi, masalah-masalah realita nasional, dan potensi nasional yang dibahas menyangkut inti kehidupan nasional serta cara-cara pemecahan masalah-masalah inti kehidupan nasional itu yang pada dasarnya bermuara kepada masalah keamanan nasional. Pendidikan militer tinggi semakin membahas multifungsi dari militer untuk membentuk manajer-manajer militer dalam peran yang meluas dalam lingkungan internasional yang interdependen, berteknologi maju dan berorientasi kontra-insurgensi. Akibatnya ialah

golongan militer melihat dirinya sendiri sebagai satu-satunya lembaga nasional yang benar-benar bersedia dan mampu menyelamatkan negara dan bangsa dari ancaman-ancaman terhadap keamanan nasional. Persepsi demikian itu diperkuat lagi oleh program-program bantuan militer luar negeri, yang kecuali memang meningkatkan profesionalisme, juga menanamkan doktrin keamanan yang dititikberatkan pada masalah COIN (Counter Insurgency) dan civic action, bukan pada masalah pertahanan perbatasan, pertahanan kawasan, dsb. Mereka diberi profesionalisme dan fungsi baru, yaitu keamanan dalam negeri yang secara tradisional adalah fungsi kepolisian. Intervensi militer dalam politik dengan demikian ikut didorong oleh program-program bantuan militer luar negeri. Sebab-sebab yang dikemukakan diatas, dalam batas-batas tertentu juga berlaku di Indonesia.

Perilaku Politik dan Penyimpangannya dari Kelompok-Kelompok Signifikan

Perilaku Kelompok-kelompok Signifikan Pada Umumnya

Dalam keadaan tidak adanya budaya politik demokrasi di Indonesia karena sistem politik selalu dikendalikan oleh idiosyncracies dari pribadi-pribadi kuat yang tidak ada tandingannya (Sukarno, Suharto), maka konsensus-konsensus umum dan universal yang telah dicoba menguraikannya dalam bab terdahulu, dapat digunakan sebagai tolak ukur sementara mengenai perilaku dan penyimpangan perilaku kelompok-kelompok signifikan secara umum. Dengan menggunakan tolak ukur tsb, maka sistem politik Indonesia selama ini adalah sistem politik otoritokratik, lawan dari sistem demokrasi. Bahkan banyak pendapat luar negeri yang menamakan pemerintahan Indonesia dengan rezim militer, karena peranan militer dalam kehidupan politik di Indonesia demikian dominannya, terutama selama Orde Baru.

Sistem politik Indonesia yang otoriter itu agaknya mirip dengan apa yang berlaku di beberapa negara Asia, seperti Korea Selatan dan Taiwan sebelum kedua negara itu menjadi negara demokrasi (Korea Selatan sejak pemilu bulan Desember 1992; Taiwan sejak pemilihan presiden yang untuk pertama kalinya berjalan secara demokratik bulan Maret tahun 1996). Seorang ilmuwan politik ahli Asia yang terkenal, Scalapino menamakan sistem politik di banyak negara Asia dengan pluralisme otoritarian (authoritarian pluralism).¹² Gambaran umum sistem politik itu ialah: (1) kehidupan politik dikendalikan dengan suatu partai atau golongan memonopoli kekuasaan dan dengan pembatasan kebebasan-kebebasan (bicara, menulis, berkumpul, berorganisasi); (2) penguasa menerima keberadaan suatu masyarakat kewargaan (civil society), tetapi hanya diperbolehkan berkibrah dalam batas-batas tertentu yang selalu berubah-ubah (kadang-kadang seperti benar-benar bebas, tetapi tiba-tiba dikekang, bebas lagi, dikekang lagi, dst), tergantung dari penilaian sepihak oleh penguasa; dan (3) orientasi ekonomi yang dominan ialah kapitalisme dalam berbagai variasinya, secara terkendali. Pasar diberikan tempat penting, sedangkan negara bertindak sebagai pembimbing, pendukung, perencana, dengan kebijakan-kebijakan merkantilistik halus.

Seperti telah dikatakan, sistem politik Indonesia tidak demokratik, kendati dalam periode-periode tertentu disebut demokratik, tetapi demokrasi pakai adjective, seperti terpimpin, Pancasila. Hanya mereka yang tidak mengerti demokrasi atau

¹² Robert A. Scalapino, 1989, *The Politics of Development: Reflections on Twentieth Century Asia*, Cambridge: Harvard University Press.

menutup mata saja yang tidak melihat ketidakberdayaan rakyat banyak dalam menentukan dan memperjuangkan kepentingan-kepentingan, hak-hak dan kebebasan-kebebasannya, yang dalam suatu demokrasi justru rakyat itulah yang berkuasa. Hukum (the rule of law) yang merupakan salah satu pilar penyangga demokrasi, yang wajib melindungi kepentingan-kepentingan, hak-hak, dan kebebasan-kebebasan itu justru tidak berfungsi sebagaimana mestinya, bahkan tidak berfungsi sama sekali menghadapi orang-orang ataupun kekuatan-kekuatan yang kebal hukum. Lembaga-lembaga perwakilan rakyat di daerah, dan juga pusat, sering tidak mewakili dan memperjuangkan kepentingan rakyat yang diwakilinya dari tindakan sewenang-wenang penguasa, orang kuat, dan kroni-kroninya.

Tidak diperbolehkannya oposisi dalam sistem politik Indonesia menambah citra politik Indonesia yang otoriter karena hanya di negara-negara otoriter sajalah oposisi tidak boleh ada. Bahkan demokrasi pseudo sajumpun mengenal oposisi; ia disebut pseudo karena pemilu tidak dilakukan secara luber dan jurdil, melainkan direayasa. Pengertian oposisi yang sebenarnya ialah kelompok (biasanya partai politik) yang ingin mengganti pemerintah dan kebijakan-kebijakannya. Salahsatu ciri demokrasi adalah bahwa kekuasaan memerintah harus dapat diganti melalui cara-cara demokratis, melalui pemilu, dan tidak dimonopoli terus menerus hanya oleh satu golongan saja melalui cara-cara licik dan tidak demokratis. Esensi dari pemilu ialah memberi pilihan bagi rakyat untuk menentukan pemerintahannya dari satu golongan ke golongan yang lain, apabila rakyat menghendaknya, bukan untuk melegitimasi penguasaan satu golongan secara terus menerus. Pemilu kehilangan arti, fungsi dan relevansinya, kalau tidak memungkinkan pergantian pemerintahan.

Kesimpulan semua ini ialah bahwa perilaku politik selama ini dari semua kelompok signifikan termasuk—bahkan terutama—kelompok militer, menunjukkan penyimpangan-penyimpangan serius dari prinsip-prinsip sistem politik demokrasi.

Perilaku Kelompok Militer dan Citranya, Terutama Selama Orde Baru

Citra militer (ABRI) sebelum perjuangan reformasi dibentuk oleh peranannya yang bersama para mahasiswa/pelajar dan kekuatan-kekuatan sosial politik non-komunis lainnya ikut membidani lahir dan berkembangnya Orde Baru setelah peristiwa berdarah G30S/PKI pada bulan Oktober 1965. Didukung oleh bagian terbesar rakyat, ABRI berhasil memulihkan stabilitas nasional dan kemudian mempertahankannya selama tiga dasawarsa, suatu hal yang tidak pernah dialami sebelumnya. Prestasi itu diakui masyarakat umum, kekuatan-kekuatan sosial politik dan komponen-komponen Orde Baru lainnya sebagai hasil dari doktrin dwifungsi ABRI yang mulai disusun secara sistematis berdasarkan pengalaman perjuangan bersenjata selama perang kemerdekaan dan dalam menangani berbagai pergolakan bersenjata dalam negeri sampai dengan peristiwa berdarah G30S/PKI pada tahun 1965 itu. Stabilitas nasional yang terus menerus itulah yang memungkinkan rezim Orde Baru memulai melaksanakan serangkaian Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) yang telah mengubah wajah republik ini secara mendasar dari setengah abad sebelumnya.

Pengakuan prestasi militer (ABRI) itu tidak hanya datang dari dalam negeri, tetapi jug dari luar negeri, termasuk negara-negara demokrasi liberal yang menolak peranan militer dalam politik dan menganut sistem superioritas sipil terhadap militer.

Seorang pakar politik Amerika Serikat menulis dalam *Armed Forces and Society*, “whereas military regimes have an average span of approximately five years, the military government of Indonesia has ruled since 1966, an undeniable success story in terms of political longevity.”¹³ Sukses demikian itu disebutnya sebagai akibat depolitisasi partai-partai politik yang dilakukan pemerintah Orde Baru secara sistematis. Depolitisasi partai-partai tersebut telah menghasilkan stabilitas nasional berkesinambungan yang memungkinkan dijalankannya kebijakan ekonomi yang telah sangat memperbaiki kehidupan sosial ekonomi rakyat banyak. Stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi itulah yang memberi legitimasi kepada pemerintah Orde Baru. Namun Orde Baru tetap dipandang sebagai rezim militer oleh negara-negara demokrasi Barat dan sebagian golongan elite dan menengah di Indonesia sendiri. Kucuran bantuan ekonomi, keuangan, alih teknologi dari negara-negara maju, baik oleh pemerintah-pemerintah—seperti terlihat dalam hasil pertemuan tahunan dari IGGI, kemudian CGI—maupun dari pihak swasta dalam bentuk investasi langsung (FDI: Foreign Direct Investment) di Indonesia merupakan bukti nyata adanya legitimasi itu. Namun pakar politik tersebut di atas melanjutkan, “... karena fihak militer bertekad untuk berkuasa selama-lamanya maka pada suatu saat mereka harus membangun dan mengembangkan suatu aparatus politik massal yang viable diluar struktur militer dan mampu menarik dukungan rakyat banyak...”

Sejak peristiwa berdarah tahun 1965 itu keterlibatan ABRI dalam proses politik dalam negeri yang semakin dalam yang kemudian dituangkan dalam doktrin dwifungsi ABRI, menarik banyak perhatian para pengamat dan pakar politik diluar maupun didalam negeri. Banyak artikel dan analisis yang telah ditulis mengenai dwifungsi ABRI itu, didiskusikan dalam berbagai seminar, simposium, dan pertemuan-pertemuan internasional maupun dalam negeri. Berbagai kritik dilancarkan terhadap fungsi sosial politik ABRI yang merupakan fungsi kedua dari doktrin dwifungsi yang membawanya ke kedudukan politik yang semakin dominan sampai akhirnya tak ada satu kekuatan sosial politik lain manapun yang dapat menandinginya. Meskipun dwifungsi telah diberi landasan hukum melalui Tap MPR no. IV tahun 1973 dan UU no. 82 tahun 1988, namun kritik-kritik terhadap doktrin itu tidak pernah berhenti. Terutama segi implementasinya sangat dikritik tajam. ABRI dinilai sebagai terlalu menonjolkan kekuatan dan kekuasaan dengan pendekatan keamanan militernya yang berlebihan ketimbang memperhatikan berbagai pendapat dan kepentingan sekian banyak golongan masyarakat. Namun pada umumnya dwifungsi dipandang sebagai lebih memberi manfaat bagi Indonesia, ketimbang merugikan.

Orde Baru—diluar negeri lebih sering diberi label rezim militer atau rezim yang didominasi militer—memang tak dapat disangkal telah berhasil memulihkan stabilitas nasional dari trauma prahara nasional akibat peristiwa berdarah G30S/PKI tahun 1965 dan memeliharanya tanpa putus-putus selama 30 tahun lebih. Suatu prestasi yang sungguh luar biasa yang tidak pernah dialami negara dan bangsa ini sebelumnya. Berdasarkan stabilitas itulah, Indonesia telah mencatat pertumbuhan ekonomi berkesinambungan. Indonesia termasuk sekelompok kecil negara berkembang yang berhasil mencapai pertumbuhan ekonomi terus menerus yang cukup

¹³ Marvin L. Rogers, 1977, *Depoliticization of Indonesia's Political Parties: Attaining Military Stability*, dikutip dari Eric A. Nordlinger, 1977, *Soldiers in Politics: Military Coups and Governments*, Englewood Cliffs: Prentice-Hall

jauh diatas angka rata-rata pertumbuhan negara-negara dunia ketiga. Sejak permulaan dasawarsa 1990, Indonesia telah digolongkan ke dalam 10 emerging markets dunia yang akan berperan cukup penting dalam abad ke-21 yang sudah diambang pintu.

ABRI semakin memantapkan posisinya yang tak tergoyahkan dalam konstelasi politik negara dan bangsa. Platform politiknya menuntutnya berperan sebagai pembina persatuan dan kesatuan, pengawal UUD 45 dan Pancasila, perisai bangsa, dinamisator dan stabilisator. Dengan demikian ia berada dimana-mana, di badan-badan eksekutif pusat dan daerah sampai desa-desa, di lembaga legislatif pusat dan daerah tingkat I dan II, di lembaga hukum, bahkan juga di sektor bisnis dan perbankan. Dalam kedudukan dan peranan yang demikian luas dan berkuasanya itu, ia cenderung semakin kurang toleran, peka, responsif terhadap perbedaan pendapat. Ia juga cenderung mencurigai semua golongan masyarakat diluar ABRI yang berbeda pendapat dengan atau mengeritik pemerintah. ABRI sering terlalu cepat menuduh dan mengancam pihak-pihak yang mengeritik itu sebagai subversif, ekstrim kiri, ekstrim kanan, anti Orde Baru, tidak Pancasila dan menyimpang dari UUD 1945, merusak persatuan dan kesatuan, dan ancaman-ancaman sejenis lainnya. Orde Baru dengan ABRI dan Golkar sebagai kekuatan penopang utamanya secara sadar atau tak sadar sedang membangun suatu budaya politik kekerasan, yang diberi nama Demokrasi Pancasila.

Kekuasaan politik hampir tak terbatas itu ternyata meracuni mental sebagian pimpinan ABRI dan pemerintah Orde Baru. Pelan tapi jelas, muncul sifat arogan dan angkuh di kalangan golongan ini. Mereka merasa bahwa hanya pandangan dan pendapat mereka saja yang benar, yang mesti diikuti kalau bangsa ini ingin jadi bangsa besar. Arogansi ini ternyata meluas sampai ke kalangan bawahan, sehingga akhirnya ABRI seolah-olah merupakan golongan tersendiri dengan hak-hak tersendiri melebihi hak-hak warganegara lainnya. Warga ABRI merasa dirinya sebagai warganegara kelas satu. Norma-norma hukum dan peraturan yang berlaku bagi masyarakat sipil, seolah-olah tidak berlaku atau tidak dapat diberlakukan terhadap warga ABRI. ABRI selalu mendapat perlakuan lain daripada masyarakat biasa, selalu mendapat perlakuan istimewa.

Dengan demikian, ABRI merasa berkepentingan mempertahankan keadaan yang menguntungkan itu, mempertahankan rezim Orde Baru, c.q. rezim Suharto. Dengan kata lain, ABRI, dan Golkar, berkepentingan mempertahankan status quo dan dengan demikian mereduksi dirinya menjadi pelaksana belaka dari Presiden/Panglima Tertinggi Suharto. ABRI sebagai kekuatan sosial politik tidak lagi merupakan mitra dari kekuatan-kekuatan sosial politik lainnya, mitra tanpa berpihak kepada salah satu daripadanya sesuai doktrin perjuangan TNI-ABRI sendiri, Catur Darma Eka Karma (CADEK) tahun 1988 yang menyebutkan bahwa sebagai kekuatan sosial politik ABRI merupakan teman seperjuangan yang sejajar dan sederajat dengan kekuatan sosial lainnya yang berpedoman kepada Pancasila sebagai satu-satunya asas (pasal 38, ayat a).

Beberapa tahun menjelang pemilu 1997 perilaku politik ABRI—baik yang masih aktif dalam jajaran ABRI maupun yang dikaryakan terutama dalam lembaga-lembaga eksekutif daerah—terasa semakin mengambil sikap keras terhadap pihak-pihak yang hendak mengawasi jalannya pemilu agar tidak saja luber tetapi juga jurdil. ABRI tidak menginginkan hasil pemilu membuka kemungkinan untuk munculnya

lebih dari satu calon presiden dan oleh karena itu, ia semakin menyatu dengan Golkar. Bahkan Kepala Staf Angkatan Darat waktu itu, Jenderal Hartono, sampai menyatakan bahwa ABRI adalah kader Golkar dan Pangab, Jenderal Faisal Tanjung, mengatakan bahwa keluarga besar ABRI akan tetap menyalurkan aspirasi politiknya kepada Golkar, padahal ABRI sendiri pada hakekatnya adalah suatu partai dengan mempunyai fraksi tersendiri dalam badan-badan legislatif dan juga duduk di kabinet, bahkan di semua tingkat lembaga-lembaga eksekutif lainnya. Para penguasa daerah dari ABRI yang dikaryakan bukan saja mengaminkan apa yang disuarakan oleh pimpinannya di pusat melainkan malahan ada yang overacting dan mencuri waktu mendahului kampanye untuk kepentingan Golkar. Intervensi ABRI ke dalam PDI dengan memecah partai tsb dan membantu sepenuhnya golongan yang hendak mengkup pimpinan yang sah, tidak terlepas dari pertimbangan kepentingan memenangkan pemilu secara mutlak dan mencegah munculnya calon tandingan bagi Presiden Suharto. Tetapi sikap keras ABRI terhadap pihak-pihak yang dicurigai hendak menggagalkan pemilu itu dengan mudah menuduh mereka komunis atau menggunakan cara-cara PKI, tidak berhasil membungkam kritik-kritik terhadap berbagai kebijakan pemerintah pada umumnya dan terhadap dwifungsi pada khususnya.

Krisis moneter dan ekonomi yang tiba-tiba menerjang Indonesia pada pertengahan 1997 dan berkembang menjadi krisis total dan multi-dimensional dalam waktu yang singkat, dipersalahkan kepada dwifungsi, oleh karena telah memungkinkan Orde Baru membangun pemerintahan yang paling represif, otoritarian dan korup yang pernah ada di Indonesia merdeka. Kombinasi dari penyalahgunaan kekuasaan, pelanggaran HAM, dan sikap serta tindakan yang semakin arogan selama rezim pemerintahan Suharto, khususnya dalam paruh kedua Orde Baru, telah menodai citra dan reputasi ABRI, terutama sekali TNI-AD. Oleh karena itu dapat dimengerti bahwa dua dari sasaran pokok dari gerakan reformasi yang melanda negeri ini sejak permulaan 1998 adalah turunnya Presiden Suharto dan diakhirinya dwifungsi. Tuntutan itu mencerminkan perasaan rakyat yang menghendaki berakhirnya kekuasaan Presiden Suharto dan kembalinya ABRI kepada fungsi militernya, yaitu pertahanan keamanan. Ditengah-tengah protes dari massa mahasiswa terhadap pemerintahan 32 tahun Presiden Suharto, yang tanpa gentar melihat pengerahan kekuatan militer secara masif, Suharto terpaksa meninggalkan kekuasaannya pada tanggal 21 Mei 1998. Kejatuhannya dari kekuasaan didahului oleh kekacauan luar biasa yang melanda Jakarta pada pertengahan Mei di tengah-tengah pernjarahan, pembakaran, dan tindakan kekerasan lainnya, yang banyak ditujukan terhadap golongan etnis Cina.

Setelah tabir politik Orde Baru terbuka dengan jatuhnya Presiden Suharto, suatu daftar panjang mengenai kesalahan-kesalahan besar yang dilakukan TNI, terutama TNI-AD, seperti pelecehan HAM, penyalahgunaan kekuasaan, keterlibatan yang luas dalam bisnis yang dubious dan dalam operasi-operasi politik kotor, rekayasa politik, telah menghancurkan nama ABRI yang dulu pernah dipuja-puja oleh sebagian masyarakat. Reputasi ABRI telah jatuh, tidak pernah sebelumnya seterpuruk seperti sekarang. Dari suatu kekuatan yang demikian berkuasanya menjadi lembaga yang dikutuk, tidak dipercaya, dan dihujat tidak hanya di dalam negeri, tetapi juga di dunia internasional, telah membuat ABRI kebingungan, demoralisasi, dan kurang percaya diri dalam menghadapi situasi kacau tidak menentu di Indonesia. Mereka bingung, karena pada satu sisi mereka dihujat habis-habisan, tetapi pada sisi lain mereka

dikehendaki bertindak tegas terhadap para pengacau, penjarah, pemerkosa, penginjak-injak hukum, perusak integritas wilayah negara-bangsa, bahkan juga ada sebagian (kecil?) elite politik yang mencoba merayu agar militer mendukung organisasi atau dirinya dalam memperjuangkan kepentingan-kepentingan mereka sendiri. Oleh karena itu tidaklah mengherankan, bahwa mereka gagal dalam mengendalikan situasi. Rakyat mengambil hukum di tangannya sendiri, sehingga di sana-sini menimbulkan keruntuhan hukum dan ketertiban.

Selama pemerintahan Suharto, tantara sering menggunakan tangan besi mengatasi huru-hara dan pembangkangan-pembangkangan—atau yang dipersepsikan sebagai pembangkangan—yang timbul, misalnya, dengan memakai peluru tajam, tembak di tempat, menyiksa para tersangka dan saksi-saksi kunci, atau menculik aktivis-aktivis HAM dan demokrasi. Tetapi sekarang, mereka ragu-ragu bertindak tegas terhadap para pengacau dan pembuat onar, takut dituntut melanggar HAM bagi kebanyakan prajurit—bahkan juga di kalangan seantero perwira—masih kabur pengertiannya. Malahan Menhankam/Pangab sendiri mengeluh, bahwa: (1) semua gerakan militer yang dilakukan atas perintah negara dan merupakan tugas negara; dan (2) adalah tidak adil menilai apa yang terjadi di masa lalu dengan kaca mata dan ukuran sekarang. Mereka lupa bahwa pada umumnya tidak ada negara beradab yang memerintahkan pembunuhan, pemerkosaan, penculikan, dlsb. kecuali beberapa pemerintah dalam sejarah, seperti negara-negara fasis (Nazi Jerman, Italia dibawah Mussolini, Jepang sebelum Perang Dunia II, Uni Soviet di bawah Stalin, RRC Mao Zedong, dan sekarang pun masih ada beberapa negara yang melakukan state terrorism). Mereka juga lupa bahwa kejahatan apalagi kejahatan terhadap kemanusiaan tetaplah kejahatan biarpun dilakukan dahulu maupun sekarang.

Melihat perilaku seperti digambarkan diatas, jelaslah bahwa kelompok militer juga telah melakukan penyimpangan-penyimpangan luar biasa dari platformnya sendiri, dan dari doktrin dwifungsi yang telah dirumuskannya sendiri. Terlalu lama berkuasa tanpa ada kekuatan yang mampu mengimbangnya telah menimbulkan kecongkakan, keablasan, penyalahgunaan kedudukan dan kekuasaan yang semakin parah, sehingga akhirnya membawa runtuh bangsa dan negara. Apabila dinilai perilakunya itu dari sudut kode etik, Sapta Marga TNI, maka akan terlihatlah penyimpangan yang sungguh-sungguh parah, tidak saja di dalam perilaku politiknya, bahkan juga dari perilaku para anggota-anggotanya pribadi, termasuk para pimpinannya. Hal ini jelas terlihat dari hasil-hasil pemeriksaan berbagai perkara dimana unsur-unsur militer terlibat, para komandan/pimpinan tak satupun yang bersedia memikul tanggung jawab. Padahal dalam keadaan enak berkuasa, para pimpinan selalu mendengungkan bahwa tidak ada prajurit yang jelek, yang jelek ialah pimpinannya. Mereka juga seenaknya melupakan salah satu prinsip kepemimpinan militer yang sangat penting, yang mengatakan bahwa komandan bertanggung jawab terhadap segala yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh satuannya.

Penutup

Perilaku Penyimpangan

Demikianlah telah dicoba menggambarkan perilaku politik dan penyimpangannya dari kelompok-kelompok signifikan, termasuk kelompok militer. Demikian besar dan seriusnya penyimpangan-penyimpangan yang terjadi itu, sehingga sebenarnya dapat kita mengatakan bahwa perilaku politik semua komponen signifikan

adalah perilaku penyimpangan dari tujuan-tujuan reformasi dan tujuan-tujuan seperti tercantum dalam Pembukaan UUD 45. Budaya politik yang amburadul, tidak menentu, memerlukan kesungguhan, ketekunan, dan kemauan semua komponen bangsa untuk menjadikan masa transisi sekarang ini tidak berlarut-larut tanpa tujuan jelas, terombang-ambing, di tengah dinamika global yang semakin meningkat. Apabila kita tidak sadar akan bahaya yang menghadang, maka besar kemungkinan kita akan jatuh menjadi negara gagal (failed state) seperti kebanyakan negara-negara kecil di Afrika, yang senantiasa bergejolak dan terus menerus memerlukan bantuan di segala bidang dari negara-negara luar.

Perilaku Kelompok Militer dan Prospek di Masa Depan

Mengenai kelompok militer, di tengah-tengah keterpurukannya sejak jatuhnya Orde Baru, terlihat suatu perkembangan yang memberikan harapan. Bulan April yang lalu, Panglima TNI, Laksamana Widodo, bersama ketiga kepala staf angkatan, melaporkan kepada Gus Dur tujuh keputusan penting hasil dua hari Rapim TNI beberapa hari sebelumnya. Keputusan terpenting yang hamper tidak pernah dibayangkan sebelumnya akan terjadi ialah keputusan untuk menghapus dwifungsi, suatu doktrin yang praktis menjadi ideologi, yang telah memungkinkan TNI, khususnya TNI-AD, berkuasa selama lebih dari 30 tahun. Untuk selanjutnya TNI akan memfokuskan diri pada fungsi utamanya, yaitu pertahanan terhadap ancaman-ancaman dari luar. Keamanan internal akan merupakan tanggung jawab Polri, dengan TNI selalu sedia membantu, khususnya dalam mengatasi terorisme dan pemberontakan bersenjata, jika diperlukan dan sesuai dengan perundang-undangan. Keputusan lainnya yang juga sangat penting ialah, bahwa TNI menyatakan komitmennya untuk melanjutkan reformasi intern dan berusaha memperoleh kembali kepercayaan rakyat yang praktis telah hilang sejak jatuhnya Suharto dua tahun yang lalu.

Keputusan-keputusan itu adalah sangat fundamental, dan merupakan puncak dari perubahan-perubahan cukup berarti yang telah terjadi dalam tubuh ABRI selama dua-tiga tahun terakhir yang berimplikasi luas mengenai peranan dan fungsi militer. Ia menjanjikan suatu hubungan sipil-militer yang sama sekali berbeda dari sebelumnya, sewaktu militer sangat terlibat dalam politik dengan segala akses dan akibat yang tidak dikehendaki. Jika keputusan-keputusan itu dilaksanakan, dan jika dosa-dosa masa silam juga dikoreksi, hal itu akan dapat sangat membantu TNI memperoleh kembali kredibilitas dan citranya. Lebih daripada itu, hal itu juga akan melicinkan proses demokratisasi serta pembangunan suatu pemerintahan sipil yang memiliki wewenang penuh terhadap militer. Dan akhirnya, hal itu juga akan mengakhiri suatu hubungan sipil militer yang selama lebih dari empat dasawarsa ditentukan oleh dwifungsi.

Beberapa Tantangan

Namun masih jauh jalan yang harus ditempuh dalam melakukan reformasi dan mencapai tujuan, yaitu tantara yang (lebih) professional dalam suatu negara demokrasi. Berbagai tantangan terhampar di jalan itu yang harus diatasi, diantaranya berada diluar kemampuan TNI karena merupakan tantangan nasional secara menyeluruh.

- 1) Reformasi nasional belum menunjukkan arah yang pasti.

Reformasi TNI adalah bagian integral dari reformasi nasional menyeluruh, bukan terpisah/tersendiri. Reformasi nasional sendiri masih belum jelas arah dan tujuannya. Negara dan bangsa berada dalam keadaan yang memprihatinkan. Oportunisme, naluri destruktif, tidak adanya sense of crisis dan sense of urgency pada tingkat pimpinan nasional dan elite politik lainnya, mentalita business as usual khususnya dalam masalah KKN yang masih berlanjut, bahkan terasa makin parah, pemerintah pada setiap tingkat kehilangan bobot dan wibawa. Semuanya itu bercampur dengan berbagai konflik horizontal dan vertikal. Ibu Pertiwi berada dalam keadaan sakit berat, sedangkan para dokter masih berdiskusi dan berdebat apa dan bagaimana terapi yang harus diterapkan.

- 2) TNI belum mempunyai satu konsep yang disepakati bersama mengenai reformasi internal

Sampai saat ini, TNI masih tetap bergelut dengan masalah reformasi intern. Terdapat berbagai pendapat, bahkan ada yang saling bertentangan, mengenai beberapa isu penting reformasi intern itu. Sekadar contoh ialah pengertian sesungguhnya dari penghapusan dwifungsi.

- a. Ada yang menginterpretasikan sebagai penghapusan sama sekali, tetapi ada pula yang hanya bersedia melepas day-to-day politics seperti kursi tetap di DPR, tetapi tetap menuntun adanya kursi TNI di MPR, oleh karena disinilah TNI dapat ikut berjuang mempertahankan Negara Kesatuan, UUD 1945, dan dapat ikut langsung dalam pemilihan presiden dan ikut menentukan GBHN.
 - b. TNI harus mempertahankan haknya untuk kembali memasuki arena politik, jika pada suatu saat bangsa dan negara sungguh-sungguh terancam disintegrasi akibat ketidakbecusan pemerintahan sipil dan kesalahan-kesalahan mendasar yang dibuatnya. Mengenai hal ini pun terdapat perbedaan pendapat. Ada opini yang mengatakan bahwa militer mempunyai hak untuk melakukan intervensi dalam proses politik, tetapi hanya jika diminta oleh penguasa yang legitimit dan sesuai perundang-undangan.
- 3) Belum ada kesepakatan mengenai pengertian hubungan sipil-militer, khususnya apa yang disebut supremasi sipil
 - a. TNI, khususnya TNI-AD, kebetulan secara politik lebih berkuasa daripada sipil dalam Orde Baru, karena Orde Baru itu didirikan oleh militer akibat peristiwa traumatic tanggal 1 Oktober 1965. Didirikannya Orde Baru didasarkan atas asumsi bahwa TNI mempunyai hak melibatkan diri dalam masalah-masalah non-militer, dan juga hasrat untuk mempertahankan system yang dipandang telah mampu mengangkat Indonesia dari negara miskin ke negara berpenghasilan menengah.
 - b. Dibawah tekanan-tekanan domestik dan internasional setelah jatuhnya Suharto untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan dan kejahatan-

kejahatan yang telah dibuat di masa lalu dalam proses-proses politik, TNI secara berangsur terpaksa melepaskan kekuasaan politik pada sipil. Suatu perubahan secara gradual telah terjadi dalam hubungan sipil-militer yang tadinya didominasi militer menjadi semakin beralih ke sipil. Dalam dua tahun setelah berakhirnya Orde Baru, para perwira TNI telah ikut berpartisipasi dalam diskusi dan seminar mengenai hubungan sipil-militer dalam diskusi mana mereka secara terbuka mendiskusikan persoalan supremasi sipil. Pada permulaan para perwira militer itu mencoba menginterpretasikan supremasi sipil sebagai supremasi rakyat dalam suatu demokrasi dan bukan supremasi pemerintah sipil terhadap militer. Belakangan supremasi sipil itu diartikan pula sebagai supremasi hukum. Sekarang mereka (sebagian) telah dapat menerima wewenang sipil karena mulai mengerti bahwa dalam suatu demokrasi pemerintah yang berkuasa adalah pemerintah sipil yang dipilih oleh rakyat dan rakyat adalah sipil, bukan militer. Tetapi istilah *back to barracks* masih tetap tidak dapat diterima karena berkonotasi tentara bayaran atau tentara kolonial.

4) Tantangan budaya dan penyesuaian mental

Untuk sekian lamanya TNI telah mengembangkan budaya militer yang memisahkan mereka dari rakyat biasa: arogansi, kebiasaan memerintah, cenderung bertindak keras dalam perbedaan pendapat, dan sifat-sifat lainnya yang tidak disenangi rakyat. Suatu aspek lainnya dari tantangan ini ialah, bahwa terutama TNI-AD, masih lebih merupakan suatu kekuatan keamanan dalam negeri ketimbang kekuatan pertahanan. Kendati struktur territorial yang sudah sejak sedemikian lama ada—sejak system *Wehrkreis* dilakukan dalam aksi polisionil Belanda kedua—merupakan bagian dari doktrin pertahanan nasional berdasarkan system territorial, dalam kenyataannya prasarana pertahanan itu telah digunakan untuk mempertahankan stabilitas politik dan keamanan dalam negeri, serta untuk lebih mengefektifkan fungsi sos-pol TNI-AD. Mengubah dan menyesuaikan mental dan budaya tsb, itu dengan syarat-syarat suatu tentara professional dalam system politik demokrasi akan sulit dan makan waktu cukup lama.

5) Doktrin-doktrin dasar perlu direview dan diubah, khususnya doktrin Catur Darma Eka Karma.

Di dalam doktrin ini terdapat akar dan fundamentals dari persepsi sendiri ABRI mengenai fungsi-fungsi dasar dan peranannya, visi dan misi dari perjuangan nasional untuk mencapai tujuan-tujuan nasional seperti tercantum dalam preambul UUD 1945, singkatnya, seluruh visi dan misi dari eksistensi ABRI terdapat dalam doktrin itu. Ia juga digunakan sebagai fondasi dari doktrin-doktrin operasional yang ada sekarang dan di masa mendatang.

6) Sistem Pendidikan dan latihan juga harus ditinjau kembali dan diperbarui

Review dan pembaruan system pendidikan dan latihan ini tidak hanya untuk kepentingan reformasi intern, tetapi juga untuk keperluan modernisasi dan profesionalisasi militer. Terkait erat dengan masalah Pendidikan ini ialah

pengembangan unsur manusia dalam tubuhnya sendiri, termasuk pengerahan (recruitment), pembinaan karier dan pemisahan (retirement). Juga perlu ditentukan ratio antara unsur prajurit professional dan prajurit pegawai militer

7) Masalah struktur organisasi, khususnya struktur komando-komando territorial

Struktur komando-komando territorial disusun parallel dengan daerah-daerah pemerintahan sipil, mulai dari propinsi sampai ke tingkat desa. Terutama dalam Orde Baru struktur komando-komando territorial itu telah memberikan kepada TNI-AD kemampuan sangat besar untuk melakukan intervensi dalam politik di daerah dan lokal demi kepentingan stabilitas politik dan keamanan sesuai dengan kebijakan komando pusat. Struktur itu telah memperlihatkan kemampuannya dalam memanipulasi dan menyelenggarakan kekuasaan dalam pelaksanaan dwifungsi.

Sistem komando territorial ini harus disesuaikan dengan fungsi utama TNI, yaitu pertahanan terhadap ancaman dari luar, sedangkan masalah keamanan dalam negeri dilakukan oleh Polri, dengan TNI siap membantu, jika diminta dan sesuai dengan perundang-undangan. Namun paling tidak jangka sedang ke depan, Polri masih belum akan mampu mengambil alih tugas-tugas Kemdagri dan pemeliharaan stabilitas serta ketentraman dari tangan TNI-AD, sehingga jaring badan-badan territorial AD akan masih tetap diperlukan di tempat-tempat jauh terpencil dimana unsur kepolisian masih belum ada atau jauh dari mencukupi.

8) Keterlibatan militer dalam bisnis

Keterlibatan militer dalam bisnis sangat luas seperti dapat dilihat dari tidak terhitungnya jumlah koperasi, yayasan, dan badan-badan bisnis meliputi kehutanan, perkapalan, perdagangan, perbankan, property, hotel, pengangkutan, supermarket, perasuransian, dsb, baik sebagai pemilik, pemegang saham ataupun sebagai komisaris, bahkan juga hanya sebagai pemberian backing atau proteksi belaka. Semua kegiatan dan koneksi bisnis berpengaruh negative terhadap profesionalisme. Ia mendorong terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dalam tubuh militer. Ia juga merongrong disiplin. Prajurit bawahan yang tidak mempunyai peluang untuk mengadakan hubungan-hubungan bisnis yang memberikan profit seperti yang dilakukan oleh sementara atasannya, mengusahakan cara-cara lain untuk mencari uang, bukan untuk memperkaya diri, melainkan untuk menyambung gaji mereka yang tidak mencukupi untuk menghidupi keluarganya. Sadar akan dampak negative dari bisnis pada moral dan disiplin militer, pada tahun 1974 Presiden Suharto mengeluarkan keputusan melarang para perwira beserta istri untuk berbisnis. Istri dari prajurit bawahan dibenarkan membuka bisnis kecil-kecilan, seperti warung nasi, dsb., untuk menyambung gaji suami yang jauh dari cukup. Tetapi menimbulkan pertanyaan, satuan-satuan dibenarkan mendirikan yayasan-yayasan, dan melalui yayasan-yayasan itulah militer memasuki dunia bisnis. Mengakhiri kegiatan bisnis ini akan memakan waktu lama, selama pemerintah tidak mampu menyediakan budget yang wajar untuk pelaksanaan tugas secara baik dan untuk memungkinkan taraf hidup yang wajar bagi anggota militer dan keluarganya. Pada gilirannya hal itu ditentukan

oleh berapa cepat pemerintah mampu memulai sungguh-sungguh proses pemulihan ekonomi bangsa ini.

- 9) Keputusan-keputusan yang diambil oleh pimpinan tidak otomatis terlaksana di lapangan

Sesuai dengan yang dimaksud, terutama di daerah-daerah yang tidak terjangkau oleh sistem komunikasi, pengendalian, dan pengawasan yang memadai. Kebijakan, kehendak, dan keputusan pimpinan akan mudah disalahtafsirkan, atau bahkan disabot di tempat-tempat jauh dan terpencil itu.

Kesimpulan Akhir

1. Dwifungsi yang telah membawa TNI, khususnya TNI-AD, ke kedudukan politik yang dominant selama ini, tidak pernah direncanakan. Ia lahir dengan sendirinya, bahkan mendahului lahirnya Republik Indonesia. Ia berkembang ditempa oleh perjuangan perang kemerdekaan dan revolusi dan setelah itu oleh perkembangan sosial politik di lapangan. Pertama-tama kita melihat bahwa angkatan perang kita terbentuk sendiri (self-created), tidak dibentuk oleh pemerintah, dan ia telah berperan kunci dalam memenangkan perjuangan kemerdekaan melawan Belanda. Dengan demikian ia merasa mempunyai hak saam dengan pihak sipil dalam menentukan arah bangsa dan negara selanjutnya. Kendati dwifungsi dan ekspansi peran ABRI terjadi karena selfperception yang berakar pada pengalaman-pengalaman selama revolusi, namun adalah ketidakbecusan elite-elite politik sipil yang telah menciptakan peluang-peluang bagi ekspansi itu. Adalah merupakan fakta bahwa peran ABRI meningkat setiap kali pimpinan sipil gagal, seperti (1) dalam 1948-9 selama berlangsungnya aksi polisionil Belanda kedua sewaktu pimpinan tertinggi negara (sipil) menyerah pada Belanda, (2) dalam 1957-9 sewaktu pimpinan sipil menunjukkan ketidakmampuannya merespon tuntutan-tuntutan daerah yang telah mencetuskan pemberontakan PRRI/Permesta; dan (3) dalam 1963-6 sewaktu pimpinan sipil hamper-hampir membawa negara ini ke jurang kehancuran karena memberi kesempatan luas kepada golongan komunis untuk semakin berkuasa. Perkembangan ini sesuai dengan kesimpulan-kesimpulan analisis Perlmutter yang telah dijelaskan diatas sebelumnya.
2. Adalah cukup membesarkan hati melihat bahwa meskipun dalam keadaan yang sangat sulit bagi TNI dalam tahun-tahun belakangan ini, dengan berbagai hujatan, penghinaan, pengutukan, penudingan, dsb., namun ia telah berhasil melakukan beberapa perubahan cukup signifikan dalam tubuhnya sendiri. Mereka telah menunjukkan kemauan untuk berubah dan menerima supremasi sipil dalam hubungan sipil-militer. Namun dengan satu caveat, yaitu bahwa para elite sipil juga harus melakukan perubahan-perubahan dan reformasi-reformasi dalam lembaga-lembaga sipil itu sendiri. Mereka (sipil) harus memperlihatkan kemampuan memikul tanggung jawab dalam memimpin bangsa melalui lembaga-lembaga system politik dan membangun lembaga-lembaga masyarakat yang memungkinkan setiap orang mengemukakan dengan bebas dan aman pendapat, kepentingan, dan

konsernya. Hanya dengan menunjukkan kemampuan memimpin pemerintahan dan menghargai integritas TNI sebagai lembaga, fihak militer akan dapat meletakkan kepercayaannya kepada dan menghormati kewenangan sipil.

3. Mengadakan perubahan dalam hubungan sipil-militer yang kurang sehat di masa lampau ke hubungan yang lebih baik, memerlukan kerjasama dan dialog antara keduanya. Perubahan peran militer tidak dapat dilakukan oleh hanya satu fihak saja. Hal itu harus merupakan hasil dari dialog-dialog dan interaksi yang sering dan terbuka antara militer dan sipil dengan menggunakan wacana perspektif kedua fihak militer dan sipil.
4. Hilangnya dwifungsi tidaklah berarti bahwa TNI di masa depan tidak mempunyai kegunaan selain hanya sebagai kekuatan pertahanan terhadap ancaman-ancaman dari luar. Terdapat berbagai fungsi dan peran dalam dimensi internal maupun eksternal yang dapat dijalankan TNI dan yang memerlukan tingkat profesionalisme yang tinggi. Dalam dimensi eksternal yang dapat dijalankan TNI dan yang memerlukan tingkat profesionalisme yang tinggi. Dalam dimensi eksternal misalnya dapat disebut: peran pemeliharaan perdamaian di bawah PBB, menggalang kerjasama keamanan yang lebih erat dengan negara-negara tetangga terutama dengan negara-negara ASEAN, membangun hubungan-hubungan bersahabat dengan semua negara-negara ARF (ASEAN Regional Forum).

Sedangkan dalam dimensi internal, TNI dapat menjalankan peran sosial dan kemanusiaan, misalnya, penanggulangan bencana dan keadaan darurat, membantu para pengungsi dan evakuasi, kegiatan-kegiatan SAR, membantu pembangunan-pembangunan daerah-daerah terpencil dan berbagai program civic action lainnya. Semua peran itu mempunyai rationale dalam fakta bahwa suatu angkatan perang dalam masa damai biasanya berarti tersedianya suatu pool atau reservoir manusia, peralatan, dan kemampuan yang dapat dimanfaatkan untuk tujuan-tujuan pembangunan/konstruktif. Dalam banyak negara, terutama negara-negara berkembang seperti Indonesia, sumber-sumber daya ini dimanfaatkan untuk proyek-proyek pembangunan, mulai dari pemberantasan buta huruf sampai pembangunan jalan, penanggulangan keadaan-keadaan darurat, dan keperluan-keperluan sosial lainnya yang menambah (suplemen) kemampuan-kemampuan aparat sipil. TNI telah mempunyai cukup pengalaman dalam hal ini dan oleh karena itu peran dan fungsi-fungsi tsb merupakan fungsi-fungsi dan peran sekundernya.

5. Janji dan komitmen pimpinan TNI ke arah itu semua telah secara terbuka dan gamblang disampaikan mereka kepada presiden yang merupakan keputusan Rapim TNI pada tanggal 19-20 April yang lalu, yang dihadiri oleh seluruh perjabat teras ketiga angkatan. Tinggallah sekarang menindaklanjuti itu dengan rencana dan program yang lebih terperinci terutama dalam mengatasi tantangan-tantangan yang dihadapi. Namun tantangan dan hambatan terpenting ialah kondisi bangsa dan negara kita yang luar biasa memprihatinkan dewasa ini, yang berada di luar kemampuan TNI. Arah yang jelas kemana negara dan bangsa ini dibawa harus diberikan oleh kepemimpinan sipil yang berkuasa sekarang ini, dengan bantuan seluruh komponen bangsa termasuk TNI.

Bandung, 15 Juli 2000.

Diskusi :

1. Syamsudin (Seskoau) Lembang

- a. Apakah penciptaan demokrasi harus memakan korban? Apakah ada cara lain tanpa memakan korban?
- b. Apakah perang saudara yang terjadi merupakan cara untuk menciptakan demokrasi?

Bahasan:

- a. Sejarah menunjukkan bahwa penciptaan demokrasi di Indonesia banyak memakan korban. Ada cara lain untuk mewujudkan demokrasi tanpa memakan korban, yaitu melalui pendidikan dan enlightenment, dimana pendidikan diperoleh dari rumah, diawali dengan pendidikan ibu (orangtua) terhadap anaknya. Sedangkan untuk enlightenment diperoleh dari informasi, baik audio, visual, maupun audio visual mengenai tingkah laku bangsa yang beradab.
- b. Perang saudara yang terjadi di Indonesia merupakan reaksi atas kekecewaan terhadap janji-janji yang diberikan pemerintah. Resources yang besar yang dimiliki setiap daerah keuntungannya hanya lari ke kelompok tertentu, rakyat tidak menikmati haknya dari pemanfaatan resources tersebut.

2. Emilia (FISIP Unpad)

Negara kita tidak mempunyai kultur politik dan tidak ada kesempatan untuk timbulnya kultur tersebut. Lalu bagaimana dengan penyelenggaraan P4, apakah ada manfaatnya?

Bahasan:

P4 (selama ini) tidak ada gunanya, Pancasila yang hanya merupakan idiosyncracies dimana Pancasila atau tidaknya (seseorang) ditentukan oleh pihak yang berkuasa.

3. Ariadi : (Forum Masyarakat Bandung)

- a. Soal kemakmuran ABRI
- b. Cara mengambil alih (menguasai) militer (oleh sipil), apakah diajarkan?
- c. Prospek kehidupan bangsa (yang lebih baik), bagaimana langkah konkretnya?

Bahasan:

Institusi sipil pada saat Orde Lama masih lemah sehingga pihak TNI-lah yang diajukan untuk menguasai situasi politik dan berpuncak pada waktu Orde Baru.

_____ 0 _____

A.

Perilaku Politik Menyimpang Dalam Kehidupan
Berbangsa Dan Bernegara Indonesia

Drs. H. Hatta Albanik

Fakultas Psikologi Universitas Padjadjaran

1. Perilaku Politik Menyimpang Dari Ideologi Negara

Dari uraian terdahulu, tidak dapat disangkal lagi akan terjadinya penyimpangan perilaku dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia selama ini.

Tidak dapat disangkal pula, bahwa pada awal kelahirannya bangsa dan negara Indonesia dilandasi oleh kekeluhuran cita-cita yang tumbuh karena penderitaan luar biasa akibat penjajahan bangsa dan negara yang secara nyata berbeda dalam wujud fisik, sosial, budaya dan latar sejarah dengan pribumi yang menghuni tanah tumpah darah nusantara ini. Persamaan nasib yang dirasakan akibat penjajahan tersebut, berkembang kemudian dalam bentuk penemuan akan sekian banyak persamaan lainnya yang jauh melampaui banyaknya perbedaan alamiah yang selama ini memecah belah etnis pribumi nusantara tersebut. Konvergensi sosiologis, psikologis dan politis semakin bertumbuh mengatasi divergensi etnis, kultural, ras, agama, asal-usul, teritorial, dlsb. Pribumi nusantara semakin mengenal kebersatuan menuju satu tanah air, satu bangsa bahkan pula menjunjung kesatuan bahasa. Nama Indonesia pun kemudian dipilih untuk penguat identitas kebersatuan itu.

Perilaku politik menuju divergensi untuk menciptakan ke Indonesia-an yang wujud pun lalu dipilih sebagai norma utama berperilaku berbangsa dan bernegara. Perilaku politik yang divergen semata tanpa mengindahkan kebersamaan konvergen dengan demikian lalu menjadi penyimpangan perilaku politik dalam hidup berbangsa-bernegara di Indonesia.

Ideologi dan konstitusi pun dirancang serta dipersiapkan dalam bentuk dan proses yang diusahakan sedapat mungkin memenuhi semangat kesatuan dalam keberagaman hidup berbangsa serta bernegara di Indonesia Merdeka. Ideologi dan konstitusi itu pun dirancang dengan semangat sebagaimana yang dibutuhkan bagi perkembangan suatu negara yang sejak awal kelahirannya terlahir sebagai suatu negara modern. Namun segera setelah dicanangkan, ideologi itu pun segera digugat. Bukan dari segi esensi dan isinya, tetapi terutama digugat oleh karena prosesnya. Mulai dari tudingan seakan-akan dibuat oleh penjajah dan para kolaboratornya karena

difasilitasi Jepang, penghilangan tujuh kata kesepakatan Piagam Jakarta sampai dengan anggapan bahwa tatacara penyusunannya yang tidak lazim dengan yang telah dilakukan oleh negara-negara lain pada waktu menyusun ideologinya. Perjalanan sejarah 'ditemukannya' ideologi bangsa Indonesia memang seiring dengan gerak gelombang turun naiknya pergerakan perjuangan menjadi suatu negara merdeka baru yang berlangsung sambung menyambung dari generasi satu ke generasi berikutnya. Pemikiran dan filosofi bernegaranya terus menerus diuji serta diasah untuk mempersatukan semua keragaman nusantara ini. Namun setelah menjadi ideologi dasar hukum dari suatu negara merdeka yang telah disepakati, maka seharusnya kemudian dengan sepenuh hati di laksanakan menjadi kenyataan.

Pada praktek kehidupan menegara di Indonesia, bertubi-tubi bentuk penyimpangan terhadap ideologi bangsa dan negara di lakukan dalam perilaku penyelenggara negara, pemerintah, lembaga peradilan, legislasi, masyarakat, kelompok, partai, perorangan dan lain sebagainya berupa:

- a. Penindasan atas nama ideologi dan atas nama negara terhadap warganegara, kelompok, partai golongan, penganut agama/kepercayaan yang dimusuhi karena berbeda pandangan dalam praktek menegara dan melaksanakan ideologi negara.
- b. Penyalahgunaan ideologi untuk kepentingan tertentu yang biasanya koruptif, manipulatif demi kekuasaan semata.
- c. Monopoli kebenaran, makna dan pelaksanaan ideologi dalam praktek menegara sehingga tertutup terhadap kritik, masukan atau ide dari masyarakat warga yang seharusnya menjadi 'stake holder' negara dalam suatu dialog yang terus menerus, karena pelaksanaan praktek menegara tidaklah dapat dimonopoli.
- d. Praktek menegara yang bertentangan dengan semangat ideologi negara bahkan tersusupkan oleh ideologi asing maupun dalam negara yang bertujuan membunuh ideologi negara.

Sejarah kehidupan negara Indonesia sejak kemerdekaannya banyak mencatat peristiwa-peristiwa perilaku politik menyimpang semacam ini. Namun anehnya setiap terjadi perbenturan dan konflik hampir selalu terhimbau untuk kembali menjunjung tinggi nilai-nilai ideologi negara. Sementara begitu konflik mereda, maka masing-masingnya kembali sibuk membenahi nilai dan ideologi yang dimaknainya sendiri. Sebagai formalitas, ideologi negara hingga saat ini masih cukup efektif memperantarai perbenturan nilai masyarakat Indonesia dalam hidup menegara. Namun cukup mencolok untuk dicermati, apakah ideologi negara hanya difungsikan sebagai 'shockbreaker' bagi setiap tabrakan perilaku politik menegara sehingga suatu ketika dapat menjadi tidak efektif lagi?

2. Perilaku Politik Menyimpang Dari Konstitusi

Pada uraian sebelumnya, telah pula dideskripsikan pemahaman tentang ideologi dan konstitusi sebagai dasar bagi perilaku menegara. Sedemikian erat kaitannya sehingga sering dikatakan bahwa konstitusi adalah merupakan konstruksi yuridis dari ideologi. Bahkan di Indonesia seringkali dikatakan bahwa konstitusi adalah merupakan tafsir resmi dari ideologi dan hanya bisa ditafsirkan dalam pelaksanaan perilaku menegara melalui produk-produk hukum pula.

Pengertian tersebut bahkan kemudian didalam sejarah konstitusi di Indonesia diterjemahkan dalam kenyataan bahwa walaupun dikatakan memiliki sumber ideologi yang satu (yaitu:Pancasila), namun terdapat tiga konstitusi (yaitu UUD 1945, UUD RIS dan UUDS 1950) yang memuat konstruksi, sistem maupun esensi yang berbeda sebagai dasar perilaku menegara. Menjadi pertanyaan apakah semua konstitusi tersebut dapat dikatakan secara resmi sebagai konstuksi hukum dasar negara yang bersumber dari ideologi negara yang sama : Pancasila? Apakah sedemikian fleksibelnya ideologi negara Indonesia itu sehingga mampu menjadi acuan dari semua perbedaan bentuk negara, sistem pemerintahan, sistem hukum, sistem kepartaian dlsb itu? Ataukah mungkin pengertian hubungan ideologi dengan konstitusi sebagaimana diuraikan di atas itulah yang tidak tepat secara terminologis.

Namun sejarah konstitusi sepanjang riwayat Indonesia Merdeka menunjukkan bahwa perubahan konstitusi negara tidak pernah terjadi disebabkan karena adanya perubahan ideologi. Apakah itu karunia atau penyimpangan?

Nyatanya, ideologi negara sejak kemerdekaan tidak pernah berubah, sementara konstitusi negara Republik Indonesia telah berulang kali berubah.

Yang perlu dicermati adalah, perubahan konstitusi yang cukup sering dilakukan, biasanya banyak ditemukan di negara-negara yang tingkat stabilitas dan kemampuannya tergolong rendah. Banyak negara Republik Pisang (Banana's Republics) mengganti konstitusinya, manakala terjadi pergantian rezim yang berkuasa. Perubahan konstitusi terjadi berdasarkan ideologi, keinginan bahkan selera semata dari rezim yang berkuasa.

Perubahan konstitusi di Indonesia tampaknya seringkali dianggap sebagai akibat pengalaman menegara. Mulai dari:

- * Perubahan sistem pemerintahan presidensial menjadi sistem pemerintahan parlemen P.M. Sutan Syahrir pada pelaksanaan UUD 1945 ditahun 1945, dengan alasan taktis menghadapi sekutu yang tidak bersimpati terhadap pemimpin-pemimpin di negara bekas jajahan yang berkolaborasi dengan pemerintahan fasisme Jepang.
- * Pemberlakuan UUD RIS tahun 1949 sebagai penyesuaian terhadap perjanjian KMB dalam perjuangan kemerdekaan melawan Belanda yang ingin kembali menjajah.
- * Pemberlakuan UUDS tahun 1950 dalam rangka mempraktekkan kembali sistem demokrasi parlementer yang dianggap telah sukses membawa RI tetap eksis dalam masa perjuangan bersenjata mempertahankan kemerdekaan.
- * Pemberlakuan kembali UUD 1945 melalui Dekrit Presiden RI 5 Juli 1959, karena kegagalan konstitusi membuat UUD RI yang baru dan anggapan telah gagalnya UUDS Tahun 1950
- * Amandemen UUD 1945 pada masa pasca reformasi 1998 (yang ditandai dengan lengsernya rezim Soeharto) untuk mencegah terulangnya penyalahgunaan UUD 1945 dengan mempertegas pasal-pasalnya agar tidak memungkinkan terulangnya kembali kekeliruan-kekeliruan yang dilakukan dalam pemerintahan rezim Soeharto namun memasukan pula ketentuan-ketentuan baru yang 'berbau' kepentingan golongan sesaat, jangka pendek dengan memperlemah posisi presidensial dan memperkuat dominasi partai politik melalui parlemen maupun sistim pemilihan presiden/wakil presiden serta pimpinan daerah. Konstitusi menjadi berbeda dan bukan merupakan implementasi lagi dari ideologi nasional. Konstitusi dibuat menjadi compang-camping dengan pelbagai wacana, konsep dan ideologi golongan, sehingga semakin menjauhkan upaya untuk mewujudkannya dalam manajemen

pengelolaan negara. Otoriterisme partai politik semakin menonjol seiring dengan semakin merasuknya keleluasaan mereka ke area eksekutif karena ikut membuat keputusan menentukan dalam pengangkatan pejabat negara dan pencairan anggaran.

3. Perilaku Menyimpang Kepemimpinan Dan Kelompok Otoriter

Setelah mencermati semua peristiwa, kejadian, dan respons terhadap pelbagai isu dan masalah yang dihadapi bangsa dan negara Indonesia dalam pelbagai aspek kehidupannya mulailah pandangan kritis mewujud lebih konkrit pada muara kesimpulan sementara bahwa semua hal yang terjadi, solusi maupun respons yang diberikan terhadapnya pada dasarnya berpangkal pada pola tingkah laku dan kelakuan warga masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia itu sendiri secara bersama, kelompok, maupun individu-individunya. Kata individu menjadi lebih mencorong karena pola pengambilan keputusan yang dilembagakan dalam kehidupan bermasyarakat, bangsa, dan negara Indonesia pada semua level dan bentuk di saat-saat krisis kehidupannya ternyata sangat tergantung pada individu yang menempati posisi Pemimpin Tunggal. Krisis yang dihadapi bangsa Indonesia sehingga menimbulkan suasana perpecahan, saling mengkambinghitamkan yang membawa kesengsaraan masyarakat dan nyaris menyeret bangsa dan negara Indonesia pada kehancurannya terjadi justru pada saat pola kepemimpinan negara berada dalam proses *decision making* yang terpusat pada Pemimpin Tunggal Tertinggi. Demikianlah yang terjadi pada masa Demokrasi Terpimpinnya Bung Karno (1959-1965), Demokrasi Cendanya Soeharto (1983-1998) serta kepemimpinan setelahnya. Pada masa-masa kepemimpinan dalam tahun-tahun awal berkuasa, kedua tokoh pemimpin bangsa dan negara Indonesia itu, masing-masing memimpin secara kolektif (Dwi Tunggal Soekarno-Hatta, 1945-1956, Triumvirat Soeharto-Sri Sultan Hamengku Buwono IX-Adam Malik, 1966-1978 plus Abdul Haris Nasution, 1965-1969). Kolektifitas itu juga sebenarnya mewujudkan kerjasama pelbagai ide dan gagasan terbaik yang dimunculkan oleh masing-masing pendukung kepemimpinan. Perilaku Kepemimpinan Bersama yang dilakukan mampu memenuhi harapan masyarakat luas tentang negara yang mampu melindungi seluruh rakyat dan tumpah darah Indonesia sebagaimana digambarkan oleh tujuan lahirnya bangsa dan negara Indonesia. Solusi yang dihasilkan terhadap permasalahan bangsa dan negara dihasilkan secara bersama oleh kekuatan-kekuatan itu dan hampir selalu merupakan solusi terbaik yang sesuai dan karenanya didukung oleh masyarakat luas. Harapan itulah yang diekspresikan masyarakat terhadap kepemimpinan Dwi tunggal dan Triumvirat pada masa Orde Lama dan Orde Baru. (Dan juga terlihat pada awal duet kepemimpinan Gus Dur-Megawati hasil Sidang Umum MPR Oktober 1999, SBY-JK pada hasil Pemilu 2004).

Manakala kemudian kepemimpinan negara itu menjadi monopoli tunggal Bung Karno dan Pak Harto yang seakan tidak memberikan tempat bagi ikut sertanya gagasan dan pemikiran pemimpin lain dalam pembuatan keputusan negara, maka bangsa dan negara Indonesia mewarisi krisis yang muncul dari pola kepemimpinan monopoli tunggal itu. Bung Karno mulai melakukannya dengan Konsep Nasakom yang disusul dengan Nasakomisasi dalam kehidupan bangsa dan negara. Tersingkirilah gagasan dan pemikiran dari *sparring partner* lainnya dalam proses kehidupan bangsa dan negara. Dukungan kekuatan pun menyempit hanya pada kelompok Nasakom dan kroninya, kemudian secara perlahan terkikis dan menyurut pada akhir tahun 1965.

Hal serupa juga dialami oleh Pak Harto yang sejak tahun 1983 memonopoli kekuasaan kepemimpinan negara melalui terbentuknya Kabinet Tapos dimana seluruh personil Kabinet adalah pendukung *all-out* nya pada semua lini (Kabinet-BPK-DPR/MPR-DPA-Parpol (Golkar, ABRI)). Menggelembungnya dukungan formal yang dimobilisasi oleh Golkar dan ABRI memang mampu membuatnya bertahan sampai lengsernya pada tahun 1998. Tetapi untuk menyusun kabinetnya pada tahun 1998, dukungan konkrit hanya bertumpu pada keluarga dan kroni terdekatnya saja.

Fenomena sama juga terjadi pada Gus Dur ketika mulai memonopoli perombakan kabinet agar berisikan “All President’s Men”, membuatnya seakan mengulangi kembali usaha memonopoli tunggal kekuasaan dalam pengambilan keputusan negara. Hal yang sama dapat terjadi pula pada SBY-JK dalam pengambilan keputusan yang dianggap sebagai tindak prerogatif masing-masing.

Dapat dipahami, bilamana akhir dari setiap kepemimpinan yang memonopoli kekuasaan dan pengambilan keputusan negara itu akan berakhir tragis bagi yang bersangkutan dan krisis bagi rakyat, bangsa, dan negara Indonesia akibat upaya mereka mereduksi dukungan rakyat Indonesia yang secara hakiki adalah pluralistik.

Sayangnya wacana yang dimunculkan kemudian juga mengarah pada penyimpangan lain, seakan-akan yang diperlukan dalam kepemimpinan Indonesia adalah pemimpin yang tegas, kuat dan identik dengan pimpinan yang otoriter diktator.

Konstitusi, Sistem Dan Struktur Sebagai Kambing Hitam Sumber Penyimpangan Perilaku Politik

Menarik untuk dicermati bahwa para pengambil kekuasaan dan kepemimpinan negara Indonesia seringkali menimpakan semua kesalahan itu pada apa yang mereka sebut sistem negara yang diciptakan oleh dasar negara dan konstitusi negara.

Bila bangsa dan negara diibaratkan individu, maka sistem dan struktur individu negara manapun di dunia ini tentulah harus dicermati dari konstitusi negara, dasar negara, dan atau ideologi negara yang tentunya merupakan bentukan dari pelbagai isi pribadi yang dimilikinya (kultur, etnik, religi, *belief*, dst). Sementara baik Bung Karno maupun Pak Harto, Habibie, Gus Dur, Mega, SBY, berikut pendukung-pendukungnya justru runtuh karena perilaku politik mereka menafikan struktur ideologi dan konstitusi negara.

Timbul *“insight”* atas pertanyaan “andaikata semua sistem, struktur, kerangka negara bangsa Indonesia ini dirombak total; apakah bangsa dan negara Indonesia akan lebih baik?”

Hampir sepakat bila banyak pendapat yang menyatakan; “Tidak”. Mengapa ? Karena yang terjadi dalam kehidupan bangsa dan negara Indonesia itu bukanlah disebabkan buruknya sistem, struktur, dan kerangka negara. Melainkan justru oleh perilaku di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilakukan dengan sama sekali tidak mengimplementasikan perwujudan keseharian hidup menegara dari sistem, struktur, dan kerangka negara bangsa Indonesia.

Di bongkar pasang pun dasar negara dan konstitusi negara tanpa usaha melakukan perubahan perilaku hidup berbangsa bernegara, tidak akan membawa kebaikan berarti bagi penyelenggaraan kehidupan menegara bangsa Indonesia.

Telah terjadi penyimpangan perilaku dalam kehidupan menegara pada bangsa Indonesia selama ini. Kepemimpinan yang dimintakan dalam sistem negara kekeluargaan Indonesia adalah sistem kepemimpinan bersama, untuk kepentingan bersama dan dengan memanfaatkan semua pemikiran terbaik yang dimiliki untuk memecahkan masalah-masalah bersama.

Penyimpangan terjadi oleh karena yang dipraktekkan justru adalah kepemimpinan tunggal, monopolist dan otoriter. Yang salah bukanlah sistem demokrasinya melainkan praktek perilaku demokrasinya. Yang salah bukanlah sistem politiknya, melainkan praktek perilaku politiknya. Selama kepemimpinan dijalankan secara bersama, maka semua permasalahan bangsa akan dihadapi secara bersama pula. Karenanya menjadi sangat janggal bilamana pada setiap era kepemimpinan di Indonesia, hampir selalu terjadi upaya untuk menggiring pemimpin agar menjadi otoritas tunggal.

Kalau dijelimiti, tentunya tidak akan ditemukan sistem negara yang tanpa kelemahan. Apalagi kehidupan manusia selalu berkembang dinamis, sehingga sistem pengorganisasiannya pun tentunya perlu selalu berkembang setara. Logika hanya berlaku pada kondisi normal, dimana perilaku hidup menegara memang harus secara sadar melakukan penyesuaian terhadap sistem negaranya.

Mengapa perilaku politik Indonesia tidak merupakan “*adjustisasi*” terhadap sistem negaranya? Kita akan temukan penyimpangan perilaku yang bersumber pada:

- a. Kepribadian individu pelaku
- b. Situasi lingkungan
- c. Interaksi a dan b

Bila kita mencermati kepribadian individu pelaku perilaku politik Indonesia dalam artian sempit (lihat wacana pada Bab I), tidak bisa dihindari bahwa secara individu banyak politisi Indonesia saat ini yang memang berkepribadian menyimpang “*Drop out*” dari profesionalisme kehidupan normal untuk kemudian “tersasar” pada kehidupan politik yang penuh trik. Perilaku politisi Indonesia saat ini masihlah perilaku slogan, belum sepenuhnya perilaku aspiratif. Layak bila dilakukan “*fit and proper test*” sebelum mereka direkrut ke dalam lembaga-lembaga politik. Politisi terlibat dalam pengambilan keputusan negara yang pada hakikinya kompleks, rumit, menyangkut kepentingan banyak orang (publik). Agar keputusan itu berkualitas tinggi seharusnya para pembuat keputusan itu berkualitas tinggi pula. Berkualitas tinggi termasuk memiliki kepribadian yang lebih baik kualitasnya dibanding rata-rata orang yang dipimpin atau diwakili dalam pembuatan keputusan itu.

Lingkungan masyarakat dimana perilaku politik ini diterapkan adalah lingkungan masyarakat dengan tingkat sumber daya manusia yang masih berkualitas rendah. Bung Hatta dalam banyak kesempatan menjelang kemerdekaan 17 Agustus 1945 berulang kali mengajak renung para tokoh pendiri bangsa : “Apakah kita sudah siap merdeka sekarang?” Sementara Bung Karno justru menggelorakan semangat “Merdeka sekarang juga dan di alam merdeka itulah kita majukan rakyat kita”.

Sejarah kemudian mencatat bahwa bangsa Indonesia telah menetapkan pilihannya dengan mendukung pandangan Bung Karno untuk merdeka sesegera mungkin. Konsekuensi dari pilihan itu adalah bahwa –(hingga kini pun masih terasakan) banyak yang beranggapan bahwa cukup banyak warga bangsa Indonesia yang masih belum memahami apa artinya merdeka dan memiliki negara sendiri. Pada awal kemerdekaan kepercayaan rakyat pada pemimpin sedemikian kuatnya, dan dedikasi pemimpin terhadap rakyatnya pun sedemikian besarnya, sehingga terkompensasilah kondisi rakyat yang belum mengerti apa itu negara untuk berperilaku menegara cukup dengan sekedar meneladani perilaku pemimpinnya. Puluhan tahun kemudian telah terjadi proses dimana kualitas kehidupan dan sumber daya manusia Indonesia semakin meningkat. Namun sayangnya para pemimpin yang muncul kemudian masih menganggap rakyat harus selalu *ing ngarso* pada pemimpin. Sementara dedikasi pemimpin terhadap rakyatnya justru telah mengalami dekadensi. Pemimpin yang lahir mengisi kepemimpinan institusi negara dan kemasyarakatan dalam negara Indonesia merdeka ternyata direkrut dalam kualitas pemimpin lokal, kelompok, dan golongan sendiri yang hampir-hampir tidak pernah matang menjadi pemimpin nasional, bangsa, dan negara. Kepemimpinan negara dianggap sebagai jenjang struktur formal semata dalam proses karir kepemimpinan. Bukan orientasi utama dalam perilaku memimpin. Jiwa dasar mereka lebih mengentalkan warna lokal, kelompok, golongan, daerah, etnis, bahkan subkultur dan agama. Secara individual pun kualitas kepribadiannya mengalami degradasi dan demoralisasi nasionalisme. Menjadi pemimpin bukan berarti dedikasinya untuk negara menjadi meningkat, tetapi justru tuntutan mendapatkan fasilitas yang harus diberikan rakyat dan negaralah yang menjadi lebih meningkat.

Protokoler telah membuat seorang pejabat negara menjadi semakin jauh dari komunikasi dengan rakyatnya, sehingga masing-masing menjadi asing dengan lainnya. Kontak langsung hanya sekedar basa-basi yang tidak membuat mereka menjadi saling mengerti dan saling empati.

Kepemimpinan Politik, Komunikasi Politik dan Perilaku Politik Menyimpang

Para pemimpin hampir-hampir tidak memiliki kemampuan untuk membuat keputusan politik yang baik untuk kepentingan bangsa dan negara. Untuk kamufase, mereka lalu mengerahkan massa rakyat melakukan tekanan dalam proses pembuatan keputusan politik sehingga semakin buruklah bentuk keputusan politik yang terjadi. Melibatkan massa dalam proses pengambilan keputusan politik yang telah diberikan mekanisme dan prosedurnya secara ketatanegaraan memperlihatkan betapa lemahnya kepercayaan diri para pemimpin untuk menjalankan tugas dan kewajibannya membuat keputusan yang berguna bagi bangsa dan negara. Pada dasarnya menjadikan mereka memang tidak memiliki kemampuan membuat keputusan untuk bangsa. Hal ini terjadi karena sedemikian jauh dan renggangnya komunikasi emosi dan pikiran dengan rakyat yang dipimpinya. Tidak sehatnya pemimpin dan orang-orang dipimpinya. Komunikasi yang terbentuk lebih bersifat formalitas bagi kepentingan struktur organisasi. Pemimpin ditunjuk *de jure* melalui serangkaian kriteria, mekanisme, dan prosedur formal, walaupun sebenarnya tidak memiliki talenta pemimpin *de facto* secara individual.

Perubahan kualitas, visi, dan pemahaman rakyat yang semakin meningkat memungkinkan proses demokrasi dalam hidup menegara menjadi semakin mewujud. Rakyat mulai merasa memiliki negara dan pemimpin adalah orang yang diserahkan untuk

mengelola negara sesuai dengan keinginan pemiliknya. Sementara para pemimpin yang muncul dari proses rekrutmen yang buruk, masih mempertahankan pola kepemimpinan “*top-down*”, Terjadilah bentrokan kondisional dan situasional, sehingga pemimpin yang lemah kemampuan akan tidak berhasil melepaskan diri dari kondisional lalu menjadi termazulkan, walaupun secara formal masih mampu menguasai institusi-institusi formal.

Ketidakmampuan para pemimpin membuat keputusan bermutu bagi kehidupan bangsa dan negara, terutama terjadi karena rendahnya kemampuan kepemimpinan dan rendahnya konseptualitas hidup menegara yang mereka miliki. Inilah yang mendorong mereka memprovokasi habitatnya antara lain melalui “*money politics*” yang dimungkinkan karena pemimpin memperoleh fasilitas negara sehingga dapat didayagunakan untuk sasaran-sasaran terbatas. Pemimpin dengan mentalitas premanlah yang banyak bermunculan dari situasi semacam ini.

Melibatkan masyarakat bawah dalam *high politics* bukanlah perilaku politik bermoral, bahkan dapat dinyatakan sebagai perilaku politik menyimpang, *High politics* menuntut kemampuan nalar, konsep, dan *wisdom* untuk kepentingan luas masyarakat dan bangsa. Politik adalah hal membuat keputusan untuk kepentingan bersama. Untuk itu diperlukan kecerdasan dan kebijaksanaan. Dan itu membutuhkan orang-orang cerdas dan bijaksana, dan bukan massa preman.

Memprovokasi massa untuk terlibat dalam pengambilan keputusan *high politics*, jelas tidak akan memungkinkan keputusan yang dibuat dapat berkualitas tinggi. Proses pemikiran akan selalu terintervensi oleh aktifitas emosional. Terlebih bila disertai politik uang untuk menggerakkan kekuatan emosi yang dibius menjadi perilaku gerombolan tidak terkendali.

Demokrasi dan keterlibatan rakyat dalam pengambilan keputusan diartikan menjadi keterlibatan tidak proporsional dari massa kelas bawah pada pemecahan masalah negara seperti ditemukan pada Revolusi Proletar di Rusia dulu, yang akhirnya menghasilkan anarkhi dan anomie. Demokrasi harus diwujudkan proporsional. Masalah kenegaraan dengan kompleksitas tinggi seyogyanya dipecahkan bersama oleh warga bangsa yang memiliki kemampuan untuk itu. Parlemen dan lembaga yudikatif harus diisi oleh orang-orang dengan kompetensi tinggi untuk dapat menghasilkan keputusan bermutu bagi kemajuan bangsa dan negara. Tidak mungkin masalah bangsa dan negara yang memiliki kompleksitas tinggi dipecahkan oleh orang dengan kompetensi kepribadian rendah, tidak cerdas, brutal, premanisme, tidak mengenal etika, dan sopan santun hidup bersama, berbangsa dan bernegara. Hal sama berlaku pula untuk pejabat pemerintahan dan pejabat negara lainnya pada tingkat pengambilan keputusan berdampak publik.

Prosedur dan mekanisme rekrutmen yang transparan pada publik harus diciptakan agar setiap pemimpin politik benar-benar memiliki kompetensi yang dibutuhkan bangsa dan negara. Bukan berkat kroni, komplotan, dan nepotisme dari kepentingan-kepentingan sempit. Memiliki kompetensi kelompok tidak identik dengan memiliki kompetensi bagi bangsa dan negara. Pemimpin preman kompeten hanya untuk habitat preman. Bukan untuk habitat negara dan bangsa, walaupun mereka mempunyai daya beli tinggi untuk kursi-kursi kedudukan institusi formal.

Pemimpin yang dibutuhkan bukanlah individu kuat dalam artian berpotensi menjadi otoriter, melainkan pemimpin yang mampu berperilaku dedikatif terhadap kepentingan kemajuan bangsa, sehingga bisa diteladani kebersihannya oleh bangsa.

Karenanya, pemimpin haruslah merupakan fasilitator bagi optimalisasi potensi rakyat menuju kemajuan bangsa. Bukan pemimpin yang mengambil keuntungan bagi dirinya sendiri dengan memanipulasi atau menindas serta membohongi rakyatnya.

Partai politik memang merupakan instrumen penting dari sistem demokrasi negara. Namun partai politik yang tidak mampu menyediakan pemimpin negara yang berkualitas tidak akan dapat disebut sebagai instrument demokrasi yang berfungsi baik. Partai politik di Indonesia setelah reformasi, tampaknya sedang berkembang menjadi instrumen otoriter dari kelompok massa signifikan baru sebagaimana dwi fungsi ABRI di masa orde Soeharto dan kelompok revolusioner dimasa orde Sukarno. Semuanya akan bermuara pada monopoli kekuasaan negara bagi bukan kepentingan bersama seluruh bangsa. Kembali kita akan mengalami model perilaku penyimpangan politik lagi di Indonesia. Seakan akan keledai yang senantiasa imperosok dalam siklus lubang yang sama: siklus kebodohan dan kepapaan.

Kesimpulan dan Saran

Prospek kehidupan bangsa dan negara Indonesia dalam millenium III hanya mungkin memberikan arti dan manfaat bagi warga bangsa bilamana mampu terjadi perubahan perilaku mendasar dalam hidup berbangsa bernegara, meliputi:

Dihentikannya segera perilaku menyimpang oleh pelaku, pemimpin masyarakat, pejabat pemerintah, pejabat negara, pemimpin organisasi politik, pemimpin organisasi masyarakat, pemimpin LSM, para pakar ilmuwan, media massa, serta komponen bangsa dan negara lainnya. Ditumbuhkannya perilaku kepemimpinan yang menjadi panutan praktek perilaku politik sehat, bermanfaat yang berguna bagi bangsa dan negara. Bukan semata-mata rebutan kuasa.

Perilaku politik menyimpang dimaksud adalah semua bentuk perilaku yang menimbulkan gangguan dan akibat ketidaktentraman hidup bagi para warga bangsa dan negara Indonesia sehingga mengganggu kehidupan normal sehari-harinya manusia beradab.

Permasalahan dalam kehidupan berbangsa bernegara harus dipecahkan secara proporsional.

Masalah bangsa harus dipecahkan oleh bangsa, bukan oleh dan berorientasi kepentingan kelompok dalam bangsa.

Masalah kepentingan konseptual harus dipecahkan secara konseptual, bukan oleh gerakan massa.

Masalah kriminal harus dipecahkan secara hukum negara, bukan dengan hukum rimba atau hukum yang dianutnya sendiri.

Masalah ekonomi harus dipecahkan dengan memperhatikan hukum-hukum ekonomi bagi kesejahteraan bangsa bukan dipecahkan bagi kepentingan sendiri, keluarga, kroni, partai, atau golongannya.

Masalah-masalah yang dihadapi bangsa harus dihadapi secara cerdas dan mencerdaskan bangsa, emosi yang matang, dan sosialisasi yang sehat. Jangan diatasi dengan kebodohan, kebrutalan, dan keprimtifan adab.

Konflik-konflik sosial, etnis, agama, dan sebagainya dipecahkan dengan tetap mempertahankan visi bangsa Indonesia yang mengarah pada tumbuhnya rasa kebangsaan yang kuat terhormat dan berkeadilan.

Partai politik harus segera membenahi diri menjadi instrumen demokrasi bagi kepentingan seluruh bangsa jangan hanya menjadi alat kepentingan diri dan kelompok sendiri untuk memonopoli kekuasaan dengan otoriter menindas kepentingan bangsa.

Pembinaan generasi masa depan harus dilakukan segera saat ini melalui proses pendidikan dalam lembaga-lembaga dengan berlandaskan pada pengembangan mental dan perilaku yang sehat, yang dapat meningkatkan sosialisasi intensif tentang perilaku politik sehat agar dominan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia.

Millenium III bagi bangsa Indonesia dapat menjadi millenium pencerahan bilamana mampu semakin menerapkan perilaku politik yang sehat dan menghilangkan perilaku politik menyimpang dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Ilmu Psikologi di Indonesia harus mampu mengembangkan bentuk terapannya yang jelas, konkrit, dan akurat dalam memberikan kontribusinya terhadap penanggulangan perilaku politik yang sehat, bermanfaat optimal dan memajukan kehidupan bangsa serta negara Indonesia

Untuk itu perlu dikembangkan sentra-sentra layanan psikologi bagi pengembangan perilaku dan pelaku aktifitas politik dalam masyarakat, bangsa serta negara dalam bentuk pelatihan, pendidikan, konsultasi, pengembangan, dan bentuk-bentuk partisipasi lainnya sesuai dengan kemampuan serta perkembangan ilmu psikologi di Indonesia.

Bilamana langkah-langkah ini masih dapat diupayakan maka prospek kehidupan negara Indonesia, belumlah dapat dikatakan sedang menuju ke arah negara gagal. Prospek kehidupannya masih terlihat memberi harapan. Sekali lagi dengan mengatakan “andaikata kita tidak terperosok ke dalam lubang penyimpangan yang sama”.

————— 0 —————

Kepustakaan :

- Elms, Alan C, 1976, *Personality in Politics*, Harcourt Brace Jovanovich
- Chaplin, J.P. (1985), *Dictionary Of Psychology*, laured Int. Ed.
- Hatta Albanik (2000), *Telaah Psikologi Tentang Perilaku Politik Menyimpang dan Perilaku Kehidupan Berbangsa dan Bernegara Indonesia*, Jurnal Psikologi Vol. 6 September 2000
- Patterson, Steven A. (1990), *Political Behavior*, Sage Library on Social Research, sage Publication
- Smith, Peter B ; Bond, Michael (1997), *Social Psychology Across Cultures*, Harvester wheatsheat
- Taylor, Shalley A (1998), *Health Psychology*, Mc. Graw-Hill Int. Ed.
- Goleman, D (1995), *Emotional Intelligence*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Hassan F. (2000), *Pertemuan Antar Budaya dalam Era Globalisasi* (makalah)
- Hermann, M.G. (1986), *Political Psychology*, San Francisco: Jossey-Bass, Inc. Publishers
- Knutson, J.N. (1973), *Handbook of Political Psychology*, San Francisco: Jossey-Bass, Inc. Publishers
- Muluk, H. (2000), *Sindrom Kepiting dan Persaingan Elite Politik*, Kompas, 28 Juni 2000
- Qodari, M (2000), *Masyarakat yang Sakit?* Tempo, edisi 26 Juni-Juli 2000.
- Diamond, Larry dan Marc F. Plattner eds, 1998, *Nasioanalisme, Konflik Etnik, dan Demokrasi*, pent. Drs Somardi, Bandung: ITB
- Magnis-Suseno, Franz, 1999, *Etika Politik: Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Kim, Mochol, et.al, 1994, *Individualism and Collectivism: Theory, Method, and Application*, California: Sage
- Tesser, Abraham, 1995, *Advanced Social Psychology*, New York: McGraw-Hill
- Wiggins, James, et.al, 1994, *Social Psychology*, 5th ed., New York: McGraw-Hill

Rahn, Wendy M., et.al, 1996, *A Framework for the Study of Public Mood*,
Journal of Political Psychology, vol. 17, no. 1

Borris, Eileen R., 1997, *Forgiveness, Social Justice, and Reconciliation*,
American Psychological Association.

———— 0 ————

